



UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)

MODUL AJAR

BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3KKIP317 · 3 sks · Semester 5

Kurikulum 2023

Tim Penyusun

Darmawaty A. Razak, S.IP., M.AP.

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.

SEMESTER

05

Program Sarjana (S1)

3 sks · 16 minggu

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO · 2023

MODUL AJAR · PERENCANAAN PEMBANGUNAN

IDENTITAS MODUL

Unsur	Keterangan
Nama mata kuliah	Perencanaan Pembangunan
Kode mata kuliah	3KKIP317
Bobot	3 sks (Teori = 3, Praktikum = 0)
Semester	5 (lima)
Rumpun/kelompok MK	MKPP (sesuai RPS)
Mata kuliah prasyarat	Tidak ada
Program studi	Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan tinggi	Universitas Ichsan Gorontalo (UNISAN)
Kurikulum	Kurikulum OBE 2023
CPL yang dibebankan	CPL-03, CPL-04, CPL-05, CPL-07
CPMK	CPMK1–CPMK5
Jumlah unit modul	10 unit (satu unit untuk setiap Sub-CPMK) + Bab Asesmen Sumatif
Bahan kajian	Konsep dan paradigma perencanaan; regulasi perencanaan nasional dan daerah; analisis wilayah (BPS, potensi lokal, SWOT); perencanaan partisipatif desa/kelurahan; evaluasi konsistensi antardokumen; presentasi dan advokasi dokumen perencanaan
Model pembelajaran	Project-Based Learning (PjBL) dengan Case-Based Learning, bauran luring–daring melalui LMS UNISAN
Beban belajar per minggu	Pembelajaran terbimbing 3 × 50 menit, penugasan terstruktur 3 × 60 menit, belajar mandiri 3 × 60 menit
Dokumen acuan	RPS Perencanaan Pembangunan (RPS-3KKIP317) Kurikulum 2023
Tim penyusun	Darmawaty A. Razak, S.IP., M.AP. (NIDN 0924076701); Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si. (NIDN 0930048307)
Tahun penyusunan	2023

MODUL AJAR · PERENCANAAN PEMBANGUNAN

LEMBAR PENGESAHAN

Unsur	Keterangan
Judul modul	Modul Ajar Perencanaan Pembangunan Berbasis Outcome-Based Education
Mata kuliah / kode	Perencanaan Pembangunan / 3KKIP317
Bobot / semester	3 sks / semester 5
Program studi	Ilmu Pemerintahan (S1), FISIP UNISAN

Modul ajar ini telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai bahan ajar pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ihsan Gorontalo.

Gorontalo, ... 2023

Penyusun,

Koordinator Rumpun Mata Kuliah,

Darmawaty A. Razak, S.IP., M.AP.

NIDN 0924076701

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.

NIDN 0930048307

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

.....
NIDN

.....
NIDN

MODUL AJAR · PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Ajar Perencanaan Pembangunan berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) ini dapat diselesaikan. Modul ini disusun sebagai pendamping Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Perencanaan Pembangunan (3KKIP317) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo, Kurikulum 2023.

Pembangunan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Di Kawasan Timur Indonesia, perencanaan menghadapi tantangan khas: wilayah kepulauan, kesenjangan infrastruktur, keterbatasan data, dan kebutuhan untuk sungguh-sungguh mendengar suara warga desa. Calon sarjana ilmu pemerintahan perlu menguasai bukan hanya aturan dan hierarki dokumen perencanaan, tetapi juga cara membaca data wilayah, memfasilitasi musyawarah warga, menyusun program yang terukur, dan menilai konsistensi antardokumen secara jujur.

Modul ini mengikuti rantai capaian pembelajaran OBE: dari empat CPL yang dibebankan, diturunkan menjadi lima CPMK dan sepuluh Sub-CPMK yang masing-masing menjadi satu unit belajar. Sepanjang semester, mahasiswa mengerjakan proyek kelompok untuk satu desa atau kelurahan riil di KTI: menganalisis kondisi wilayah, menyimulasikan Musrenbang, menyusun dokumen perencanaan partisipatif, mengevaluasi konsistensinya terhadap dokumen daerah, lalu mempresentasikan dan mempertahankannya di hadapan panel.

Nilai-nilai institusional UNISAN, yaitu ICHSA-N (*Integrity, Creativity, Harmony, Service, Adaptability, Nationalism*), diintegrasikan ke dalam aktivitas belajar dan penilaian, termasuk integritas dalam penggunaan data dan pemanfaatan kecerdasan artifisial generatif (GenAI) secara bertanggung jawab.

Tim penyusun menyadari bahwa modul ini masih dapat disempurnakan. Masukan dari mahasiswa, dosen, dan pimpinan program studi sangat diharapkan melalui kuesioner umpan balik pada bagian lampiran.

Gorontalo, ... 2023

Tim Penyusun

MODUL AJAR · PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAFTAR ISI

Identitas Modul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Petunjuk Penggunaan Modul	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah.....	1
1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah.....	1
1.3 Capaian Pembelajaran	2
1.4 Matriks Keterkaitan.....	4
1.5 Peta Alur Belajar	5
1.6 Strategi Pembelajaran dan Proyek Semester	6
1.7 Sistem Penilaian	8
1.8 Ketuntasan Belajar	9
BAB II KONSEP DAN PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	11
BAB III SISTEM DAN REGULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	20
BAB IV ANALISIS KONDISI WILAYAH	29
BAB V ANALISIS SWOT DAN PERUMUSAN STRATEGI	37
BAB VI PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN SIMULASI MUSRENBANG	45
BAB VII MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DESA/KELURAHAN	54
BAB VIII KONSISTENSI ANTARDOKUMEN: RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS	63
BAB IX EFISIENSI, KEBERLANJUTAN, DAN REKOMENDASI	71
BAB X PRESENTASI RANCANGAN DOKUMEN PERENCANAAN	79
BAB XI PERTAHANAN DAN REFLEKSI INTEGRITAS PERENCANAAN	87
BAB XII ASESMEN SUMATIF	96
12.1 Prinsip Asesmen	96
12.2 Rekonsiliasi Komponen Penilaian dan Sub-CPMK	96
12.3 Perhitungan Nilai dan Ketercapaian untuk SI-OBE.....	97
12.4 Kisi-kisi, Contoh Naskah, dan Pedoman Penskoran UTS	99
12.5 Kisi-kisi, Contoh Naskah, dan Pedoman Penskoran UAS.....	100
12.6 Rubrik Tugas Lain	101
12.7 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan.....	102
GLOSARIUM	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	108
Lampiran A. Templat Kerja.....	108
Lampiran B. Lembar Pernyataan Penggunaan GenAI dan Orisinalitas	111
Lampiran C. Kuesioner Umpan Balik Modul	112

MODUL AJAR · PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL**A. Petunjuk bagi Mahasiswa**

1. Bacalah Bab I secara utuh pada minggu pertama agar Anda memahami capaian pembelajaran, alur belajar, proyek semester, dan cara penilaian.
2. Pelajari unit sesuai jadwal mingguan. Unit 7 dan Unit 8 dipelajari bersamaan pada minggu 13.
3. Kerjakan aktivitas daring di LMS UNISAN **sebelum** sesi luring; sesi tatap muka digunakan untuk diskusi kasus, lokakarya, simulasi Musrenbang, dan presentasi.
4. Jawablah pertanyaan pada kotak **Pemantik** dan **Studi Kasus** secara tertulis sebagai portofolio.
5. Kerjakan **Latihan** tanpa melihat kunci jawaban, lalu hitung tingkat penguasaan Anda (subbab 1.8).
6. Bentuk kelompok proyek pada minggu 2, pilih satu desa atau kelurahan riil di KTI, dan ikuti tahapan proyek pada subbab 1.6.

B. Petunjuk bagi Dosen

1. Gunakan modul ini bersama RPS Perencanaan Pembangunan (RPS-3KKIP317). Bobot Sub-CPMK, penempatan minggu, dan komponen penilaian telah diselaraskan dengan RPS sesuai keputusan pada subbab 1.6 dan 1.7.
2. Setujui lokus desa/kelurahan setiap kelompok paling lambat akhir minggu 2.
3. Siapkan skenario peran simulasi Musrenbang (kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pelaku usaha, kelompok rentan) untuk minggu 9–10.
4. Undang praktisi perencanaan (Bappeda, pemerintah desa, atau pendamping desa) sebagai panelis minggu 15 bila memungkinkan.
5. Rekam nilai per Sub-CPMK ke SI-OBE UNISAN sesuai tabel rekonsiliasi pada Bab Asesmen Sumatif.

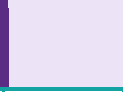
C. Etika Akademik, Etika Data, dan Pemanfaatan GenAI

Integritas perencanaan dimulai dari integritas data. Ketentuan berikut berlaku bagi seluruh tugas, proyek, dan ujian.

- Data sekunder (BPS, PODES, dokumen RPJMD/Renstra/Renja) harus dikutip lengkap dengan sumber dan tahun; fabrikasi data atau pemalsuan notulen dikenai sanksi akademik.
- Data primer dari warga dikumpulkan dengan persetujuan dan dijaga kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Plagiarisme dan perjkorian dikenai sanksi sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
- GenAI boleh digunakan sebagai alat bantu eksplorasi, tetapi setiap penggunaan wajib dinyatakan dalam **Lembar Pernyataan Penggunaan GenAI dan Orisinalitas** (lampiran); GenAI dilarang selama kuis, UTS, dan UAS kecuali diizinkan dosen.

D. Penanda Kotak Berwarna

Modul ini menggunakan kotak berwarna untuk membedakan fungsi setiap bagian. Kenali penandanya agar Anda dapat memindai isi modul dengan cepat.

Contoh	Kotak	Ciri visual	Fungsi
	Sub-CPMK	Latar lila, garis kiri ungu	Kemampuan akhir unit dan indikatornya, dikutip persis dari RPS.
	Pemantik / Ayo Diskusi	Bingkai toska	Pertanyaan pembuka untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan memicu diskusi.
	Studi Kasus	Latar toska muda, garis kiri toska	Kasus ilustrasi berikut pertanyaan analisis.
	Aktivitas Pembelajaran	Latar navy muda, garis kiri navy	Kegiatan luring, daring (LMS), dan luaran setiap minggu.
	Latihan	Bingkai navy	Soal untuk mengukur penguasaan unit.
	Refleksi	Latar ungu pucat, garis kiri lembayung	Pertanyaan untuk menilai proses belajar diri sendiri.
	Nilai ICHSA-N	Blok navy, teks putih	Pengaitan materi dengan nilai institusional UNISAN.
	Persiapan UTS/UAS	Latar toska muda, bingkai toska tua	Ringkasan cakupan dan strategi menghadapi ujian.

BAB I · PENGANTAR MATA KULIAH

I

PENDAHULUAN

Peta jalan belajar Perencanaan Pembangunan selama satu semester

CPMK1–CPMK5

CPL-03 · CPL-04 · CPL-05 · CPL-07

3 sks · 16 minggu

■ 1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah Perencanaan Pembangunan (3 sks) membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis kondisi wilayah serta menyusun dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis dan berbasis bukti, mulai dari tingkat desa hingga daerah, dengan penekanan pada konteks Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Melalui *Project-Based Learning*, mahasiswa bergerak dari pemahaman konsep, paradigma, dan regulasi perencanaan nasional (RPJPN, RPJMN, RKPD), menuju analisis isu pembangunan daerah dengan data BPS, pemetaan potensi lokal, dan analisis SWOT, hingga menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif tingkat desa atau kelurahan yang memuat prioritas program, indikator kinerja SMART, dan rencana anggaran berbasis kebutuhan masyarakat. Dokumen tersebut kemudian dievaluasi konsistensinya terhadap RPJMD–Renstra–Renja, dipresentasikan, dan dipertahankan di hadapan panel.

Mata kuliah ini relevan dengan CPL-03 (sistem pemerintahan dan hubungan pusat–daerah), CPL-04 (analisis masalah publik berbasis bukti), CPL-05 (manajemen dan pengambilan keputusan yang akuntabel), dan CPL-07 (pemanfaatan data dan teknologi informasi).

■ 1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah

Perencanaan Pembangunan merupakan mata kuliah keahlian inti pada semester 5 tanpa prasyarat formal. Mata kuliah ini memadukan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan manajemen pemerintahan yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam satu keterampilan praktis: merencanakan pembangunan bersama masyarakat.

Keterampilan ini dibutuhkan langsung oleh perencana di Bappeda dan perangkat daerah, aparatur dan pendamping desa, konsultan pembangunan, serta pegiat masyarakat sipil. Di KTI, perencanaan yang partisipatif dan berbasis data sangat menentukan apakah dana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga di wilayah kepulauan dan terpencil.

Nilai ICHSA-N diintegrasikan ke dalam aktivitas belajar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Integrasi Nilai ICHSA-N dalam Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan

Nilai	Makna dalam mata kuliah	Wujud dalam aktivitas dan penilaian
Integrity	Kejujuran data dan anggaran	Data BPS dan dokumen resmi dikutip benar; anggaran realistis; refleksi integritas perencanaan
Creativity	Strategi pembangunan yang inovatif	Rumusan strategi SWOT dan program yang sesuai kapasitas lokal

Nilai	Makna dalam mata kuliah	Wujud dalam aktivitas dan penilaian
Harmony	Musyawarah yang menghargai semua suara	Simulasi Musrenbang yang melibatkan kelompok rentan dan perempuan
Service	Keberpihakan pada kebutuhan warga	Prioritas program berbasis kebutuhan masyarakat; rekomendasi berorientasi kepentingan publik
Adaptability	Menyesuaikan rencana dengan kondisi dan masukan	Revisi dokumen berdasarkan evaluasi konsistensi dan pertanyaan panel
Nationalism	Kepedulian pada pemerataan pembangunan	Lokus proyek di desa atau kelurahan riil Kawasan Timur Indonesia

■ 1.3 Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran disusun berjenjang: empat CPL yang dibebankan (Tabel 1.2) dijabarkan menjadi lima CPMK (Tabel 1.3), lalu dirinci menjadi sepuluh Sub-CPMK yang menjadi kemampuan akhir setiap unit (Tabel 1.4).

Tabel 1.2 CPL Program Studi yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan
CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
CPL-04	Mampu menganalisis masalah publik, merumuskan alternatif kebijakan, serta mengevaluasi implementasi dan kinerja kebijakan publik secara berbasis bukti.
CPL-05	Mampu menerapkan fungsi manajemen pemerintahan — tata kelola sumber daya manusia, keuangan, organisasi, pelayanan publik, strategi, dan pengambilan keputusan — secara akuntabel.
CPL-07	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan data untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital (SPBE) dan mewujudkan agile governance.

Tabel 1.3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPL terkait
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, teori, dan paradigma perencanaan pembangunan (top-down, bottom-up, partisipatif) beserta kerangka regulasi perencanaan nasional (RPJPN, RPJMN, RKPD) dalam konteks pembangunan Indonesia bagian timur.	CPL-03
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis kondisi wilayah dan isu pembangunan daerah menggunakan metode analisis situasi (SWOT, analisis data sekunder BPS, dan pemetaan potensi lokal) sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan.	CPL-04
CPMK3	Mahasiswa mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan partisipatif tingkat desa/kelurahan yang memuat identifikasi masalah, prioritas program, indikator kinerja terukur, dan rencana anggaran berbasis kebutuhan masyarakat lokal Kawasan Timur Indonesia.	CPL-05

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPL terkait
CPMK4	Mahasiswa mampu mengevaluasi kesesuaian dan konsistensi antardokumen rencana pembangunan (RPJMD–Renstra–Renja) menggunakan kriteria relevansi, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan berbasis bukti.	CPL-07
CPMK5	Mahasiswa mampu mempresentasikan dan mempertahankan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, komunikatif, dan bertanggung jawab di hadapan pemangku kepentingan simulasi, dengan menginternalisasi nilai integritas dan keberpihakan pada kepentingan publik.	CPL-07

Keterangan: CPL terkait diturunkan dari matriks CPL × Sub-CPMK pada RPS (Tabel 1.6). Pemetaan CPMK4–5 ke CPL-07 mengikuti RPS dan dicatat sebagai bahan penyelarasan pada Bab XII.

Tabel 1.4 Sub-CPMK, CPMK Induk, dan Minggu Pembelajaran

Kode	Sub-CPMK (kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	CPMK	Minggu
Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dasar, sejarah perkembangan, dan paradigma perencanaan pembangunan (top-down, bottom-up, partisipatif) dengan mengaitkan konteks pembangunan Indonesia bagian timur.	CPMK1	1–2
Sub-CPMK2	Menguraikan kerangka regulasi sistem perencanaan pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN, RKPD, Musrenbang) dan menghubungkan hierarki dokumen tersebut dengan mekanisme perencanaan di daerah.	CPMK1	3–4
Sub-CPMK3	Menganalisis kondisi wilayah daerah di KTI menggunakan analisis data sekunder BPS dan pemetaan potensi lokal untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan strategis.	CPMK2	5–6
Sub-CPMK4	Menerapkan analisis SWOT secara sistematis terhadap kondisi wilayah daerah KTI untuk merumuskan alternatif strategi pembangunan yang berbasis bukti.	CPMK2	7
Sub-CPMK5	Melaksanakan proses identifikasi masalah dan kebutuhan pembangunan tingkat desa/kelurahan secara partisipatif melalui simulasi Musrenbang dan pengumpulan data primer masyarakat lokal KTI.	CPMK3	9–10
Sub-CPMK6	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan partisipatif tingkat desa/kelurahan yang memuat prioritas program, indikator kinerja terukur (SMART), dan rencana anggaran berbasis kebutuhan masyarakat KTI.	CPMK3	11–12
Sub-CPMK7	Mengevaluasi konsistensi vertikal dan horizontal antardokumen perencanaan daerah (RPJMD–Renstra SKPD–Renja SKPD) menggunakan kriteria relevansi dan efektivitas berdasarkan dokumen perencanaan resmi yang tersedia.	CPMK4	13
Sub-CPMK8	Mengevaluasi kesesuaian antardokumen rencana pembangunan menggunakan kriteria efisiensi dan keberlanjutan serta menyusun rekomendasi perbaikan berbasis bukti yang berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan KTI.	CPMK4	13
Sub-CPMK9	Mempresentasikan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan komunikatif di hadapan pemangku kepentingan simulasi, dengan menggunakan media presentasi yang terstruktur.	CPMK5	14

Kode	Sub-CPMK (kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	CPMK	Minggu
Sub-CPMK10	Mempertahankan dan merefleksikan rancangan dokumen perencanaan pembangunan secara bertanggung jawab dengan menginternalisasi nilai integritas perencanaan dan keberpihakan pada kepentingan publik masyarakat KTI.	CPMK5	15

Sub-CPMK7 dan Sub-CPMK8 dipelajari bersama pada minggu 13, dan Sub-CPMK9 ditempatkan pada minggu 14 karena tabel mingguan RPS tidak menyediakan minggu untuk Sub-CPMK9. Minggu 8 (UTS) dan minggu 16 (UAS) merupakan minggu evaluasi sumatif.

■ 1.4 Matriks Keterkaitan

Matriks berikut menunjukkan keselarasan konstruktif antara Sub-CPMK, CPMK, CPL, dan unit modul. Bobot pada Tabel 1.6 mengikuti tabel utama RPS dan digunakan untuk menghitung ketercapaian CPL di SI-OBE.

Tabel 1.5 Matriks Sub-CPMK × CPMK

Sub-CPMK	CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4	CPMK5
Sub-CPMK1	√				
Sub-CPMK2	√				
Sub-CPMK3		√			
Sub-CPMK4		√			
Sub-CPMK5			√		
Sub-CPMK6			√		
Sub-CPMK7				√	
Sub-CPMK8				√	
Sub-CPMK9					√
Sub-CPMK10					√
Jumlah Sub-CPMK	2	2	2	2	2
Bobot CPMK (%)	26	20	26	14	14

Tabel 1.6 Matriks CPL × Sub-CPMK dan Bobot Penilaian (%)

Sub-CPMK	CPL-03	CPL-04	CPL-05	CPL-07	Bobot (%)	Minggu
Sub-CPMK1	13				13	1–2
Sub-CPMK2	13				13	3–4
Sub-CPMK3		13			13	5–6
Sub-CPMK4		7			7	7
Sub-CPMK5			13		13	9–10
Sub-CPMK6			13		13	11–12

Sub-CPMK	CPL-03	CPL-04	CPL-05	CPL-07	Bobot (%)	Minggu
Sub-CPMK7				7	7	13
Sub-CPMK8				7	7	13
Sub-CPMK9				7	7	14
Sub-CPMK10				7	7	15
Jumlah	26	20	26	28	100	14 minggu

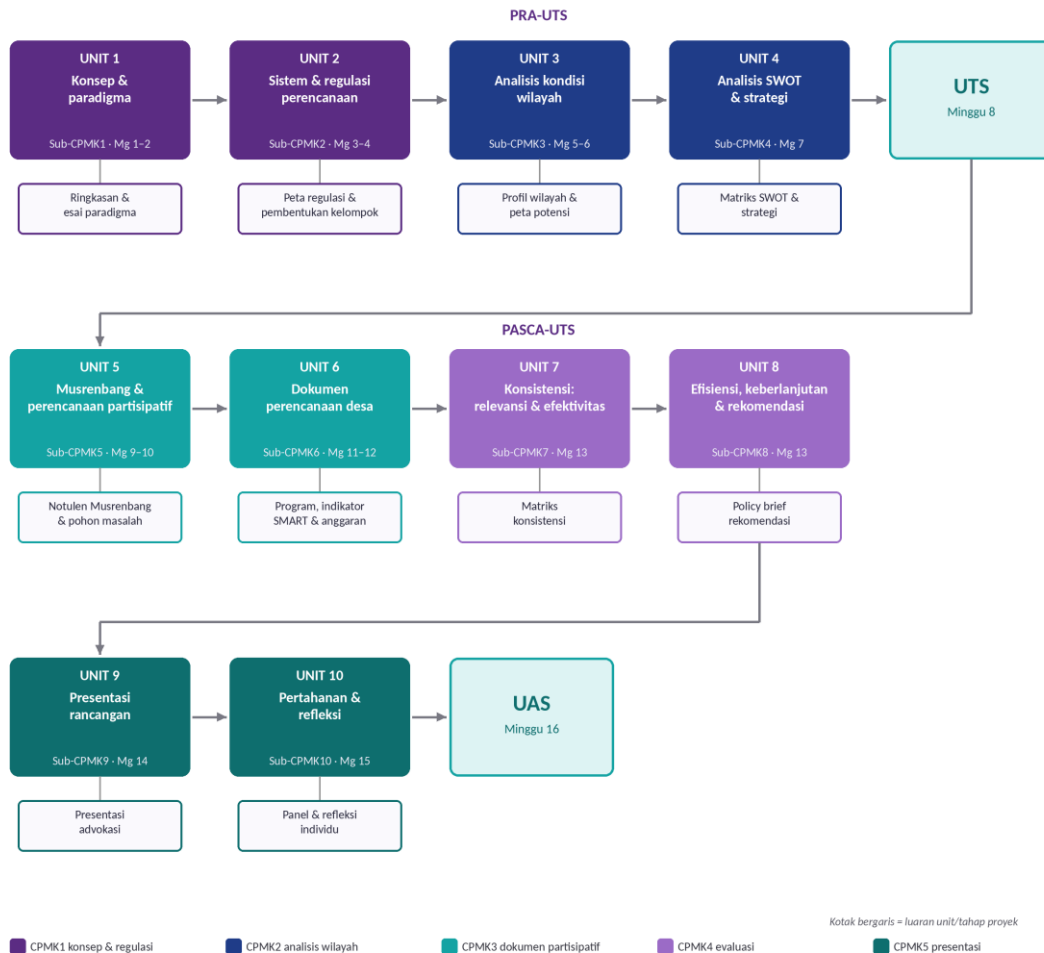
Kolom minggu disesuaikan dengan penempatan pada Tabel 1.4; RPS mencantumkan jumlah 15 minggu, padahal tersedia 14 minggu pembelajaran.

Tabel 1.7 Peta Unit Modul

Bab / Unit	Judul unit	Sub-CPMK	CPMK	Minggu	Bobot (%)
Bab II / Unit 1	Konsep dan Paradigma Perencanaan Pembangunan	Sub-CPMK1	CPMK1	1–2	13
Bab III / Unit 2	Sistem dan Regulasi Perencanaan Pembangunan	Sub-CPMK2	CPMK1	3–4	13
Bab IV / Unit 3	Analisis Kondisi Wilayah	Sub-CPMK3	CPMK2	5–6	13
Bab V / Unit 4	Analisis SWOT dan Perumusan Strategi	Sub-CPMK4	CPMK2	7	7
Minggu 8 — Ujian Tengah Semester (UTS): Sub-CPMK1–Sub-CPMK4					
Bab VI / Unit 5	Perencanaan Partisipatif dan Simulasi Musrenbang	Sub-CPMK5	CPMK3	9–10	13
Bab VII / Unit 6	Menyusun Dokumen Perencanaan Desa/Kelurahan	Sub-CPMK6	CPMK3	11–12	13
Bab VIII / Unit 7	Konsistensi Antardokumen: Relevansi dan Efektivitas	Sub-CPMK7	CPMK4	13	7
Bab IX / Unit 8	Efisiensi, Keberlanjutan, dan Rekomendasi	Sub-CPMK8	CPMK4	13	7
Bab X / Unit 9	Presentasi Rancangan Dokumen Perencanaan	Sub-CPMK9	CPMK5	14	7
Bab XI / Unit 10	Pertahanan dan Refleksi Integritas Perencanaan	Sub-CPMK10	CPMK5	15	7
Minggu 16 — Ujian Akhir Semester (UAS): seluruh materi dengan penekanan minggu 9–15					
Bab XII — Asesmen Sumatif (rekonsiliasi penilaian, kisi-kisi dan contoh naskah UTS/UAS, rubrik, perhitungan SI-OBE)					

■ 1.5 Peta Alur Belajar

Gambar 1.1 menunjukkan alur belajar selama satu semester. Warna kotak menandai CPMK induk setiap unit, sedangkan kotak bergaris di bawahnya menunjukkan luaran unit atau tahapan proyek kelompok. Unit 1–4 dievaluasi melalui UTS; UAS mencakup seluruh materi dengan penekanan pada Unit 5–8; Unit 5–10 juga dinilai melalui Proyek Dokumen Perencanaan.



Gambar 1.1 Peta Alur Belajar Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan

1.6 Strategi Pembelajaran dan Proyek Semester

Setiap minggu terdiri atas **pembelajaran terbimbing** (PB) 3 × 50 menit, **penugasan terstruktur** (PT) 3 × 60 menit, dan **kegiatan mandiri** (KM) 3 × 60 menit, atau 510 menit (8,5 jam) per minggu. Pola umum setiap unit adalah kegiatan daring di LMS sebelum sesi, kegiatan luring berupa diskusi kasus, lokakarya, simulasi, atau presentasi, serta penugasan individu dan tahapan proyek kelompok.

Tabel 1.8 Beban Belajar dan Luaran per Minggu

Mg	Unit / Sub-CPMK	Pokok bahasan	PB	PT	KM	Luaran utama
1	Unit 1 / Sub-CPMK1	Konsep dan sejarah perencanaan pembangunan	150'	180'	180'	Ringkasan reflektif 400–500 kata (individu)
2	Unit 1 / Sub-CPMK1	Paradigma top-down, bottom-up, partisipatif	150'	180'	180'	Esai analitik 600–800 kata (individu); pembentukan kelompok dan pemilihan lokus
3	Unit 2 / Sub-CPMK2	Sistem perencanaan nasional dan hierarki dokumen	150'	180'	180'	Tabel pemetaan regulasi (individu); kuis

Mg	Unit / Sub-CPMK	Pokok bahasan	PB	PT	KM	Luaran utama
4	Unit 2 / Sub-CPMK2	Keterkaitan RPJMD, Renstra, dan Renja	150'	180'	180'	Laporan analisis dokumen 700–900 kata (berpasangan); kuis
5	Unit 3 / Sub-CPMK3	Analisis data sekunder BPS	150'	180'	180'	Tabel profil wilayah (kelompok)
6	Unit 3 / Sub-CPMK3	Pemetaan potensi lokal dan isu strategis	150'	180'	180'	Laporan profil wilayah dan peta potensi (kelompok)
7	Unit 4 / Sub-CPMK4	Analisis SWOT dan matriks strategi	150'	180'	180'	Matriks SWOT dan narasi strategi (kelompok)
8	UTS	Integrasi materi minggu 1–7	150'	180'	180'	Lembar jawaban UTS
9	Unit 5 / Sub-CPMK5	Perencanaan partisipatif dan persiapan Musrenbang	150'	180'	180'	Panduan wawancara/FGD dan catatan simulasi
10	Unit 5 / Sub-CPMK5	Simulasi Musrenbang dan pohon masalah	150'	180'	180'	Notulen, matriks kebutuhan, dan pohon masalah
11	Unit 6 / Sub-CPMK6	Prioritas program dan indikator SMART	150'	180'	180'	Draf tabel program, indikator, dan anggaran
12	Unit 6 / Sub-CPMK6	Rencana anggaran dan dokumen final	150'	180'	180'	Dokumen perencanaan partisipatif
13	Unit 7–8 / Sub-CPMK7–8	Evaluasi konsistensi, efisiensi, dan keberlanjutan	150'	180'	180'	Matriks konsistensi dan draf policy brief
14	Unit 9 / Sub-CPMK9	Presentasi rancangan dokumen	150'	180'	180'	Policy brief final dan presentasi advokasi
15	Unit 10 / Sub-CPMK10	Pertahanan dan refleksi	150'	180'	180'	Panel 15 + 15 menit, dokumen revisi, refleksi individu
16	UAS	Evaluasi akhir semester	150'	180'	180'	Lembar jawaban UAS

PB = pembelajaran terbimbing; PT = penugasan terstruktur; KM = kegiatan mandiri (menit per minggu). Total beban semester $16 \times 510 \text{ menit} = 136 \text{ jam}$. Luaran bercetak tebal merupakan tahapan proyek kelompok.

1.6.1 Proyek Semester

Proyek semester berupa **penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif untuk satu desa atau kelurahan riil di Kawasan Timur Indonesia**. Proyek dikerjakan kelompok beranggotakan 4–5 mahasiswa yang dibentuk pada minggu 2; lokus harus disetujui dosen paling lambat akhir minggu 2. Jadwal tahapan mengikuti urutan materi agar setiap tahap dikerjakan setelah konsepnya dipelajari; simulasi Musrenbang ditempatkan pada minggu 9–10 sehingga tidak bertabrakan dengan UTS.

Tabel 1.9 Tahapan dan Luaran Proyek Semester

Tahap	Minggu	Kegiatan dan luaran kelompok	Komponen
1	2	Pembentukan kelompok, pemilihan lokus, pembagian peran, dan pengumpulan dokumen resmi (RPJMD, Renstra, Renja, profil desa, data PODES).	Formatif
2	5–6	Pengolahan data BPS dan pemetaan potensi lokal. Luaran: Laporan Profil Wilayah dan peta potensi.	Tugas Analisis Wilayah
3	7	Luaran: Matriks SWOT dan narasi strategi (SO, ST, WO, WT).	Tugas Analisis Wilayah
4	9–10	Simulasi Musrenbang dengan peran pemangku kepentingan termasuk kelompok rentan. Luaran: panduan FGD, notulen, daftar hadir, matriks kebutuhan, dan pohon masalah .	Proyek
5	11–12	Luaran: Dokumen perencanaan partisipatif (prioritas program, indikator SMART, rencana anggaran indikatif).	Proyek
6	13–14	Evaluasi konsistensi dokumen desa terhadap RPJMD–Renstra–Renja serta efisiensi dan keberlanjutan. Luaran: matriks konsistensi dan policy brief 2–3 halaman.	Proyek
7	14	Presentasi rancangan dokumen kepada pemangku kepentingan simulasi dengan media terstruktur (maksimal 20 slide).	Proyek
8	15	Panel pertahanan 15 menit presentasi dan 15 menit tanya-jawab; dokumen revisi dan lembar refleksi individu .	Proyek

KETENTUAN PROYEK

- Kontribusi individu diverifikasi melalui log kerja mingguan, lembar refleksi individu, dan penilaian antarsejawat yang dapat menggeser nilai individu maksimal $\pm 10\%$ dari nilai kelompok (Rencana Tugas RPS).
- Keterlambatan tanpa alasan yang dapat diverifikasi dikurangi 5 poin per hari dari skor komponen terkait.
- Rekaman video presentasi diunggah ke repositori kelas sesuai Rencana Tugas RPS; fabrikasi data atau plagiarisme antardokumen dikenai sanksi akademik.

■ 1.7 Sistem Penilaian

Penilaian menggunakan lima komponen sesuai RPS. Setiap komponen dipetakan ke Sub-CPMK sehingga penjumlahan menurut Sub-CPMK menghasilkan bobot pada Tabel 1.6. Rincian rekonsiliasi dan kisi-kisi ujian disajikan pada Bab XII.

Tabel 1.10 Komponen Penilaian dan Pemetaannya ke Sub-CPMK

No	Komponen	Bobot (%)	Sub-CPMK yang diukur (bobot)	Bentuk dan waktu
1	Kuis Regulasi Perencanaan	10	Sub-CPMK1 (4), Sub-CPMK2 (6)	Kuis paradigma (mg 1–2), latihan pemetaan regulasi dan analisis dokumen (mg 3–4)

No	Komponen	Bobot (%)	Sub-CPMK yang diukur (bobot)	Bentuk dan waktu
2	Tugas Analisis Wilayah	10	Sub-CPMK3 (6), Sub-CPMK4 (4)	Laporan profil wilayah (mg 6) dan matriks SWOT (mg 7), kelompok
3	UTS	20	Sub-CPMK1 (6), Sub-CPMK2 (5), Sub-CPMK3 (6), Sub-CPMK4 (3)	Ujian tertulis (mg 8)
4	Proyek Dokumen Perencanaan	40	Sub-CPMK5 (10), Sub-CPMK6 (10), Sub-CPMK7 (3), Sub-CPMK8 (3), Sub-CPMK9 (7), Sub-CPMK10 (7)	Musrenbang, dokumen perencanaan, policy brief, presentasi, pertahanan, dan refleksi (mg 9–15)
5	UAS	20	Sub-CPMK1 (3), Sub-CPMK2 (2), Sub-CPMK3 (1), Sub-CPMK5 (3), Sub-CPMK6 (3), Sub-CPMK7 (4), Sub-CPMK8 (4)	Ujian tertulis seluruh materi dengan penekanan minggu 9–15 (mg 16)
Jumlah		100		

Ringkasan reflektif (mg 1), esai paradigma (mg 2), tabel regulasi (mg 3), laporan analisis dokumen berpasangan (mg 4), kuis minggu 5, 7, 10, dan 13, serta partisipasi bersifat formatif.

Nilai akhir dalam skala 0–100 dikonversi menurut ketentuan UNISAN untuk program sarjana (Tabel 1.11).

Tabel 1.11 Konversi Nilai Program Sarjana UNISAN

Nilai akhir (skala 100)	Huruf mutu	Bobot
85,00 – 100,00	A	4,00
75,00 – 84,99	B	3,00
65,00 – 74,99	C	2,00
50,00 – 64,99	D	1,00
0,00 – 49,99	E	0,00

■ 1.8 Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar diukur pada tingkat unit. Setelah mengerjakan latihan pada setiap unit, hitunglah tingkat penguasaan Anda dengan rumus berikut.

RUMUS TINGKAT PENGUASAAN

$$\text{Tingkat penguasaan (\%)} = (\text{skor yang diperoleh} \div \text{skor maksimum}) \times 100\%$$

Skor maksimum latihan setiap unit adalah 100 (lima soal pilihan ganda $\times$ 10 dan dua soal uraian $\times$ 25), atau jumlah skor daftar periksa untuk unit berluaran presentasi atau pertahanan. Ambang ketuntasan ditetapkan **70%**.

Tabel 1.12 Tindak Lanjut Berdasarkan Tingkat Penguasaan

Tingkat penguasaan	Kategori	Tindak lanjut
$\geq 90\%$	Sangat baik	Lanjutkan ke unit berikutnya dan kerjakan kegiatan pengayaan pada unit tersebut.
70% – 89%	Tuntas	Lanjutkan ke unit berikutnya; pelajari kembali bagian yang jawabannya belum tepat.
$< 70\%$	Belum tuntas	Ikuti kegiatan remedial: baca ulang uraian materi yang terkait, diskusikan kesulitan di forum LMS atau saat konsultasi, lalu kerjakan kembali latihan hingga mencapai 70%.

Ambang yang sama (nilai Sub-CPMK ≥ 70) digunakan dalam SI-OBE untuk menyatakan bahwa seorang mahasiswa telah mencapai Sub-CPMK, CPMK, dan CPL yang bersangkutan.

REFLEKSI AWAL

Sebelum memulai Unit 1, jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan simpan jawabannya di portofolio Anda. Anda akan membandingkannya kembali di akhir semester.

1. Pernahkah Anda atau keluarga Anda mengikuti Musrenbang di desa atau kelurahan? Apakah usulan warga benar-benar terwujud?
2. Program pembangunan apa di daerah Anda yang menurut Anda tidak sesuai kebutuhan warga? Mengapa hal itu bisa terjadi?
3. Kemampuan apa yang paling ingin Anda kuasai dari mata kuliah ini, dan bagaimana Anda akan mengatur waktu belajar 8,5 jam per minggu?

BAB II · UNIT 1 · MINGGU 1–2

01

KONSEP DAN PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dari perencanaan terpusat menuju perencanaan partisipatif

Sub-CPMK1

CPL-03

Bobot 13%

■ 2.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK1

Menjelaskan konsep dasar, sejarah perkembangan, dan paradigma perencanaan pembangunan (top-down, bottom-up, partisipatif) dengan mengaitkan konteks pembangunan Indonesia bagian timur.

Indikator: mahasiswa mampu

- Menjelaskan pengertian perencanaan pembangunan menurut minimal dua perspektif teoretis yang berbeda secara tepat
- Menguraikan tahapan evolusi perencanaan pembangunan dari era kolonial hingga reformasi Indonesia dengan urutan kronologis yang benar
- Membedakan karakteristik paradigma top-down, bottom-up, dan partisipatif berdasarkan minimal tiga dimensi pembandingan (sumber inisiatif, aktor utama, dan mekanisme pengambilan keputusan)
- Menghubungkan paradigma perencanaan tertentu dengan kondisi riil pembangunan di Kawasan Timur Indonesia melalui contoh konkret yang relevan

Tabel 2.1 Kedudukan Sub-CPMK1 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK1 — menjelaskan konsep dasar, teori, dan paradigma perencanaan pembangunan (top-down, bottom-up, partisipatif) beserta kerangka regulasi perencanaan nasional (RPJPN, RPJMN, RKPD) dalam konteks pembangunan Indonesia bagian timur.
CPL yang didukung	CPL-03 (13%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	13% dari nilai akhir — Kuis Regulasi Perencanaan 4%, UTS 6%, dan UAS 3%
Estimasi waktu belajar	2 minggu × 510 menit = 1.020 menit (17 jam): PB 300 menit, PT 360 menit, KM 360 menit

■ 2.2 Pemantik

PEMANTIK

Sebuah kabupaten kepulauan menerima program pembangunan dermaga beton dari pusat. Setelah selesai, dermaga jarang digunakan karena perahu nelayan setempat terlalu kecil untuk bersandar. Warga mengatakan bahwa yang mereka butuhkan sebenarnya tempat pelelangan ikan dan cold storage, tetapi tidak pernah ditanya.

1. Apa yang salah dalam proses perencanaan dermaga tersebut?
2. Siapa yang seharusnya terlibat dalam menentukan program pembangunan di pulau itu?

■ 2.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menghubungkan pengertian perencanaan, sejarah perencanaan di Indonesia, tiga paradigma perencanaan, dan konteks pembangunan Kawasan Timur Indonesia.



Gambar 2.1 Peta Konsep Unit 1

■ 2.4 Uraian Materi

2.4.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan

Conyers dan Hills (1984) memandang perencanaan sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan atau pilihan tentang cara-cara alternatif menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mendefinisikan perencanaan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.2 Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan

Unsur	Makna	Contoh di tingkat desa
Tujuan	Keadaan yang ingin dicapai	Seluruh rumah tangga memiliki akses air bersih

Unsur	Makna	Contoh di tingkat desa
Pilihan	Alternatif cara mencapai tujuan	Sumur bor, penampungan air hujan, atau perpipaan
Sumber daya	Dana, SDM, lahan, waktu, dan data	Dana desa, gotong royong warga, lahan desa
Waktu	Kerangka waktu pelaksanaan	Tahap I tahun depan, tahap II dua tahun kemudian
Proses berkelanjutan	Perencanaan diikuti pelaksanaan, pemantauan, dan revisi	Evaluasi setiap musyawarah desa tahunan

2.4.2 Sejarah Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Tabel 2.3 Periode Perkembangan Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Periode	Instrumen dan ciri	Kecenderungan paradigma
Kolonial	Perencanaan untuk kepentingan ekonomi kolonial; kebijakan Politik Etis awal abad ke-20	Sangat terpusat
Orde Lama	Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956–1960 dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana	Terpusat dan ideologis
Orde Baru	Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Repelita I–VI; mekanisme usulan dari desa melalui forum musyawarah pembangunan	Top-down dominan dengan unsur bottom-up prosedural
Reformasi	Desentralisasi; UU 25/2004 tentang SPPN; RPJPN 2005–2025; Musrenbang berjenjang; UU 6/2014 tentang Desa	Perpaduan pendekatan dengan penekanan partisipasi

Disarikan dari Rustiadi dkk. (2018) dan regulasi terkait.

UU 25/2004 menyebutkan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan: **politik** (visi kepala daerah terpilih), **teknokratik** (metode dan kerangka ilmiah), **partisipatif** (melibatkan pemangku kepentingan), serta **atas-bawah** dan **bawah-atas** (diselaraskan melalui musyawarah berjenjang).

2.4.3 Tiga Paradigma Perencanaan

Tabel 2.4 Perbandingan Paradigma Top-Down, Bottom-Up, dan Partisipatif

Dimensi	Top-down	Bottom-up	Partisipatif
Sumber inisiatif	Pemerintah pusat atau pimpinan	Usulan masyarakat dan unit bawah	Dirumuskan bersama pemerintah dan masyarakat
Aktor utama	Teknokrat dan pejabat	Warga, pemerintah desa, kelompok lokal	Pemerintah, warga, kelompok rentan, swasta, akademisi
Mekanisme keputusan	Hierarkis, berbasis kajian ahli	Agregasi dan seleksi usulan dari bawah	Deliberasi dan kesepakatan dalam forum

Dimensi	Top-down	Bottom-up	Partisipatif
Kekuatan	Konsisten dengan prioritas nasional, cepat	Dekat dengan kebutuhan lokal	Legitimasi tinggi, rasa memiliki
Kelemahan	Kurang peka terhadap kebutuhan lokal	Daftar keinginan panjang, sulit diprioritaskan	Memerlukan waktu, fasilitasi, dan kapasitas warga

Partisipasi juga memiliki tingkatan. Arnstein (bacaan pengayaan) menggambarkan sebagai tangga, mulai dari partisipasi semu (sekadar diberi tahu) hingga kendali warga. Musrenbang yang hanya mengesahkan daftar usulan yang sudah disiapkan aparat berada di anak tangga bawah, meskipun disebut partisipatif.

2.4.4 Konteks Kawasan Timur Indonesia

Kawasan Timur Indonesia memiliki ciri yang memengaruhi pilihan paradigma perencanaan: wilayah kepulauan dengan biaya transportasi tinggi, sebaran penduduk yang jarang di banyak daerah, keterbatasan infrastruktur dasar, ketergantungan fiskal daerah pada transfer pusat, keragaman budaya dan kelembagaan adat, serta keterbatasan data hingga tingkat desa.

- Program top-down berisiko tidak sesuai kondisi lokal, seperti kasus dermaga pada kotak pemantik.
- Pendekatan bottom-up memerlukan dukungan data dan fasilitasi agar usulan desa tidak sekadar daftar keinginan.
- Pendekatan partisipatif perlu menjangkau warga di pulau terluar, perempuan, dan kelompok adat yang sering tidak hadir dalam forum resmi.

■ 2.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN TANJUNG KARANG LAUT

Kementerian menetapkan desain standar rumah bantuan berbahan beton untuk seluruh daerah. Di Kabupaten Tanjung Karang Laut, biaya mengangkut semen ke pulau-pulau kecil hampir sama dengan biaya bangunannya, dan beberapa rumah tidak selesai. Di pulau lain, warga menolak desain beton karena rumah panggung kayu lebih sesuai dengan air pasang.

Pada tahun berikutnya, pemerintah kabupaten mengadakan musyawarah di setiap pulau bersama tokoh adat, kelompok perempuan, dan tukang lokal. Warga mengusulkan desain rumah panggung dengan bahan lokal bersertifikat, dan program dijalankan dengan pengawasan bersama.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Identifikasi paradigma perencanaan pada tahun pertama dan tahun kedua, beserta ciri-cirinya.

2. Bandingkan kekuatan dan kelemahan kedua pendekatan untuk konteks kabupaten kepulauan.
3. Menurut Anda, pada anak tangga partisipasi manakah musyawarah tahun kedua? Berikan alasan.

■ 2.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 1 — KONSEP DAN SEJARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak video kuliah pengantar (30–40 menit) tentang pengertian, sejarah, dan tiga paradigma perencanaan; membaca bab pengantar pustaka; merespons forum diskusi LMS.
Luring (tatap muka)	Curah pendapat tentang makna “pembangunan”; pemaparan konsep dasar; diskusi kelompok kecil (3–4 orang) membandingkan paradigma top-down dan partisipatif dengan lembar kerja, lalu presentasi lisan. Kuis identifikasi paradigma.
Penugasan dan luaran	Ringkasan reflektif individu 400–500 kata tentang satu program pembangunan di daerah asal di KTI dan paradigma yang dominan, disertai referensi (portofolio).
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 2 — PARADIGMA PERENCANAAN DAN KONTEKS KTI

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Membaca dua ringkasan kasus penerapan paradigma berbeda di KTI; merespons forum dengan analisis perbandingan dan menanggapi minimal dua respons rekan.
Luring (tatap muka)	Debat mini terstruktur: satu kelompok mempertahankan pendekatan top-down dan satu kelompok pendekatan partisipatif untuk daerah tertinggal; sintesis dosen; diskusi skenario konflik perencanaan antara pemerintah daerah dan desa.
Penugasan dan luaran	Esai analitik individu 600–800 kata tentang relevansi paradigma partisipatif di satu kabupaten/kota KTI, dengan minimal dua referensi (portofolio).
Proyek kelompok	Tahap 1: pembentukan kelompok (4–5 orang) , pemilihan lokus desa/kelurahan riil di KTI, dan pengumpulan dokumen resmi; lokus disetujui dosen paling lambat akhir minggu 2.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 2.7 Rangkuman

- Perencanaan pembangunan adalah proses berkelanjutan memilih cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan masa depan.
- Perencanaan di Indonesia berkembang dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru dengan Repelita, hingga Reformasi dengan UU 25/2004 tentang SPPN.
- UU 25/2004 memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas.
- Paradigma top-down, bottom-up, dan partisipatif berbeda dalam sumber inisiatif, aktor utama, dan mekanisme keputusan.
- Konteks KTI menuntut perencanaan yang peka terhadap kondisi kepulauan, keterbatasan infrastruktur, dan keragaman budaya.

■ 2.8 Latihan

LATIHAN UNIT 1

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Undang-undang yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
 - a. UU 23/2014
 - b. UU 25/2004
 - c. UU 6/2014
 - d. UU 17/2007
 - e. UU 25/2009
2. Repelita merupakan instrumen perencanaan pada masa
 - a. kolonial
 - b. Orde Lama
 - c. Orde Baru
 - d. Reformasi
 - e. pascapandemi
3. Perencanaan yang inisiatifnya berasal dari pusat dan diputuskan secara hierarkis disebut
 - a. bottom-up
 - b. partisipatif
 - c. top-down
 - d. deliberatif
 - e. kolaboratif
4. Kelemahan utama pendekatan bottom-up tanpa fasilitasi adalah
 - a. terlalu cepat
 - b. daftar usulan panjang yang sulit diprioritaskan

- c. tidak ada usulan
 - d. terlalu teknokratis
 - e. tidak memiliki legitimasi
5. Pendekatan dalam UU 25/2004 yang menekankan visi kepala daerah terpilih adalah pendekatan
- a. teknokratik
 - b. politik
 - c. partisipatif
 - d. bawah-atas
 - e. atas-bawah

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

- 6. Jelaskan pengertian perencanaan pembangunan menurut dua perspektif dan uraikan perkembangan perencanaan di Indonesia dari Orde Baru hingga Reformasi.
- 7. Bandingkan paradigma top-down, bottom-up, dan partisipatif pada tiga dimensi, lalu tentukan paradigma yang paling sesuai untuk satu kabupaten kepulauan di KTI.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 2.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 2.5 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	UU 25/2004 mengatur SPPN.
2	c	Repelita I–VI dilaksanakan pada masa Orde Baru.
3	c	Ciri tersebut merupakan paradigma top-down.
4	b	Agregasi usulan tanpa analisis cenderung menghasilkan daftar keinginan.
5	b	Pendekatan politik menerjemahkan visi-misi kepala daerah terpilih.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: definisi Conyers dan Hills serta UU 25/2004; Repelita dan GBHN, lalu SPPN, RPJPN, Musrenbang, dan UU Desa; perubahan ke arah desentralisasi dan partisipasi.

Tabel 2.6 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Dua pengertian	10
Urutan dan ciri periode	15
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: perbandingan sumber inisiatif, aktor, dan mekanisme; argumen berbasis kondisi kepulauan; pengakuan keterbatasan paradigma yang dipilih.

Tabel 2.7 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Perbandingan tiga dimensi	12
Argumen kontekstual	13
Jumlah	25

■ 2.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 2.4.2 dan 2.4.3 dan isi ulang Tabel 2.4 dengan contoh dari daerah Anda.
- Diskusikan studi kasus Tanjung Karang Laut di forum LMS.
- Konsultasikan pemilihan lokus proyek kelompok dengan dosen.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca bab awal Conyers dan Hills (1984) tentang pengertian perencanaan pembangunan dan bandingkan dengan UU 25/2004.
- Pelajari tangga partisipasi Arnstein (1969) dan nilai satu forum Musrenbang yang pernah Anda ikuti.

■ 2.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Paradigma perencanaan apa yang paling sering Anda lihat di daerah asal Anda?
2. Apa pengalaman Anda sendiri dengan forum perencanaan di desa atau kelurahan?
3. Mengapa kelompok Anda memilih lokus tersebut?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Nationalism — Memahami perencanaan sebagai upaya pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil.

Harmony — Menghargai argumen kelompok lain dalam debat paradigma.

Integrity — Memilih lokus proyek yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

■ 2.12 Referensi Unit

Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley & Sons.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (bacaan pengayaan)

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. (bacaan pengayaan)

BAB III · UNIT 2 · MINGGU 3–4

02

SISTEM DAN REGULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Hierarki dokumen perencanaan dari nasional hingga desa

Sub-CPMK2

CPL-03

Bobot 13%

■ 3.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK2

Menguraikan kerangka regulasi sistem perencanaan pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN, RKPD, Musrenbang) dan menghubungkan hierarki dokumen tersebut dengan mekanisme perencanaan di daerah.

Indikator: mahasiswa mampu

- Menguraikan landasan hukum sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia (UU 25/2004 dan turunannya) dengan menyebutkan substansi pokok setiap instrumen regulasi secara tepat
- Menjelaskan kedudukan, fungsi, dan muatan pokok RPJPN, RPJMN, dan RKPD dalam sistem perencanaan nasional secara berurutan dan sistematis
- Mendeskripsikan mekanisme Musrenbang sebagai forum partisipatif mulai dari tingkat desa hingga nasional beserta output dokumen yang dihasilkan pada setiap tingkatan
- Menghubungkan kerangka regulasi nasional dengan kewajiban penyusunan dokumen perencanaan di level pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017

Tabel 3.1 Kedudukan Sub-CPMK2 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK1 — menjelaskan konsep dasar, teori, dan paradigma perencanaan pembangunan (top-down, bottom-up, partisipatif) beserta kerangka regulasi perencanaan nasional (RPJPN, RPJMN, RKPD) dalam konteks pembangunan Indonesia bagian timur.
CPL yang didukung	CPL-03 (13%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	13% dari nilai akhir — Kuis Regulasi Perencanaan 6%, UTS 5%, dan UAS 2%
Estimasi waktu belajar	2 minggu × 510 menit = 1.020 menit (17 jam): PB 300 menit, PT 360 menit, KM 360 menit

■ 3.2 Pemantik

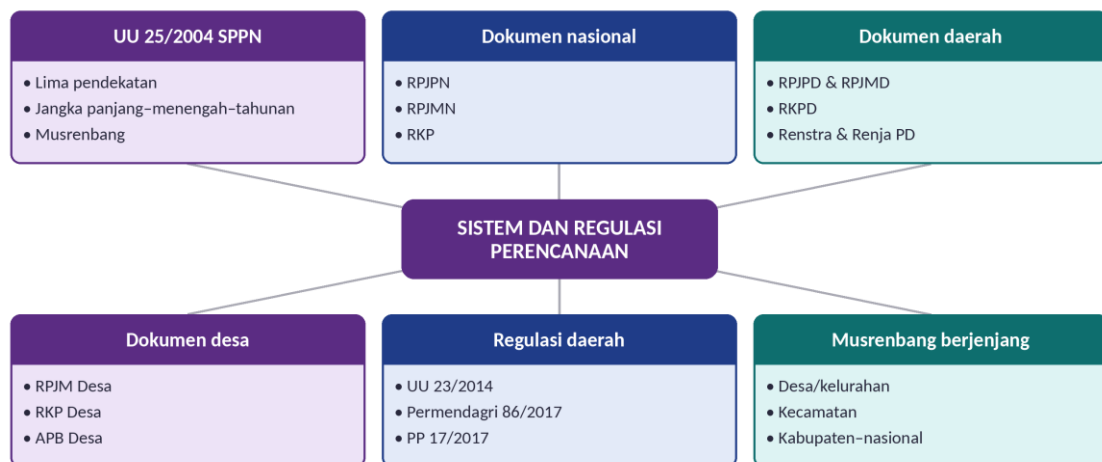
PEMANTIK

Seorang kepala desa bertanya kepada pendamping desa: “Usulan jalan tani kami sudah tiga tahun dimasukkan ke Musrenbang kecamatan, tetapi tidak pernah masuk anggaran kabupaten. Sebenarnya usulan kami hilang di mana?”

1. Melalui dokumen dan forum apa saja usulan dari desa seharusnya mengalir hingga menjadi program kabupaten?
2. Mengapa usulan yang sudah dibahas di Musrenbang belum tentu mendapat anggaran?

■ 3.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menunjukkan UU 25/2004 sebagai payung sistem perencanaan, dokumen nasional, daerah, dan desa, regulasi perencanaan daerah, serta Musrenbang berjenjang.



Gambar 3.1 Peta Konsep Unit 2

■ 3.4 Uraian Materi

3.4.1 Landasan Hukum Sistem Perencanaan

Tabel 3.2 Regulasi Pokok Sistem Perencanaan Pembangunan (hingga 2023)

Regulasi	Substansi pokok
UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Jenis dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan; tahapan perencanaan; Musrenbang
UU 17/2007 tentang RPJPN 2005–2025	Visi, misi, dan arah pembangunan nasional dua puluh tahun
Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020–2024	Prioritas pembangunan nasional lima tahun, termasuk arah pengembangan wilayah
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewajiban daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan nasional

Regulasi	Substansi pokok
PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional	Keselarsan dokumen perencanaan dan anggaran
Permendagri 86/2017	Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPd, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah
UU 6/2014 tentang Desa dan Permendagri 114/2014	Perencanaan pembangunan desa: RPJM Desa dan RKP Desa

3.4.2 Hierarki Dokumen Perencanaan

Tabel 3.3 Hierarki Dokumen Perencanaan Nasional, Daerah, dan Desa

Jangka	Nasional	Daerah	Desa
Panjang (20 tahun)	RPJPN (undang-undang)	RPJPD (peraturan daerah)	–
Menengah (5 tahun; desa 6 tahun)	RPJMN (peraturan presiden); Renstra K/L	RPJMD (peraturan daerah); Renstra Perangkat Daerah	RPJM Desa (peraturan desa)
Tahunan	RKP; Renja K/L	RKPD (peraturan kepala daerah); Renja Perangkat Daerah	RKP Desa; APB Desa

Jangka RPJM Desa mengikuti masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur pada 2023.

Keterkaitan antardokumen bersifat **vertikal** (dokumen yang lebih rendah mengacu pada dokumen di atasnya, misalnya RPJMD mengacu RPJPD dan memperhatikan RPJMN) dan **horizontal** (Renstra Perangkat Daerah menjabarkan RPJMD sesuai tugas dan fungsinya, lalu Renja menjabarkannya menjadi program tahunan). Keterkaitan ini akan dievaluasi secara mendalam pada Unit 7 dan Unit 8.

3.4.3 Muatan Pokok RPJMD, Renstra, dan Renja

Tabel 3.4 Muatan Pokok Dokumen Perencanaan Daerah

Dokumen	Muatan utama	Hal yang perlu dicermati
RPJMD	Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, indikator kinerja daerah, dan kerangka pendanaan	Kesesuaian dengan isu strategis dan visi kepala daerah
Renstra Perangkat Daerah	Tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi	Kesesuaian sasaran dan indikator dengan RPJMD
Renja Perangkat Daerah	Program, kegiatan, lokasi, target, dan pagu indikatif satu tahun	Kesesuaian target tahunan dengan Renstra
RKPD	Prioritas pembangunan dan rencana kerja pemerintah daerah satu tahun	Dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD

3.4.4 Musrenbang Berjenjang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan. Usulan warga mengalir melalui jenjang berikut.

Tabel 3.5 Alur Musrenbang dan Dokumen yang Dihasilkan

Jenjang	Peserta utama	Keluaran
Desa/kelurahan	Pemerintah desa/kelurahan, BPD, tokoh dan kelompok masyarakat	RKP Desa dan daftar usulan ke kecamatan (desa); usulan prioritas kelurahan
Kecamatan	Perwakilan desa/kelurahan, camat, perangkat daerah	Prioritas usulan kecamatan
Kabupaten/kota	Pemerintah daerah, DPRD, perwakilan kecamatan, pemangku kepentingan	Rancangan akhir RKPD
Provinsi dan nasional	Pemerintah provinsi dan pusat, perwakilan kabupaten/kota	RKPD provinsi dan RKP nasional

Usulan yang sudah dibahas belum tentu terdani karena dibatasi pagu anggaran, kesesuaian dengan prioritas daerah, kewenangan (misalnya jalan kabupaten atau jalan desa), dan kualitas data pendukung usulan. Sejak 2019, perencanaan dan penganggaran daerah juga dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri 70/2019, sehingga usulan dapat ditelusuri secara digital.

■ 3.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: USULAN JALAN TANI DESA WAI LESTARI

Selama tiga tahun, Musrenbang Desa Wai Lestari mengusulkan pembangunan jalan tani ke sentra kebun cengkih. Usulan diteruskan ke Musrenbang kecamatan, tetapi tidak masuk RKPD kabupaten. Setelah ditelusuri, jalan tersebut berstatus jalan desa sehingga menjadi kewenangan desa, sementara RPJM Desa tidak mencantumkannya sebagai prioritas.

Di sisi lain, RPJMD kabupaten menempatkan peningkatan produksi perkebunan sebagai prioritas, dan Renstra dinas pertanian memiliki program jalan produksi pertanian. Namun, dinas tidak pernah menerima data lokasi dan manfaat jalan tani dari desa.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Petakan dokumen dan forum yang dilalui usulan jalan tani, dari desa hingga kabupaten.
2. Identifikasi titik lemah dalam alur perencanaan yang menyebabkan usulan tidak terdani.
3. Rumuskan langkah yang dapat dilakukan desa agar usulan selaras dengan RPJMD dan Renstra dinas.

■ 3.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 3 — LANDASAN HUKUM DAN HIERARKI DOKUMEN PERENCANAAN

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak video (25–35 menit) tentang arsitektur regulasi perencanaan nasional; mengakses ringkasan eksekutif RPJMN dan contoh RKPD daerah di KTI melalui tautan resmi.
Luring (tatap muka)	Paparan kerangka regulasi dengan diagram hierarki dokumen; penjelasan Musrenbang bertingkat; latihan pemetaan regulasi berpasangan dengan lembar kerja; diskusi implikasi bagi daerah KTI yang kapasitas perencanaannya terbatas. Latihan pemetaan regulasi (diagram hierarki rumpang).
Penugasan dan luaran	Tabel pemetaan regulasi individu satu halaman untuk minimal lima dokumen dari RPJPN hingga RKPD (nama, dasar hukum, penyusun, periode, keterkaitan) (portofolio). Latihan pemetaan regulasi dinilai sebagai komponen Kuis Regulasi Perencanaan.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 4 — KETERKAITAN RPJMD, RENSTRA, DAN RENJA

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Mempelajari panduan analisis dokumen berdasarkan Permendagri 86/2017 dan contoh matriks; mengunduh satu pasang RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dari daerah KTI melalui SIPD atau situs resmi pemerintah daerah.
Luring (tatap muka)	Ulasan alur penyusunan RKPD dan titik rawan inkonsistensi; presentasi berpasangan (7–10 menit, maksimal 5 slide) tentang temuan analisis dokumen dengan umpan balik dosen. Analisis dokumen singkat berdasarkan kutipan RPJMD dan Renja.
Penugasan dan luaran	Laporan analisis dokumen berpasangan 700–900 kata tentang keterkaitan dan potensi inkonsistensi RPJMD–Renstra, dengan tautan dokumen (portofolio). Analisis dokumen singkat dinilai sebagai komponen Kuis Regulasi Perencanaan.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 3.7 Rangkuman

- UU 25/2004 menjadi payung sistem perencanaan pembangunan nasional dengan dokumen jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- Dokumen nasional meliputi RPJPN, RPJMN, dan RKP; dokumen daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah; dokumen desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa.
- Keterkaitan antardokumen bersifat vertikal dan horizontal.

- Permendagri 86/2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
- Musrenbang berjenjang menyalurkan usulan warga dari desa hingga nasional; pendanaan dibatasi pagu, prioritas, kewenangan, dan kualitas data.

■ 3.8 Latihan

LATIHAN UNIT 2

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka panjang 2005–2025 ditetapkan dengan
 - a. Perpres 18/2020
 - b. UU 17/2007
 - c. UU 25/2004
 - d. PP 17/2017
 - e. Permendagri 86/2017
2. RPJMD ditetapkan dengan
 - a. peraturan presiden
 - b. peraturan daerah
 - c. peraturan kepala daerah
 - d. peraturan desa
 - e. keputusan menteri
3. Dokumen tahunan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, dan pagu indikatif disebut
 - a. Renstra
 - b. Renja
 - c. RPJMD
 - d. RPJPD
 - e. RKP Desa
4. Keluaran Musrenbang kabupaten/kota adalah
 - a. RKP Desa
 - b. rancangan akhir RKPD
 - c. RPJMN
 - d. Renstra K/L
 - e. APB Desa
5. Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah diatur dalam
 - a. Permendagri 86/2017

- b. Permendagri 114/2014
- c. Perpres 18/2020
- d. UU 6/2014
- e. Permen PANRB 14/2017

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

- 6. Jelaskan hierarki dokumen perencanaan nasional, daerah, dan desa beserta jangka waktu dan bentuk penetapannya.
- 7. Jelaskan alur Musrenbang berjenjang dan analisis tiga penyebab usulan desa sering tidak terdani.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 3.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 3.6 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	RPJPN 2005–2025 ditetapkan dengan UU 17/2007.
2	b	RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah.
3	b	Renja Perangkat Daerah merupakan rencana kerja satu tahun.
4	b	Musrenbang kabupaten/kota menghasilkan bahan rancangan akhir RKPD.
5	a	Permendagri 86/2017 mengatur hal tersebut.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: RPJPN/RPJPD 20 tahun; RPJMN/RPJMD 5 tahun dan RPJM Desa; RKP/RKPD/RKP Desa tahunan; bentuk penetapan undang-undang, perpres, perda, perkara, perdes.

Tabel 3.7 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan hierarki	12
Jangka dan bentuk penetapan	13
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: jenjang desa hingga nasional beserta keluarannya; penyebab: pagu anggaran, ketidaksesuaian prioritas, kewenangan, kualitas data usulan.

Tabel 3.8 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Alur dan keluaran	12

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Analisis penyebab	13
Jumlah	25

■ 3.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 3.4.2 dan gambar ulang hierarki dokumen tanpa melihat modul.
- Telusuri RPJMD kabupaten/kota lokus proyek kelompok Anda dan catat visi, misi, dan prioritasnya.
- Diskusikan studi kasus Wai Lestari di forum LMS.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca bagian tahapan penyusunan RPJMD dalam Permendagri 86/2017.
- Telusuri SIPD atau situs pemerintah daerah lokus proyek untuk menemukan RKPD terbaru.

■ 3.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Dokumen perencanaan apa yang baru pertama kali Anda ketahui dalam unit ini?
2. Bagaimana dokumen daerah lokus proyek kelompok Anda berkaitan dengan kebutuhan desa?
3. Apa kendala Anda saat mencari dokumen perencanaan resmi?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Mengutip dokumen resmi secara lengkap dan tidak mengubah isinya.

Adaptability — Memahami bagaimana kerangka nasional diterapkan pada kondisi daerah yang beragam.

Service — Memahami jalur agar kebutuhan warga dapat masuk ke dokumen resmi.

■ 3.12 Referensi Unit

Bappenas. (2019). *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Kementerian PPN/Bappenas. (Tercantum dalam RPS; perlu diverifikasi.)

Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. Kemendagri.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (bacaan pengayaan)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025. (bacaan pengayaan)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (bacaan pengayaan)

BAB IV · UNIT 3 · MINGGU 5–6

03

ANALISIS KONDISI WILAYAH

Membaca data BPS dan potensi lokal untuk menemukan isu strategis

Sub-CPMK3

CPL-04

Bobot 13%

■ 4.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK3

Menganalisis kondisi wilayah daerah di KTI menggunakan analisis data sekunder BPS dan pemetaan potensi lokal untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan strategis.

Indikator: mahasiswa mampu

- Mengidentifikasi sumber-sumber data sekunder BPS yang relevan (Susenas, Podes, PDRB, IPM) untuk kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia
- Mengekstrak dan menyusun tabel profil wilayah berdasarkan indikator sosial, ekonomi, dan infrastruktur dari data BPS Online
- Membandingkan capaian indikator pembangunan antar-kabupaten di KTI dengan rata-rata nasional untuk menemukan kesenjangan
- Menilai akurasi dan keterbatasan data sekunder BPS yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan (nilai Integrity)

Tabel 4.1 Kedudukan Sub-CPMK3 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK2 — menganalisis kondisi wilayah dan isu pembangunan daerah menggunakan metode analisis situasi (SWOT, analisis data sekunder BPS, dan pemetaan potensi lokal) sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan.
CPL yang didukung	CPL-04 (13%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	13% dari nilai akhir — Tugas Analisis Wilayah 6%, UTS 6%, dan UAS 1%
Estimasi waktu belajar	2 minggu × 510 menit = 1.020 menit (17 jam): PB 300 menit, PT 360 menit, KM 360 menit

■ 4.2 Pemantik

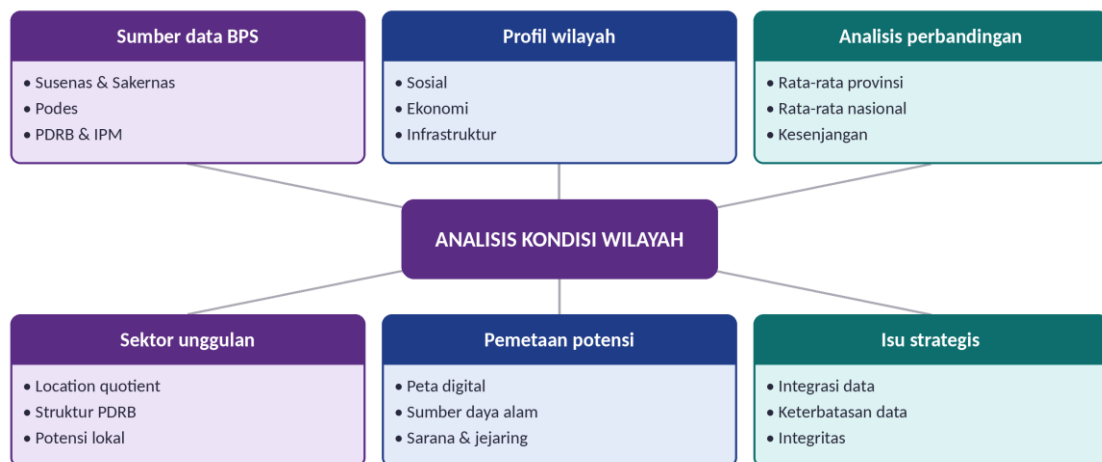
PEMANTIK

Dua kelompok mahasiswa mengkaji kabupaten yang sama. Kelompok pertama menyimpulkan bahwa kabupaten itu “maju” karena pertumbuhan ekonominya tinggi. Kelompok kedua menemukan bahwa pertumbuhan itu berasal dari satu tambang besar, sementara angka kemiskinan desa pesisir tetap tinggi dan akses air minum layak rendah.

1. Mengapa satu indikator tidak cukup untuk menilai kondisi wilayah?
2. Data apa saja yang perlu dikumpulkan agar gambaran wilayah lebih utuh?

■ 4.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menunjukkan sumber data BPS, dimensi profil wilayah, analisis perbandingan, sektor unggulan, pemetaan potensi, dan perumusan isu strategis.



Gambar 4.1 Peta Konsep Unit 3

■ 4.4 Uraian Materi

4.4.1 Sumber Data Sekunder untuk Perencanaan

Tabel 4.2 Sumber Data BPS yang Relevan untuk Analisis Wilayah

Sumber	Isi utama	Kegunaan dalam perencanaan
Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Konsumsi, pendidikan, kesehatan, perumahan rumah tangga	Kemiskinan, akses air minum dan sanitasi, partisipasi sekolah
Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional)	Ketenagakerjaan	Tingkat pengangguran terbuka, struktur lapangan kerja
Podes (Potensi Desa)	Sarana, prasarana, dan potensi setiap desa/kelurahan	Profil infrastruktur dan potensi hingga tingkat desa
PDRB	Nilai tambah ekonomi menurut lapangan usaha	Struktur dan pertumbuhan ekonomi, sektor unggulan

Sumber	Isi utama	Kegunaan dalam perencanaan
IPM	Indeks komposit umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup	Capaian pembangunan manusia
Kabupaten/Kecamatan Dalam Angka	Ringkasan statistik wilayah	Titik awal penyusunan profil wilayah

Data dapat diakses melalui situs BPS dan BPS kabupaten/kota. Dokumen perencanaan daerah dan data pembangunan lain juga dapat ditelusuri melalui SIPD dan situs resmi pemerintah daerah.

4.4.2 Menyusun Profil Wilayah

Profil wilayah disusun dari minimal sepuluh indikator yang mencakup tiga dimensi. Setiap indikator dicatat beserta tahun dan sumbernya.

Tabel 4.3 Contoh Indikator Profil Wilayah

Dimensi	Indikator	Satuan
Sosial	IPM, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin	Indeks, tahun, persen
Ekonomi	PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, struktur PDRB, tingkat pengangguran terbuka	Rupiah, persen
Infrastruktur	Rumah tangga dengan air minum layak, sanitasi layak, akses listrik, desa dengan jalan yang dapat dilalui sepanjang tahun	Persen, jumlah desa

4.4.3 Analisis Kesenjangan dan Sektor Unggulan

Indikator bermakna ketika dibandingkan. Bandingkan capaian kabupaten dengan rata-rata provinsi dan nasional, dengan kabupaten tetangga, serta dari waktu ke waktu. Kesenjangan yang besar dan bertahan menjadi calon isu strategis.

Untuk mengenali sektor unggulan, dapat digunakan **location quotient (LQ)**, yaitu perbandingan peran suatu sektor di kabupaten dengan perannya di wilayah acuan (misalnya provinsi): $LQ = (v_i/v_t) \div (V_i/V_t)$, dengan v_i dan v_t nilai sektor dan total PDRB kabupaten, serta V_i dan V_t nilai sektor dan total PDRB wilayah acuan (Rustiadi dkk., 2018). $LQ > 1$ menunjukkan sektor yang relatif terkonsentrasi atau berpotensi sebagai basis.

Tabel 4.4 Contoh Perhitungan Location Quotient (Data Ilustrasi)

Sektor	Pangsa di kabupaten	Pangsa di provinsi	LQ	Tafsiran
Perikanan	30%	15%	2,00	Basis
Perdagangan	15%	12%	1,25	Basis
Pertanian tanaman pangan	20%	25%	0,80	Nonbasis

4.4.4 Pemetaan Potensi Lokal dan Isu Strategis

Data statistik dilengkapi **peta potensi lokal** yang menampilkan sumber daya alam, sentra produksi, sarana pelayanan, jaringan transportasi, serta kawasan rawan bencana. Peta dapat dibuat di kertas plano lalu dipindahkan ke format digital seperti Google My Maps atau ArcGIS Online.

Isu strategis adalah kondisi yang penting, mendesak, berdampak luas, dan harus ditangani dalam periode perencanaan. Rumuskan isu dengan menghubungkan data statistik, potensi, dan permasalahan.

Tabel 4.5 Contoh Perumusan Isu Strategis dari Data

Temuan data	Potensi atau masalah	Isu strategis
LQ perikanan 2,00; kemiskinan desa pesisir di atas rata-rata provinsi	Hasil tangkapan dijual mentah; belum ada fasilitas pendingin	Rendahnya nilai tambah perikanan bagi nelayan kecil
Rumah tangga dengan air minum layak di bawah rata-rata nasional	Pulau kecil tanpa sumber air tawar	Keterbatasan akses air bersih di pulau-pulau kecil

4.4.5 Akurasi dan Keterbatasan Data

- Banyak indikator hanya tersedia sampai tingkat kabupaten, sehingga kondisi desa perlu dilengkapi data Podes dan data primer.
- Data memiliki jeda waktu; catat tahun data dan hindari mencampur tahun tanpa penjelasan.
- Perubahan metode (misalnya penghitungan IPM) membuat perbandingan antarwaktu perlu hati-hati.
- Nilai *Integrity* menuntut penyusun menyebut keterbatasan data secara terbuka dan tidak memilih data hanya yang mendukung kesimpulan tertentu.

■ 4.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: PROFIL WILAYAH KABUPATEN PESIRIS UTARA

Kabupaten Pesisir Utara mencatat laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi. Struktur PDRB menunjukkan pertambangan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar. Namun, persentase penduduk miskin di desa-desa pesisir lebih tinggi daripada rata-rata kabupaten, dan akses air minum layak di pulau-pulau kecil masih rendah.

Peta potensi yang disusun mahasiswa menunjukkan sentra rumput laut di tiga pulau, satu pelabuhan perikanan yang belum memiliki fasilitas pendingin, dan jalan penghubung desa yang rusak di musim hujan. Data Podes terakhir yang tersedia berasal dari beberapa tahun sebelumnya.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Susun tabel profil wilayah dengan minimal enam indikator dari tiga dimensi berdasarkan informasi kasus.

2. Mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menurunkan kemiskinan desa pesisir?
3. Rumuskan dua isu strategis dan jelaskan keterbatasan data yang harus disebutkan.

■ 4.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 5 — SUMBER DATA BPS DAN PROFIL WILAYAH

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak video navigasi BPS Online dan SIPD beserta panduan tertulis; mengunduh data BPS untuk kabupaten lokus; berdiskusi di forum “Tantangan Ketersediaan Data di KTI”. Kuis identifikasi data BPS (formatif).
Luring (tatap muka)	Penjelasan konsep profil wilayah dan jenis data BPS; demonstrasi mengakses dan mengunduh data; praktik navigasi dengan laptop; kelompok mulai mengisi templat tabel profil wilayah.
Penugasan dan luaran	Tabel profil wilayah kelompok (minimal 10 indikator dari tiga dimensi dengan sumber) dalam lembar kerja, disertai narasi interpretasi 300–400 kata.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 6 — PEMETAAN POTENSI LOKAL DAN ISU STRATEGIS

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Mempelajari tutorial pemetaan dengan Google Maps; melengkapi peta digital potensi lokal; konsultasi kelompok melalui konferensi video.
Luring (tatap muka)	Pemetaan potensi lokal secara visual di kertas plano dengan umpan balik dosen; kelompok memindahkan peta ke format digital dan mempresentasikan draf peta serta tiga isu strategis kepada kelompok lain.
Penugasan dan luaran	Laporan Profil Wilayah kelompok (tabel profil, peta potensi digital, dan laporan isu strategis 400–600 kata). Laporan ini dinilai sebagai komponen Tugas Analisis Wilayah.
Proyek kelompok	Tahap 2: Laporan Profil Wilayah dan peta potensi lokus proyek.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 4.7 Rangkuman

- Data BPS seperti Susenas, Sakernas, Podes, PDRB, dan IPM menjadi dasar analisis wilayah.
- Profil wilayah disusun dari minimal sepuluh indikator sosial, ekonomi, dan infrastruktur beserta sumber dan tahunnya.

- Indikator bermakna ketika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, nasional, wilayah tetangga, dan antarwaktu.
- Location quotient membantu mengenali sektor basis; peta potensi melengkapi data statistik.
- Isu strategis dirumuskan dari integrasi data, potensi, dan masalah, dengan menyebut keterbatasan data secara jujur.

■ 4.8 Latihan

LATIHAN UNIT 3

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Sumber data BPS yang memuat potensi dan sarana setiap desa adalah
 - a. Sakernas
 - b. Podes
 - c. PDRB
 - d. Susenas
 - e. Sensus Ekonomi
2. Indikator tingkat pengangguran terbuka bersumber terutama dari
 - a. Podes
 - b. Sakernas
 - c. PDRB
 - d. Susenas
 - e. IPM
3. Pangsa sektor di kabupaten 24% dan di provinsi 12%. Nilai LQ-nya adalah
 - a. 0,5
 - b. 1,0
 - c. 1,5
 - d. 2,0
 - e. 12
4. LQ sektor bernilai 0,8 berarti sektor tersebut
 - a. basis
 - b. nonbasis
 - c. tidak ada
 - d. paling unggul
 - e. tidak dapat ditafsirkan
5. Sikap yang sesuai nilai Integrity dalam menggunakan data sekunder adalah
 - a. memilih data yang mendukung kesimpulan saja
 - b. menyebut tahun, sumber, dan keterbatasan data

- c. mencampur tahun data tanpa penjelasan
- d. mengganti data yang kosong dengan perkiraan tanpa keterangan
- e. tidak mencantumkan sumber

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

6. Sebutkan lima sumber data BPS untuk analisis wilayah dan jelaskan kegunaannya dalam perencanaan.
7. Diberikan pangsa sektor di kabupaten dan provinsi: perikanan 25% dan 10%, pertanian 30% dan 30%, industri 5% dan 10%. Hitung LQ, tentukan sektor basis, lalu rumuskan satu isu strategis.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 4.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 4.6 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	Podes mendata potensi dan sarana hingga tingkat desa.
2	b	Sakernas mengukur ketenagakerjaan.
3	d	$LQ = 24\% \div 12\% = 2,0$.
4	b	$LQ < 1$ menunjukkan sektor nonbasis.
5	b	Transparansi sumber dan keterbatasan menjaga integritas analisis.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: Susenas, Sakernas, Podes, PDRB, IPM, atau publikasi Dalam Angka; kegunaan yang tepat untuk setiap sumber.

Tabel 4.7 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan sumber	10
Kegunaan dalam perencanaan	15
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: LQ perikanan 2,5 (basis), pertanian 1,0 (setara), industri 0,5 (nonbasis); isu strategis misalnya rendahnya pengolahan hasil perikanan.

Tabel 4.8 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Perhitungan LQ	12
Tafsiran	6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Isu strategis	7
Jumlah	25

■ 4.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Kerjakan ulang contoh perhitungan pada Tabel 4.4 dengan data kabupaten lokus kelompok Anda.
- Baca ulang subbab 4.4.5 tentang keterbatasan data.
- Konsultasikan tabel profil wilayah kelompok dengan dosen.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca bagian analisis wilayah dalam Rustiadi dkk. (2018) dan pelajari alat analisis lain seperti shift-share.
- Bandingkan data Podes dua periode untuk lokus kelompok Anda dan identifikasi perubahan penting.

■ 4.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Data apa yang paling sulit ditemukan untuk lokus kelompok Anda?
2. Isu strategis apa yang paling mengejutkan dari hasil analisis?
3. Bagaimana Anda memastikan interpretasi data tidak bias?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Menyebut sumber, tahun, dan keterbatasan data secara terbuka.

Nationalism — Memahami kesenjangan pembangunan KTI dibandingkan rata-rata nasional.

Creativity — Menyajikan data dan peta secara menarik dan mudah dipahami.

■ 4.12 Referensi Unit

Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley & Sons.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Badan Pusat Statistik. Data Potensi Desa (Podes) dan data sosial-ekonomi wilayah. BPS RI. (rujukan Rencana Tugas)

BAB V · UNIT 4 · MINGGU 7

04

ANALISIS SWOT DAN PERUMUSAN STRATEGI

Merumuskan alternatif strategi pembangunan yang berbasis bukti

Sub-CPMK4

CPL-04

Bobot 7%

■ 5.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK4

Menerapkan analisis SWOT secara sistematis terhadap kondisi wilayah daerah KTI untuk merumuskan alternatif strategi pembangunan yang berbasis bukti.

Indikator: mahasiswa mampu

- Menyusun matriks SWOT wilayah KTI yang secara sistematis mengintegrasikan data BPS (Minggu 5) dan peta potensi lokal (Minggu 6) sebagai dasar pengisian tiap kuadran
- Menganalisis interaksi antar-faktor SWOT (SO, ST, WO, WT) untuk menghasilkan alternatif strategi pembangunan yang berbasis bukti, bukan opini
- Mengevaluasi relevansi dan kepraktisan setiap alternatif strategi terhadap kondisi riil wilayah tertinggal di KTI dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah
- Merancang matriks strategi prioritas yang menghubungkan alternatif strategi SWOT dengan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi pada Minggu 6
- Mempertahankan argumen strategi secara akuntabel dalam forum diskusi kelas sebagai wujud nilai Integrity dan Creativity

Tabel 5.1 Kedudukan Sub-CPMK4 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK2 — menganalisis kondisi wilayah dan isu pembangunan daerah menggunakan metode analisis situasi (SWOT, analisis data sekunder BPS, dan pemetaan potensi lokal) sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan.
CPL yang didukung	CPL-04 (7%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	7% dari nilai akhir — Tugas Analisis Wilayah 4% dan UTS 3%
Estimasi waktu belajar	1 minggu × 510 menit (8,5 jam): PB 150 menit, PT 180 menit, KM 180 menit

■ 5.2 Pemantik

PEMANTIK

Dalam sebuah rapat, peserta menuliskan kekuatan desa: “masyarakat ramah”, “alam indah”, dan “kepala desa berpengalaman”. Kelemahannya: “kurang dana”. Peluangnya: “pariwisata”. Ancamannya: “perubahan zaman”. Strategi yang dirumuskan: “mengembangkan pariwisata”.

1. Apa kelemahan analisis SWOT seperti ini?
2. Bagaimana agar setiap faktor SWOT didukung bukti?

■ 5.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menunjukkan faktor internal dan eksternal, matriks strategi, prinsip berbasis bukti, kriteria prioritas, dan integritas dalam analisis SWOT.



Gambar 5.1 Peta Konsep Unit 4

■ 5.4 Uraian Materi

5.4.1 SWOT dalam Perencanaan Wilayah

Analisis SWOT memetakan **kekuatan** (*strengths*) dan **kelemahan** (*weaknesses*) sebagai faktor internal, serta **peluang** (*opportunities*) dan **ancaman** (*threats*) sebagai faktor eksternal. Dalam perencanaan wilayah, faktor internal adalah kondisi di dalam wilayah yang relatif dapat dikendalikan pemerintah daerah atau desa, sedangkan faktor eksternal adalah kondisi di luar kendali langsung, seperti kebijakan nasional, harga komoditas, perubahan iklim, atau investasi dari luar.

Tabel 5.2 Contoh Faktor SWOT Berbasis Data (Kabupaten Kepulauan Ilustratif)

Faktor	Pernyataan berbasis bukti	Sumber
Kekuatan	Sektor perikanan merupakan sektor basis (LQ 2,00)	PDRB kabupaten dan provinsi
Kelemahan	Rumah tangga dengan air minum layak di bawah rata-rata nasional	Susenas

Faktor	Pernyataan berbasis bukti	Sumber
Peluang	Program nasional pengembangan kawasan perikanan terpadu	RPJMN 2020–2024
Ancaman	Gelombang tinggi musiman mengganggu distribusi hasil laut	Data iklim dan catatan pelabuhan

5.4.2 Matriks Strategi

Setelah faktor dipetakan, strategi dirumuskan dari interaksi antarfaktor dalam matriks yang juga dikenal sebagai matriks TOWS (bacaan pengayaan: Weihrich).

Tabel 5.3 Empat Jenis Strategi dari Interaksi Faktor SWOT

Strategi	Logika	Contoh
SO	Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang	Mengembangkan sentra pengolahan ikan melalui program kawasan perikanan nasional
ST	Menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman	Membangun fasilitas pendingin agar hasil tangkapan dapat disimpan saat gelombang tinggi
WO	Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan	Mengusulkan penampungan air hujan dalam program nasional air minum
WT	Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman	Menetapkan jadwal distribusi dan cadangan air saat musim gelombang

5.4.3 Prinsip Berbasis Bukti

1. **Setiap faktor menyebut data:** angka, sumber, dan tahun, bukan kesan umum seperti “alam indah”.
2. **Hindari tumpang tindih:** satu kondisi tidak ditempatkan sekaligus sebagai kekuatan dan peluang.
3. **Batasi jumlah:** minimal empat faktor per kuadran yang paling berpengaruh.
4. **Hubungkan dengan isu strategis** dari minggu 6.
5. **Strategi harus operasional:** dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan.

5.4.4 Menentukan Strategi Prioritas

Tidak semua strategi dapat dilaksanakan sekaligus, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Strategi dipilih dengan kriteria yang transparan.

Tabel 5.4 Contoh Matriks Prioritas Strategi (Skor 1–3)

Strategi	Relevansi dengan isu	Kelayakan fiskal	Dampak bagi warga	Total
SO: sentra pengolahan ikan	3	2	3	8
ST: fasilitas pendingin	3	2	3	8
WO: penampungan air hujan	3	3	3	9
WT: jadwal distribusi air	2	3	2	7

Data ilustrasi. Kriteria dan skor disepakati kelompok dan dijelaskan alasannya.

■ 5.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: SWOT DESA PANTAI HARAPAN

Desa Pantai Harapan memiliki 60% rumah tangga nelayan, kelompok perempuan pengolah ikan asin, dan pantai berpasir putih yang mulai dikunjungi wisatawan. Data Podes menunjukkan desa belum memiliki fasilitas air bersih perpipaan, dan jalan ke ibu kota kecamatan rusak di musim hujan.

Pemerintah kabupaten memasukkan pengembangan wisata bahari dalam RPJMD. Di sisi lain, harga ikan di tingkat nelayan sangat berfluktuasi, dan abrasi pantai meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Susun matriks SWOT dengan minimal tiga faktor per kuadran berdasarkan informasi kasus.
2. Rumuskan satu strategi untuk masing-masing SO, ST, WO, dan WT.
3. Tentukan strategi prioritas dengan tiga kriteria dan jelaskan alasan pemberian skor.

■ 5.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 7 — MATRIKS SWOT DAN STRATEGI BERBASIS BUKTI

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Mempelajari modul analisis SWOT untuk perencanaan wilayah dan contoh matriks kabupaten di KTI; asistensi tanya-jawab asinkron; kelompok mulai mengisi matriks. Kuis klasifikasi faktor SWOT (formatif).
Luring (tatap muka)	Penjelasan prosedur sistematis pengisian matriks SWOT berbasis data dan perumusan strategi; kelompok mempresentasikan draf matriks dalam poster kertas plano; setiap kelompok lain mengajukan satu pertanyaan kritis berbasis data; diskusi pleno mempertajam strategi.
Penugasan dan luaran	Matriks SWOT kelompok (empat kuadran, masing-masing minimal empat faktor berbasis data), matriks strategi (SO, ST, WO, WT masing-masing minimal dua alternatif), dan narasi prioritas strategi 500–700 kata. Luran ini dinilai sebagai komponen Tugas Analisis Wilayah.
Proyek kelompok	Tahap 3: Matriks SWOT dan narasi strategi lokus proyek.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 5.7 Rangkuman

- SWOT memetakan faktor internal (kekuatan, kelemahan) dan eksternal (peluang, ancaman) wilayah.
- Strategi dirumuskan dari interaksi faktor: SO, ST, WO, dan WT.
- Setiap faktor harus didukung data dengan sumber dan tahun, bukan kesan umum.
- Strategi prioritas dipilih dengan kriteria transparan seperti relevansi, kelayakan fiskal, dan dampak.
- Hasil SWOT menjadi jembatan menuju perencanaan partisipatif dan penyusunan program.

■ 5.8 Latihan

LATIHAN UNIT 4

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan sektor di daerah termasuk faktor
 - a. kekuatan
 - b. kelemahan
 - c. peluang
 - d. ancaman
 - e. internal
2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman disebut
 - a. SO
 - b. ST
 - c. WO
 - d. WT
 - e. OT
3. Pernyataan faktor SWOT yang paling berbasis bukti adalah
 - a. alam indah
 - b. masyarakat ramah
 - c. sektor perikanan memiliki LQ 2,00
 - d. kurang dana
 - e. perubahan zaman
4. Rendahnya akses air minum layak di wilayah perencanaan termasuk faktor
 - a. kekuatan
 - b. kelemahan
 - c. peluang
 - d. ancaman
 - e. eksternal

5. Kriteria yang tepat untuk memilih strategi prioritas di daerah berfiskal terbatas antara lain
- popularitas kepala daerah
 - kelayakan fiskal dan dampak bagi warga
 - jumlah kata dalam strategi
 - kemudahan membuat slide
 - kesamaan dengan daerah lain

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

- Jelaskan perbedaan faktor internal dan eksternal dalam SWOT perencanaan wilayah beserta dua contoh berbasis data untuk masing-masing.
- Berdasarkan kasus Desa Pantai Harapan, rumuskan empat strategi (SO, ST, WO, WT) dan tentukan prioritasnya dengan kriteria yang jelas.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 5.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 5.5 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	c	Kebijakan nasional berada di luar kendali daerah dan bersifat menguntungkan.
2	b	ST memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman.
3	c	Pernyataan tersebut didukung angka dan dapat diverifikasi.
4	b	Kondisi internal yang merugikan termasuk kelemahan.
5	b	Prioritas mempertimbangkan kemampuan anggaran dan manfaat.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: internal dapat dikendalikan daerah (kekuatan, kelemahan); eksternal di luar kendali (peluang, ancaman); contoh disertai data dan sumber.

Tabel 5.6 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan konsep	10
Kualitas contoh berbasis data	15
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: strategi logis dari interaksi faktor; kriteria prioritas eksplisit; argumen yang mempertimbangkan kapasitas desa.

Tabel 5.7 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Empat strategi	12
Kriteria dan penentuan prioritas	13
Jumlah	25

■ 5.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Periksa ulang setiap faktor SWOT kelompok Anda: apakah sudah menyebut data, sumber, dan tahun?
- Kerjakan ulang studi kasus Desa Pantai Harapan.
- Tinjau rangkuman Unit 1–4 sebagai persiapan UTS.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca Weihrich (1982) tentang matriks TOWS dan bandingkan dengan praktik SWOT dalam dokumen RPJMD.
- Telusuri bagian analisis isu strategis dalam RPJMD kabupaten lokus kelompok Anda.

■ 5.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Faktor SWOT apa yang paling sulit didukung data?
2. Apakah strategi prioritas kelompok Anda realistis bagi kapasitas daerah?
3. Materi Unit 1–4 mana yang perlu Anda perkuat sebelum UTS?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Jujur mengakui kelemahan wilayah dan tidak melebih-lebihkan kekuatan.

Creativity — Merumuskan strategi inovatif yang sesuai kapasitas lokal.

Adaptability — Menyesuaikan strategi dengan keterbatasan fiskal dan kondisi geografis.

■ 5.12 Referensi Unit

Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley & Sons.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix: A Tool for Situational Analysis. *Long Range Planning*, 15(2), 54–66. (bacaan pengayaan)

PERSIAPAN UTS (MINGGU 8)

UTS berbobot 20% dari nilai akhir dan mengukur Sub-CPMK1 (6%), Sub-CPMK2 (5%), Sub-CPMK3 (6%), dan Sub-CPMK4 (3%). Skor naskah proporsional dengan bobot tersebut (30 : 25 : 30 : 15).

- **Bentuk (RPS):** ujian tertulis berisi pertanyaan konseptual (paradigma perencanaan, hierarki regulasi), analisis data (interpretasi tabel BPS sederhana), dan penerapan SWOT pada skenario wilayah KTI.
- **Aturan:** GenAI dilarang kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen; bawa kalkulator bila diizinkan.
- **Strategi:** tinjau rangkuman Unit 1–4, latih membaca tabel BPS dan menghitung LQ, serta gunakan hasil analisis wilayah kelompok sebagai contoh.

BAB VI · UNIT 5 · MINGGU 9–10

05

PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN
SIMULASI MUSRENBANG*Menggali kebutuhan warga secara jujur dan inklusif*

Sub-CPMK5

CPL-05

Bobot 13%

■ 6.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK5

Melaksanakan proses identifikasi masalah dan kebutuhan pembangunan tingkat desa/kelurahan secara partisipatif melalui simulasi Musrenbang dan pengumpulan data primer masyarakat lokal KTI.

Indikator: mahasiswa mampu

- Menjalankan peran sebagai fasilitator atau peserta simulasi Musrenbang desa/kelurahan sesuai mekanisme partisipatif yang berlaku
- Mengidentifikasi minimal lima masalah pembangunan konkret dari skenario kasus desa/kelurahan di KTI melalui teknik diskusi terarah (FGD mini)
- Mengumpulkan data primer kebutuhan masyarakat menggunakan panduan wawancara terstruktur yang telah disusun sebelumnya
- Membedakan kebutuhan normatif, kebutuhan yang dirasakan, dan kebutuhan yang dinyatakan oleh masyarakat dalam konteks desa/kelurahan KTI
- Menampilkan sikap service dan harmony dalam proses fasilitasi dengan menghormati suara kelompok marjinal (perempuan, lansia, penyandang disabilitas)

Tabel 6.1 Kedudukan Sub-CPMK5 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK3 — menyusun dokumen perencanaan pembangunan partisipatif tingkat desa/kelurahan yang memuat identifikasi masalah, prioritas program, indikator kinerja terukur, dan rencana anggaran berbasis kebutuhan masyarakat lokal Kawasan Timur Indonesia.
CPL yang didukung	CPL-05 (13%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	13% dari nilai akhir — UTS 3% dan Proyek 10% (panduan FGD, notulen, matriks kebutuhan, dan pohon masalah kelompok)
Estimasi waktu belajar	2 minggu × 510 menit = 1.020 menit (17 jam): PB 300 menit, PT 360 menit, KM 360 menit

■ 6.2 Pemantik

PEMANTIK

Dalam sebuah Musrenbang desa, kepala desa membuka forum dengan berkata, “Kita semua sudah tahu kebutuhan desa: jalan dan lampu jalan.” Beberapa perempuan yang datang untuk mengusulkan air bersih untuk posyandu hanya duduk diam di belakang, dan usulan mereka tidak sempat disampaikan.

1. Apakah forum tersebut benar-benar partisipatif? Mengapa?
2. Bagaimana seharusnya fasilitator memastikan semua suara didengar?

■ 6.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menghubungkan prinsip partisipasi, peran dalam simulasi, teknik FGD, jenis kebutuhan, pohon masalah, dan etika pengumpulan data primer.



Gambar 6.1 Peta Konsep Unit 5

■ 6.4 Uraian Materi

6.4.1 Prinsip Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif bukan sekadar mengundang warga hadir, melainkan memastikan mereka dapat memengaruhi keputusan. Prinsip pokoknya meliputi **inklusi** kelompok yang biasanya tersisih (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat), **kesetaraan suara** dalam forum, **transparansi** proses dan hasil, dan **akuntabilitas** atas usulan yang diterima maupun ditolak.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang menegaskan pelibatan kelompok rentan dalam musyawarah desa (tercantum dalam RPS; substansi rinci pedoman ini perlu diverifikasi lebih lanjut).

6.4.2 Peran dalam Simulasi Musrenbang

Tabel 6.2 Peran Pemangku Kepentingan dalam Simulasi Musrenbang

Peran	Kepentingan yang dibawa	Contoh sikap dalam simulasi
Kepala desa/lurah	Prioritas program dan keterbatasan anggaran	Menjelaskan pagu dana desa dan program yang sudah berjalan
BPD/tokoh masyarakat	Pengawasan dan aspirasi warga	Menanyakan dasar usulan dan keterwakilan dusun
Kelompok perempuan	Kebutuhan kesehatan, pendidikan anak, dan ekonomi rumah tangga	Mengusulkan posyandu dan air bersih
Pemuda	Lapangan kerja dan sarana olahraga/kreativitas	Mengusulkan pelatihan keterampilan
Pelaku usaha lokal	Infrastruktur produksi dan pasar	Mengusulkan jalan produksi atau tempat pelelangan
Fasilitator	Kelancaran dan keadilan proses	Memastikan setiap kelompok mendapat giliran bicara

Fasilitator yang baik menggunakan pertanyaan terbuka, memberi waktu bicara yang adil, dan secara aktif meminta pendapat peserta yang diam, bukan hanya menunggu yang berani bicara.

6.4.3 Teknik Diskusi Terarah dan Prioritisasi

Tabel 6.3 Teknik FGD Mini dan Prioritisasi

Teknik	Cara kerja	Kegunaan
Diskusi kelompok terarah (FGD) mini	Kelompok kecil membahas pertanyaan terbuka dengan fasilitator	Menggali masalah dan kebutuhan secara mendalam
Dot voting	Peserta menempelkan stiker atau tanda pada usulan yang dianggap prioritas	Memprioritaskan usulan secara cepat dan visual
Pairwise ranking	Membandingkan dua usulan secara berpasangan untuk menentukan yang lebih penting	Menyusun peringkat ketika banyak usulan bersaing
Pohon masalah (<i>problem tree</i>)	Memetakan sebab, masalah inti, dan akibat secara bertingkat	Menemukan akar masalah, bukan hanya gejala

6.4.4 Jenis Kebutuhan Masyarakat

Tabel 6.4 Tiga Jenis Kebutuhan dalam Perencanaan Partisipatif

Jenis kebutuhan	Pengertian	Contoh
Normatif	Ditetapkan oleh standar atau ahli, terlepas dari pendapat warga	Standar pelayanan minimal air bersih menurut regulasi
Dirasakan (<i>felt need</i>)	Disadari warga tetapi belum tentu diungkapkan	Warga merasa air sumur payau, tetapi tidak pernah mengusulkan perbaikan
Dinyatakan (<i>expressed need</i>)	Diungkapkan secara terbuka, misalnya melalui usulan Musrenbang	Usulan tertulis pembangunan sumur bor dalam Musrenbang

Kebutuhan yang dinyatakan dalam forum belum tentu mencerminkan seluruh kebutuhan yang dirasakan, terutama bagi kelompok yang jarang berbicara di forum resmi. Karena itu, wawancara dan observasi tambahan tetap diperlukan untuk melengkapi gambaran.

6.4.5 Menyusun dan Menggunakan Panduan Wawancara

1. Susun 5–8 pertanyaan terbuka yang menggali masalah, penyebab, dan harapan warga, bukan pertanyaan tertutup ya/tidak.
2. Uji coba panduan kepada satu atau dua orang sebelum digunakan.
3. Jelaskan tujuan wawancara dan minta persetujuan sebelum memulai.
4. Catat kata-kata narasumber apa adanya, pisahkan dari tafsiran pewawancara.
5. Simpan catatan lapangan dan identitas narasumber secara rahasia sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

■ 6.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: SIMULASI MUSRENBANG DESA KARANG WANGI

Dalam simulasi Musrenbang Desa Karang Wangi, kepala desa membuka forum dengan menyebut jalan dan lampu jalan sebagai kebutuhan utama. Seorang kader posyandu ingin menyampaikan usulan air bersih untuk kegiatan posyandu, tetapi giliran bicara hanya diberikan kepada tokoh laki-laki. Fasilitator dari kelompok mahasiswa menyadari hal ini pada pertengahan sesi.

Setelah fasilitator secara aktif meminta pendapat kelompok perempuan dan lansia, muncul beberapa masalah baru: sumur yang mengering di musim kemarau, jarak posyandu yang jauh, dan ketiadaan tempat berteduh di pasar desa. Pohon masalah yang disusun kelompok menunjukkan bahwa akar masalah air bersih adalah belum adanya sumber air alternatif yang dikelola bersama.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Identifikasi minimal lima masalah pembangunan dari kasus ini.
2. Klasifikasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam kebutuhan normatif, dirasakan, dan dinyatakan.
3. Bagaimana fasilitator seharusnya bertindak sejak awal forum agar suara kelompok perempuan tidak tertunda?
4. Susun kerangka pohon masalah sederhana untuk masalah air bersih berdasarkan informasi kasus.

■ 6.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 9 — PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN SIMULASI MUSRENBANG

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Mengunduh skenario kasus desa/kelurahan KTI (termasuk data BPS setempat) dan panduan teknis fasilitasi; menyusun draf panduan wawancara terstruktur secara mandiri; mengikuti forum tanya jawab pra-simulasi.
Luring (tatap muka)	Briefing peran simulasi (15 menit); pelaksanaan simulasi Musrenbang dengan peran kepala desa, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan perangkat desa; praktik FGD mini menggunakan kertas plano; debriefing reflektif.
Penugasan dan luaran	Panduan wawancara terstruktur (5–8 pertanyaan terbuka) dan catatan lapangan hasil identifikasi masalah dari simulasi (minimal 2 halaman). Luaran ini bersifat formatif.
Proyek kelompok	Tahap 4: panduan FGD/wawancara dan catatan simulasi Musrenbang lokus proyek.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 10 — PRIORITISASI KEBUTUHAN DAN POHON MASALAH

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Mengunduh templat pohon masalah dan matriks kebutuhan; menyimak tutorial dot voting dan pairwise ranking; mengisi draf awal pohon masalah.
Luring (tatap muka)	Sesi prioritas masalah dengan teknik dot voting; presentasi pohon masalah dengan format <i>gallery walk</i> (5 menit per kelompok) dan umpan balik dosen; diskusi pleno keterkaitan masalah lokal dengan RPJMD. Kuis lisan/tertulis tentang jenis kebutuhan (formatif).
Penugasan dan luaran	Matriks kebutuhan pembangunan dan pohon masalah untuk dua masalah prioritas teratas (format tabel dan diagram, maksimal 4 halaman). Luaran ini dinilai sebagai komponen Proyek untuk Sub-CPMK5.
Proyek kelompok	Tahap 4: notulen, daftar hadir, matriks kebutuhan, dan pohon masalah lokus proyek.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 6.7 Rangkuman

- Perencanaan partisipatif menuntut inklusi, kesetaraan suara, transparansi, dan akuntabilitas, bukan sekadar kehadiran warga.
- Peran dalam Musrenbang meliputi kepala desa, BPD, kelompok perempuan, pemuda, pelaku usaha, dan fasilitator.
- Teknik FGD mini, dot voting, pairwise ranking, dan pohon masalah membantu menggali dan memprioritaskan kebutuhan.

- Kebutuhan dibedakan menjadi normatif, dirasakan, dan dinyatakan; kebutuhan yang dinyatakan dalam forum belum tentu mewakili seluruh kebutuhan yang dirasakan.
- Panduan wawancara yang baik terdiri atas pertanyaan terbuka dan dilaksanakan dengan persetujuan serta kerahasiaan data narasumber.

■ 6.8 Latihan

LATIHAN UNIT 5

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Prinsip perencanaan partisipatif yang memastikan kelompok rentan turut didengar disebut
 - a. efisiensi
 - b. inklusi
 - c. sentralisasi
 - d. standarisasi
 - e. otomatisasi
2. Teknik menempelkan stiker pada usulan prioritas disebut
 - a. pairwise ranking
 - b. dot voting
 - c. brainstorming
 - d. FGD
 - e. benchmarking
3. Kebutuhan yang disadari warga tetapi belum tentu diungkapkan disebut kebutuhan
 - a. normatif
 - b. dirasakan
 - c. dinyatakan
 - d. laten
 - e. formal
4. Alat yang memetakan sebab, masalah inti, dan akibat secara bertingkat adalah
 - a. SWOT
 - b. pohon masalah
 - c. LQ
 - d. SMART
 - e. matriks TOWS
5. Ketika hanya tokoh laki-laki diberi giliran bicara dalam Musrenbang, prinsip yang dilanggar adalah
 - a. efisiensi

- b. kesetaraan suara
- c. standardisasi
- d. legalitas
- e. akuntabilitas anggaran

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

6. Jelaskan tiga jenis kebutuhan dalam perencanaan partisipatif dan mengapa kebutuhan yang dinyatakan saja tidak cukup untuk dasar perencanaan.
7. Berdasarkan kasus Desa Karang Wangi, susun pohon masalah untuk isu air bersih dan rumuskan dua langkah fasilitasi yang lebih inklusif.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 6.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 6.5 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	Inklusi menjamin kelompok rentan turut bersuara.
2	b	Dot voting adalah teknik pemungutan suara visual sederhana.
3	b	Felt need adalah kebutuhan yang dirasakan.
4	b	Pohon masalah memetakan hubungan sebab-akibat.
5	b	Pembatasan giliran bicara melanggar kesetaraan suara.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: definisi normatif, dirasakan, dinyatakan; argumen bahwa kelompok tertentu jarang menyatakan kebutuhannya di forum, sehingga perlu penggalan tambahan.

Tabel 6.6 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan tiga jenis kebutuhan	12
Argumen keterbatasan kebutuhan dinyatakan	13
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: pohon masalah dengan sebab, masalah inti, dan akibat yang logis; langkah fasilitasi seperti mengalokasikan giliran bicara dan bertanya langsung kepada kelompok yang diam.

Tabel 6.7 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Kualitas pohon masalah	15
Langkah fasilitasi inklusif	10
Jumlah	25

■ 6.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 6.4.3 dan 6.4.4, lalu latihan menyusun pohon masalah untuk satu isu di lingkungan Anda.
- Diskusikan kasus Karang Wangi di forum LMS.
- Tinjau kembali panduan wawancara kelompok Anda: apakah pertanyaannya terbuka dan tidak mengarahkan?

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca pedoman umum pembangunan desa dari Kementerian Desa PDTT tentang pelibatan kelompok rentan.
- Pelajari teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*) sebagai pelengkap FGD dan pohon masalah.

■ 6.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Bagaimana peran Anda dalam simulasi Musrenbang, dan apa yang Anda pelajari darinya?
2. Suara siapa yang paling sulit didengar dalam simulasi kelompok Anda?
3. Apakah data primer yang dikumpulkan kelompok Anda sudah mewakili kebutuhan yang beragam?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Service — Mengutamakan suara warga, termasuk yang jarang didengar.

Harmony — Memfasilitasi forum yang menghargai semua peserta.

Integrity — Mencatat kebutuhan warga apa adanya tanpa mengarahkan jawaban.

■ 6.12 Referensi Unit

Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley & Sons.

Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*. Kemendagri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kemendes PDTT. (Substansi rinci perlu diverifikasi.)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (bacaan pengayaan)

Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969. (bacaan pengayaan)

BAB VII · UNIT 6 · MINGGU 11–12

06 MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DESA/KELURAHAN

Dari pohon masalah menjadi program, indikator SMART, dan anggaran

Sub-CPMK6

CPL-05

Bobot 13%

■ 7.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK6

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan partisipatif tingkat desa/kelurahan yang memuat prioritas program, indikator kinerja terukur (SMART), dan rencana anggaran berbasis kebutuhan masyarakat KTI.

Indikator: mahasiswa mampu

- Merumuskan minimal tiga program pembangunan prioritas desa/kelurahan yang diturunkan langsung dari pohon masalah dan matriks kebutuhan yang disusun pada minggu ke-10
- Menyusun indikator kinerja SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk setiap program prioritas dengan menetapkan nilai baseline dan target terukur
- Merancang struktur anggaran indikatif per program menggunakan format Musrenbang yang mengacu pada komponen belanja yang relevan
- Mengaitkan program yang dirancang dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD kabupaten/kota atau RPJMDes yang berlaku
- Menerapkan prinsip integrity dalam penyusunan indikator dan anggaran dengan memastikan tidak ada target yang digelembungkan atau data yang dimanipulasi

Tabel 7.1 Kedudukan Sub-CPMK6 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK3 — menyusun dokumen perencanaan pembangunan partisipatif tingkat desa/kelurahan yang memuat identifikasi masalah, prioritas program, indikator kinerja terukur, dan rencana anggaran berbasis kebutuhan masyarakat lokal Kawasan Timur Indonesia.
CPL yang didukung	CPL-05 (13%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	13% dari nilai akhir — UTS 3% dan Proyek 10% (dokumen perencanaan partisipatif kelompok)

Unsur	Keterangan
Estimasi waktu belajar	2 minggu × 510 menit = 1.020 menit (17 jam): PB 300 menit, PT 360 menit, KM 360 menit

■ 7.2 Pemantik

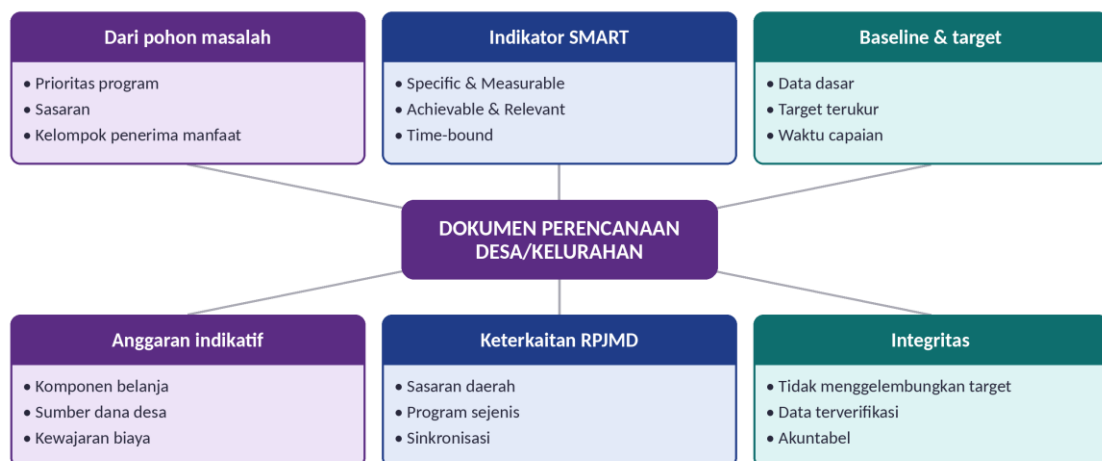
PEMANTIK

Sebuah dokumen rencana desa menulis: “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.” Tidak ada angka, tidak ada target, dan tidak ada waktu. Setahun kemudian, tidak ada yang bisa memastikan apakah program itu berhasil atau tidak.

1. Apa yang membuat pernyataan tersebut sulit dievaluasi?
2. Bagaimana seharusnya program itu dirumuskan agar dapat diukur keberhasilannya?

■ 7.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menunjukkan alur dari pohon masalah menuju program prioritas, indikator SMART, baseline dan target, anggaran indikatif, keterkaitan dengan RPJMD, dan integritas penyusunan.



Gambar 7.1 Peta Konsep Unit 6

■ 7.4 Uraian Materi

7.4.1 Dari Pohon Masalah ke Program Prioritas

Program yang baik menjawab akar masalah, bukan hanya gejala. Jika akar masalah air bersih adalah “belum ada sumber air alternatif yang dikelola bersama”, programnya adalah pembangunan dan pengelolaan sumber air tersebut, bukan sekadar “sosialisasi hemat air”.

Tabel 7.2 Contoh Penurunan Program dari Pohon Masalah

Masalah inti	Akar masalah	Program prioritas
Sumur mengering di musim kemarau	Belum ada sumber air alternatif yang dikelola bersama	Pembangunan penampungan air hujan komunal dan pengelolaan bersama
Jarak posyandu jauh dari beberapa dusun	Posyandu hanya ada di pusat desa	Posyandu keliling ke dusun terjauh
Hasil kebun sulit dijual dengan harga layak	Belum ada tempat pengumpulan hasil bersama	Pembangunan lumbung/gudang hasil tani desa

Batasi program prioritas menjadi minimal tiga yang paling mendesak dan realistis untuk kapasitas desa, sesuai hasil prioritisasi pada Unit 5.

7.4.2 Indikator Kinerja SMART

Tabel 7.3 Kriteria SMART untuk Indikator Kinerja

Kriteria	Pengertian	Contoh perbaikan
Specific	Jelas, tidak ambigu	“Meningkatkan kesejahteraan” → “Menyediakan air bersih bagi 40 rumah tangga dusun Timur”
Measurable	Dapat diukur dengan angka atau status yang jelas	Jumlah rumah tangga terlayani air bersih
Achievable	Realistis dengan sumber daya dan waktu yang ada	Target sesuai kapasitas anggaran desa, bukan target ambisius tanpa dasar
Relevant	Terkait langsung dengan masalah dan sasaran RPJMD/RPJMDes	Program air bersih terkait sasaran penurunan angka stunting
Time-bound	Memiliki batas waktu pencapaian	Tercapai pada akhir tahun anggaran berjalan

Tabel 7.4 Contoh Indikator SMART dengan Baseline dan Target

Program	Indikator	Baseline	Target
Penampungan air hujan komunal	Jumlah rumah tangga dengan akses air bersih	40 dari 120 rumah tangga (33%)	90 dari 120 rumah tangga (75%) pada akhir tahun
Posyandu keliling	Jumlah kunjungan balita ke posyandu per bulan	20 balita per bulan	45 balita per bulan dalam 6 bulan

7.4.3 Menyusun Anggaran Indikatif

Anggaran indikatif memperkirakan biaya setiap program berdasarkan komponen belanja yang relevan, tanpa perlu serinci dokumen anggaran resmi. Bagi desa, anggaran mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber antara lain dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan pendapatan asli desa.

Tabel 7.5 Contoh Struktur Anggaran Indikatif per Program

Komponen belanja	Uraian	Volume	Perkiraan biaya (Rp)
Bahan/material	Pipa, semen, bak penampung	1 paket	45.000.000
Upah kerja	Tenaga kerja masyarakat (padat karya)	20 orang × 15 hari	15.000.000
Operasional	Sewa alat, transportasi	1 paket	5.000.000
Jumlah			65.000.000

Data ilustrasi. Sumber dana dan satuan biaya perlu disesuaikan dengan standar biaya daerah setempat.

Nilai *Integrity* menuntut anggaran realistis: tidak menggelembungkan volume atau harga, dan menyebutkan sumber dana yang masuk akal bagi desa.

7.4.4 Mengaitkan Program dengan RPJMD/RPJMDes

Setiap program sebaiknya ditautkan dengan sasaran RPJMD kabupaten/kota (misalnya penurunan stunting, peningkatan akses air minum layak) atau RPJMDes yang berlaku, agar dokumen desa memiliki peluang lebih besar untuk didukung anggaran daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi konsistensi pada Unit 7 dan Unit 8.

Tabel 7.6 Struktur Dokumen Perencanaan Partisipatif (Maksimal 15 Halaman)

Bagian	Isi
Profil desa/kelurahan	Gambaran umum, data BPS dan Podes ringkas
Proses partisipatif	Ringkasan simulasi Musrenbang, metode FGD, dan pohon masalah
Analisis SWOT ringkas	Rangkuman dari Unit 4
Program prioritas	Minimal tiga program dengan latar belakang masalah
Indikator kinerja SMART	Baseline dan target setiap program
Rencana anggaran indikatif	Komponen belanja dan perkiraan biaya per program
Keterkaitan dengan RPJMD/RPJMDes	Sasaran daerah yang didukung
Lampiran	Notulen Musrenbang, daftar hadir, dan instrumen data primer

■ 7.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: DRAF RENCANA DESA TIRTA MANDIRI

Kelompok mahasiswa menyusun draf program “Meningkatkan akses air bersih masyarakat Desa Tirta Mandiri” tanpa angka baseline maupun target. Anggaran ditulis “sesuai kebutuhan”. Saat ditanya dosen, kelompok menjawab bahwa mereka “yakin” program ini akan berhasil karena sudah dibahas dalam Musrenbang.

Setelah revisi, kelompok menambahkan data bahwa baru 33% rumah tangga memiliki akses air bersih, menargetkan 75% pada akhir tahun melalui pembangunan penampungan air hujan komunal, dan menyusun anggaran indikatif dengan tiga komponen belanja utama.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Identifikasi kelemahan draf pertama dari sudut kriteria SMART.
2. Nilailah perbaikan pada draf kedua: apakah sudah memenuhi SMART dan prinsip integritas anggaran?
3. Kaitkan program air bersih ini dengan satu sasaran RPJMD yang mungkin relevan.

■ 7.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 11 — PRIORITAS PROGRAM DAN INDIKATOR SMART

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Mengunduh templat tabel program–indikator–anggaran dan contoh pengisian dari RPJMDes daerah KTI; menelaah tautan dokumen RPJMD/RPJMDDes untuk referensi.
Luring (tatap muka)	Penjelasan singkat teknik indikator SMART dan struktur anggaran indikatif; workshop kelompok terbimbing dengan konsultasi langsung dosen (10 menit per kelompok) untuk meninjau draf tabel program dan indikator.
Penugasan dan luaran	Draf awal tabel program prioritas (minimal tiga program dengan indikator SMART) dan rencana anggaran indikatif per program (maksimal 5 halaman).
Proyek kelompok	Tahap 5: draf tabel program, indikator, dan anggaran lokus proyek.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

MINGGU 12 — RENCANA ANGGARAN DAN DOKUMEN FINAL

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Meninjau komentar dosen pada draf yang diunggah; mempelajari rubrik penilaian dokumen dan presentasi; menelaah contoh dokumen RPJMDes daerah KTI sebagai pembanding.
Luring (tatap muka)	Presentasi simulasi format sidang Musrenbang kecamatan (dosen dan dua mahasiswa terpilih sebagai tim penilai); setiap kelompok mempresentasikan dokumen perencanaan (maksimal 15 menit) dan menjawab pertanyaan; umpan balik terstruktur.
Penugasan dan luaran	Dokumen perencanaan pembangunan partisipatif final (format Word/PDF, maksimal 15 halaman di luar lampiran) disertai bahan presentasi advokasi (maksimal 15 slide). Dokumen ini dinilai sebagai komponen Proyek untuk Sub-CPMK6.
Proyek kelompok	Tahap 5: dokumen perencanaan partisipatif lokus proyek.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 7.7 Rangkuman

- Program prioritas diturunkan langsung dari akar masalah pada pohon masalah, bukan dari gejala semata.
- Indikator kinerja yang baik memenuhi kriteria SMART: spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.
- Anggaran indikatif disusun per komponen belanja secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Program sebaiknya dikaitkan dengan sasaran RPJMD/RPJMDes agar selaras dengan prioritas daerah.
- Dokumen perencanaan partisipatif mengintegrasikan profil wilayah, proses partisipatif, SWOT, program, indikator, dan anggaran.

■ 7.8 Latihan

LATIHAN UNIT 6

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

- Indikator kinerja yang memiliki batas waktu pencapaian memenuhi kriteria
 - Specific
 - Measurable
 - Achievable
 - Relevant
 - Time-bound
- Nilai kondisi awal sebelum program dilaksanakan disebut

- a. target
 - b. baseline
 - c. output
 - d. outcome
 - e. pagu
3. Sumber utama pembiayaan program di tingkat desa yang diatur khusus dalam UU Desa adalah
- a. APBN langsung
 - b. Dana Desa
 - c. DAK fisik
 - d. hibah luar negeri
 - e. CSR perusahaan
4. Program yang menjawab akar masalah, bukan gejala, dianggap lebih baik karena
- a. lebih murah
 - b. lebih cepat selesai
 - c. menyelesaikan masalah secara lebih mendasar
 - d. lebih mudah dipresentasikan
 - e. tidak memerlukan data
5. Anggaran program yang ditulis “sesuai kebutuhan” tanpa rincian melanggar prinsip
- a. efisiensi
 - b. transparansi dan integritas
 - c. partisipasi
 - d. legalitas
 - e. keberlanjutan

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

6. Jelaskan lima kriteria SMART dan perbaiki pernyataan “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa” menjadi indikator yang memenuhi SMART.
7. Susun satu program prioritas lengkap dengan indikator SMART, baseline, target, dan anggaran indikatif untuk masalah yang teridentifikasi di lokus proyek kelompok Anda.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 7.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 7.7 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	e	Time-bound menuntut batas waktu yang jelas.

No	Kunci	Pembahasan
2	b	Baseline adalah kondisi awal sebelum intervensi.
3	b	Dana Desa merupakan sumber utama APB Desa.
4	c	Menjawab akar masalah memberikan penyelesaian yang lebih mendasar.
5	b	Anggaran yang tidak rinci sulit diverifikasi dan melanggar transparansi.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: lima kriteria dijelaskan tepat; indikator baru menyebut sasaran spesifik, angka, dan waktu.

Tabel 7.8 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan lima kriteria	15
Kualitas indikator baru	10
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: program yang menjawab akar masalah; indikator SMART lengkap; anggaran indikatif dengan komponen belanja yang realistis.

Tabel 7.9 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Kesesuaian dengan akar masalah	8
Indikator SMART	10
Anggaran indikatif	7
Jumlah	25

■ 7.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 7.4.2 dan revisi indikator kelompok Anda agar memenuhi kelima kriteria SMART.
- Kerjakan ulang studi kasus Desa Tirta Mandiri.
- Konsultasikan draf anggaran indikatif dengan dosen sebelum dokumen final disusun.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca pedoman penyusunan RPJMDes dari Kemendes PDTT dan bandingkan strukturnya dengan dokumen kelompok Anda.

- Telusuri satu APB Desa yang dipublikasikan dan bandingkan komponen belanjanya dengan anggaran indikatif kelompok Anda.

■ 7.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Indikator mana yang paling sulit dibuat terukur, dan mengapa?
2. Apakah anggaran kelompok Anda realistis untuk kapasitas desa yang dikaji?
3. Bagaimana kontribusi Anda dalam penyusunan dokumen kelompok?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Menyusun indikator dan anggaran yang jujur, tidak dikelembungkan.

Service — Memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Adaptability — Menyesuaikan target dengan kapasitas anggaran desa yang nyata.

■ 7.12 Referensi Unit

Bappenas. (2019). *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Kementerian PPN/Bappenas. (Perlu diverifikasi.)

Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*. Kemendagri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kemendes PDTT. (Substansi rinci perlu diverifikasi.)

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36. (bacaan pengayaan)

BAB VIII · UNIT 7 · MINGGU 13

07

KONSISTENSI ANTARDOKUMEN:
RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS*Menelusuri rantai RPJMD–Renstra–Renja secara sistematis*

Sub-CPMK7

CPL-07

Bobot 7%

■ 8.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK7

Mengevaluasi konsistensi vertikal dan horizontal antardokumen perencanaan daerah (RPJMD–Renstra SKPD–Renja SKPD) menggunakan kriteria relevansi dan efektivitas berdasarkan dokumen perencanaan resmi yang tersedia.

Indikator: mahasiswa mampu

- Mengidentifikasi rantai konsistensi vertikal dari RPJMD ke Renstra SKPD ke Renja SKPD pada dokumen perencanaan daerah yang dikaji
- Menganalisis kesesuaian horizontal antar-Renstra SKPD yang berpotongan sasaran pembangunan pada dokumen yang sama
- Menerapkan kriteria relevansi untuk menilai ketepatan indikator program dalam dokumen Renstra SKPD terhadap sasaran RPJMD induknya
- Menerapkan kriteria efektivitas untuk menilai ketercapaian target kinerja dalam dokumen Renja SKPD terhadap Renstra SKPD-nya
- Memetakan celah konsistensi antardokumen secara sistematis menggunakan matriks evaluasi yang disusun sendiri

Tabel 8.1 Kedudukan Sub-CPMK7 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK4 — mengevaluasi kesesuaian dan konsistensi antardokumen rencana pembangunan (RPJMD–Renstra–Renja) menggunakan kriteria relevansi, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan berbasis bukti.
CPL yang didukung	CPL-07 (7%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	7% dari nilai akhir — UAS 4% dan Proyek 3% (matriks konsistensi kelompok)
Estimasi waktu belajar	Bagian dari 1 minggu bersama Unit 8 (minggu 13), 510 menit (8,5 jam): PB 150 menit, PT 180 menit, KM 180 menit

■ 8.2 Pemantik

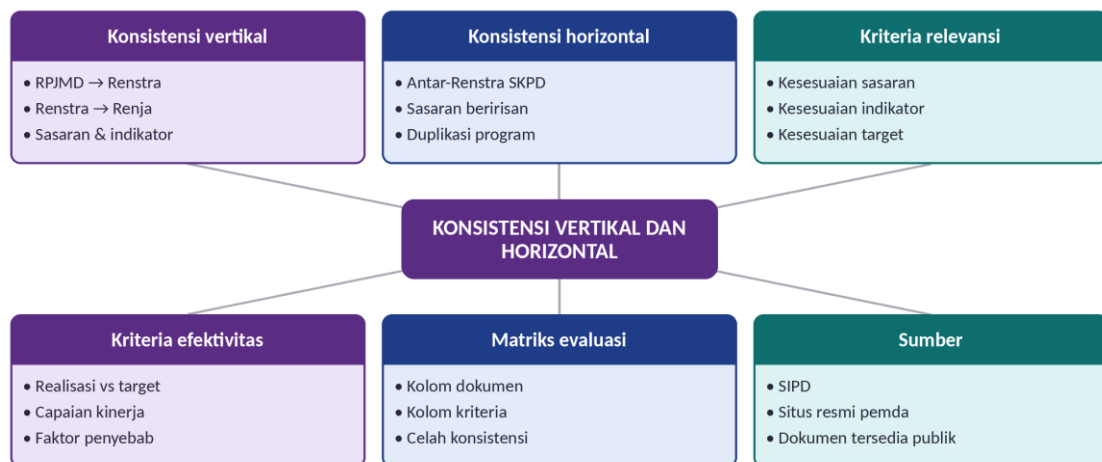
PEMANTIK

RPJMD sebuah kabupaten menetapkan sasaran “meningkatnya produktivitas pertanian” dengan indikator kenaikan produksi padi. Renstra dinas pertanian justru memuat indikator “jumlah pelatihan yang dilaksanakan”, tanpa menyebut target produksi sama sekali. Renja tahunan hanya melaporkan jumlah pelatihan terlaksana, yang semuanya “100% tercapai”.

1. Apakah rantai dokumen ini konsisten? Di mana letak masalahnya?
2. Mengapa laporan “100% tercapai” tidak berarti sasaran RPJMD tercapai?

■ 8.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menunjukkan konsistensi vertikal RPJMD ke Renstra ke Renja, konsistensi horizontal antar-Renstra, kriteria relevansi dan efektivitas, matriks evaluasi, dan sumber dokumen.



Gambar 8.1 Peta Konsep Unit 7

■ 8.4 Uraian Materi

8.4.1 Konsistensi Vertikal

Konsistensi vertikal menilai apakah dokumen turunan benar-benar menjabarkan dokumen induknya. Rantai idealnya: **RPJMD** menetapkan sasaran dan indikator daerah → **Renstra Perangkat Daerah** menjabarkan menjadi tujuan, sasaran, dan indikator perangkat daerah yang selaras → **Renja Perangkat Daerah** menjabarkan menjadi program, kegiatan, dan target tahunan yang selaras dengan Renstra.

Tabel 8.2 Contoh Pemeriksaan Konsistensi Vertikal

Dokumen	Isi yang diperiksa	Pertanyaan konsistensi
RPJMD	Sasaran: meningkatnya produktivitas pertanian; indikator: produksi padi (ton)	Apa sasaran dan indikator daerah?

Dokumen	Isi yang diperiksa	Pertanyaan konsistensi
Renstra Dinas Pertanian	Tujuan, sasaran, dan indikator dinas	Apakah sasaran dan indikator dinas menjabarkan indikator produksi RPJMD, atau justru berganti indikator lain?
Renja Dinas Pertanian	Program, kegiatan, dan target tahunan	Apakah target tahunan mengarah pada pencapaian indikator Renstra?

Ketidakkonsistenan sering terjadi ketika Renstra atau Renja menggunakan indikator **proses** (jumlah kegiatan, jumlah peserta pelatihan) sebagai pengganti indikator **hasil** yang seharusnya diukur di RPJMD, sehingga laporan capaian selalu tinggi tanpa mencerminkan hasil nyata.

8.4.2 Konsistensi Horizontal

Konsistensi horizontal menilai keselarasan antar-Renstra perangkat daerah yang sasarannya beririsan. Misalnya, sasaran penurunan stunting biasanya melibatkan dinas kesehatan, dinas pertanian (ketahanan pangan), dinas PU (air bersih dan sanitasi), dan dinas sosial. Bila indikator dan target antar-dinas tidak saling melengkapi atau bahkan tumpang tindih pada kelompok sasaran yang sama, upaya menjadi tidak efisien dan sulit dievaluasi secara terpadu.

8.4.3 Kriteria Relevansi dan Efektivitas

Tabel 8.3 Kriteria Evaluasi Konsistensi Antardokumen

Kriteria	Pertanyaan evaluasi	Contoh temuan
Relevansi	Apakah indikator dan program dalam Renstra/Renja benar-benar mendukung sasaran RPJMD?	Renstra memuat indikator “jumlah pelatihan” yang tidak secara langsung mendukung sasaran “produktivitas pertanian”
Efektivitas	Apakah target kinerja dalam Renja tercapai dan berkontribusi pada sasaran Renstra?	Realisasi 100% pelatihan, tetapi produksi padi daerah tidak naik

Kriteria efisiensi dan keberlanjutan dibahas pada Unit 8, menggunakan matriks yang sama sebagai kelanjutan analisis konsistensi.

8.4.4 Menyusun Matriks Evaluasi Konsistensi

Tabel 8.4 Contoh Matriks Evaluasi Konsistensi (Data Ilustrasi)

Sasaran/indikator RPJMD	Sasaran/indikator Renstra	Target/realisasi Renja	Relevansi	Efektivitas
Meningkatnya produktivitas pertanian; produksi padi naik 5%	Jumlah pelatihan petani (tidak ada indikator produksi)	12 pelatihan terlaksana (100%)	Rendah — indikator tidak menjabarkan sasaran RPJMD	Tidak dapat dinilai — tidak ada data produksi

Kelompok menyusun minimal tiga baris menggunakan dokumen nyata daerah lokus proyek.

1. **Kumpulkan** RPJMD, minimal satu Renstra, dan Renja terkait dari daerah yang sama melalui SIPD atau situs resmi pemerintah daerah.
2. **Salin** sasaran dan indikator dari setiap dokumen ke dalam matriks.

3. **Nilai relevansi:** apakah indikator turunan benar-benar menjabarkan indikator induk?
4. **Nilai efektivitas:** bandingkan target dengan realisasi, dan periksa apakah capaian mencerminkan kemajuan sasaran yang sebenarnya.
5. **Catat celah** yang ditemukan sebagai bahan rekomendasi pada Unit 8.

■ 8.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: RANTAI DOKUMEN KABUPATEN TERANG BULAN

RPJMD Kabupaten Terang Bulan menetapkan sasaran “meningkatnya akses air minum layak” dengan indikator persentase rumah tangga berakses air minum layak, target naik dari 65% menjadi 80% dalam lima tahun. Renstra dinas pekerjaan umum menjabarkannya menjadi sasaran “tersedianya infrastruktur air minum” dengan indikator jumlah unit sarana air minum terbangun.

Renja tahunan melaporkan 15 unit sarana terbangun (100% dari target 15 unit), tetapi tidak ada data terbaru tentang persentase rumah tangga berakses air minum layak. Sementara itu, Renstra dinas kesehatan juga memiliki program air minum dan sanitasi dengan sasaran serupa, tetapi kedua dinas belum pernah berkoordinasi mengenai lokasi sasaran.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Susun matriks evaluasi konsistensi vertikal untuk rantai RPJMD–Renstra PU–Renja PU.
2. Nilailah relevansi indikator Renstra terhadap sasaran RPJMD.
3. Nilailah efektivitas berdasarkan data yang tersedia, dan jelaskan mengapa “100% tercapai” tidak cukup meyakinkan.
4. Identifikasi masalah konsistensi horizontal antara dinas PU dan dinas kesehatan.

■ 8.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 13 — KONSISTENSI VERTIKAL DAN HORIZONTAL

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Menyimak video (15–20 menit) tentang kerangka evaluasi konsistensi vertikal dan horizontal; mengunduh contoh matriks evaluasi dan dokumen RPJMD–Renstra–Renja dari SIPD.
Luring (tatap muka)	Analisis kasus terbimbing menggunakan dokumen nyata; demonstrasi pengisian matriks evaluasi baris demi baris; kelompok kecil (3–4 orang) mengisi matriks pada kertas plano dan mempresentasikan temuan. Kuis berbasis kutipan tiga dokumen (formatif).
Penugasan dan luaran	Matriks evaluasi konsistensi antardokumen (dimensi vertikal dan horizontal) untuk minimal tiga dokumen nyata satu daerah KTI, disertai narasi analisis 500–700 kata. Matriks ini dinilai sebagai komponen Proyek untuk Sub-CPMK7, digabung dengan Unit 8 pada minggu yang sama.
Proyek kelompok	Tahap 6 (bagian 1): matriks konsistensi vertikal dan horizontal dokumen daerah terhadap dokumen desa/kelurahan lokus proyek.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 8.7 Rangkuman

- Konsistensi vertikal menilai apakah Renstra dan Renja menjabarkan sasaran dan indikator RPJMD secara konsisten.
- Konsistensi horizontal menilai keselarasan antar-Renstra perangkat daerah yang sarasannya beririsan.
- Indikator proses yang menggantikan indikator hasil sering menjadi sumber ketidakkonsistenan.
- Kriteria relevansi menilai ketepatan indikator turunan; kriteria efektivitas menilai ketercapaian target yang bermakna.
- Matriks evaluasi konsistensi disusun dari dokumen nyata dan menjadi dasar rekomendasi pada Unit 8.

■ 8.8 Latihan**LATIHAN UNIT 7**

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

1. Penilaian apakah Renstra menjabarkan sasaran RPJMD secara konsisten disebut konsistensi
 - a. horizontal
 - b. vertikal
 - c. internal
 - d. eksternal
 - e. temporal

2. Dua dinas memiliki program serupa untuk sasaran yang sama tanpa koordinasi. Ini adalah masalah konsistensi
 - a. vertikal
 - b. horizontal
 - c. temporal
 - d. anggaran
 - e. hukum
3. Renstra yang menggunakan “jumlah pelatihan” sebagai pengganti indikator produksi RPJMD menunjukkan masalah
 - a. efisiensi
 - b. relevansi rendah
 - c. keberlanjutan
 - d. legalitas
 - e. transparansi
4. Realisasi 100% dari target keluaran belum tentu efektif karena
 - a. targetnya terlalu kecil
 - b. keluaran belum tentu mencerminkan hasil yang diinginkan
 - c. anggaran terlalu besar
 - d. waktu terlalu singkat
 - e. data tidak lengkap
5. Sumber dokumen resmi daerah yang dapat ditelusuri secara digital untuk evaluasi konsistensi adalah
 - a. SIPD
 - b. BPS Online
 - c. Google Maps
 - d. SP4N-LAPOR!
 - e. e-Musrenbang saja

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

6. Jelaskan perbedaan konsistensi vertikal dan horizontal, lalu berikan satu contoh masalah untuk masing-masing.
7. Berdasarkan kasus Kabupaten Terang Bulan, susun matriks evaluasi tiga baris dan nilai relevansi serta efektivitasnya.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 8.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 8.5 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	Konsistensi vertikal menilai hubungan dokumen induk dan turunannya.
2	b	Keselaran antar-Renstra yang beririsan termasuk konsistensi horizontal.
3	b	Indikator turunan tidak menjabarkan sasaran induk sehingga relevansinya rendah.
4	b	Efektivitas menilai kontribusi nyata terhadap sasaran, bukan sekadar keluaran.
5	a	SIPD menjadi rujukan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: vertikal: dokumen turunan vs induk; horizontal: antar-Renstra yang beririsan; contoh yang relevan untuk setiap jenis.

Tabel 8.6 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan konsep	12
Contoh masalah	13
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: matriks memuat sasaran RPJMD, indikator Renstra, target/realisasi Renja; penilaian relevansi dan efektivitas yang berargumen.

Tabel 8.7 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Kelengkapan matriks	12
Ketepatan penilaian relevansi dan efektivitas	13
Jumlah	25

■ 8.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 8.4.1 dan 8.4.3, lalu latihan membedakan indikator proses dan indikator hasil.
- Kerjakan ulang studi kasus Kabupaten Terang Bulan.
- Periksa apakah matriks kelompok Anda sudah menyertakan dimensi horizontal.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Telusuri satu RPJMD dan Renstra daerah KTI di SIPD, lalu identifikasi satu contoh nyata konsistensi vertikal yang baik.
- Baca bagian evaluasi rancangan Perda RPJMD dalam Permendagri 86/2017.

■ 8.11 Refleksi dan Nilai ICBSA-N**REFLEKSI**

1. Celah konsistensi apa yang paling mengejutkan dari dokumen yang Anda telaah?
2. Mengapa evaluasi seperti ini penting bagi warga, bukan hanya bagi pemerintah?
3. Bagaimana temuan Unit 7 akan memengaruhi rekomendasi kelompok Anda di Unit 8?

NILAI ICBSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Menilai dokumen resmi secara jujur, termasuk mengakui ketika data tidak memadai untuk menyimpulkan.

Service — Menyadari bahwa evaluasi konsistensi berdampak pada kualitas layanan bagi warga.

Nationalism — Peduli terhadap efektivitas pembangunan bagi daerah di Kawasan Timur Indonesia.

■ 8.12 Referensi Unit

Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*. Kemendagri.

Bappenas. (2019). *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Kementerian PPN/Bappenas. (Perlu diverifikasi.)

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. (bacaan pengayaan)

BAB IX · UNIT 8 · MINGGU 13

08

EFISIENSI, KEBERLANJUTAN, DAN REKOMENDASI

Menilai nilai uang dan daya tahan program, lalu menyusun policy brief

Sub-CPMK8

CPL-07

Bobot 7%

■ 9.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK8

Mengevaluasi kesesuaian antardokumen rencana pembangunan menggunakan kriteria efisiensi dan keberlanjutan serta menyusun rekomendasi perbaikan berbasis bukti yang berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan KTI.

Indikator: mahasiswa mampu

- Menganalisis efisiensi alokasi anggaran program dalam dokumen Renja SKPD terhadap capaian indikator kinerja yang ditetapkan
- Mengevaluasi dimensi keberlanjutan program pembangunan dalam dokumen perencanaan daerah KTI menggunakan indikator lingkungan, sosial, dan ekonomi
- Menyusun rekomendasi perbaikan antardokumen perencanaan yang berbasis bukti dokumen resmi dan berorientasi kepentingan publik
- Mengintegrasikan nilai Integrity dalam penyusunan rekomendasi dengan memastikan seluruh klaim didasarkan pada data dan dokumen yang dapat diverifikasi
- Mempresentasikan temuan evaluasi dan rekomendasi secara argumentatif kepada pemangku kepentingan simulasi

Tabel 9.1 Kedudukan Sub-CPMK8 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK4 — mengevaluasi kesesuaian dan konsistensi antardokumen rencana pembangunan (RPJMD–Renstra–Renja) menggunakan kriteria relevansi, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan berbasis bukti.
CPL yang didukung	CPL-07 (7%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	7% dari nilai akhir — UAS 4% dan Proyek 3% (policy brief kelompok)
Estimasi waktu belajar	Bagian dari 1 minggu bersama Unit 7 (minggu 13), 510 menit (8,5 jam): PB 150 menit, PT 180 menit, KM 180 menit

■ 9.2 Pemantik

PEMANTIK

Sebuah program pembangunan jalan usaha tani menghabiskan anggaran dua kali lipat dari standar biaya karena material didatangkan dari pulau lain. Setahun kemudian, jalan itu rusak karena tidak ada anggaran pemeliharaan dan warga tidak dilibatkan dalam perawatannya.

1. Apakah program ini efisien? Apakah berkelanjutan? Jelaskan perbedaan kedua pertanyaan itu.
2. Rekomendasi apa yang dapat mencegah masalah serupa terulang?

■ 9.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menunjukkan analisis efisiensi, tiga dimensi keberlanjutan, penyusunan policy brief, dan integritas rekomendasi.



Gambar 9.1 Peta Konsep Unit 8

■ 9.4 Uraian Materi

9.4.1 Menganalisis Efisiensi

Efisiensi menilai hubungan antara sumber daya yang digunakan (masukan) dan hasil yang diperoleh (keluaran atau hasil), bukan sekadar apakah anggaran habis terserap. Program yang menyerap anggaran besar tetapi keluarannya kecil, atau biaya satuannya jauh di atas standar, tergolong tidak efisien.

Tabel 9.2 Contoh Analisis Efisiensi

Aspek	Pertanyaan analisis	Contoh temuan
Biaya satuan	Apakah biaya per unit keluaran wajar dibandingkan standar daerah?	Biaya per meter jalan dua kali standar karena material didatangkan dari pulau lain

Aspek	Pertanyaan analisis	Contoh temuan
Realisasi vs pagu	Apakah anggaran terserap sesuai rencana dan menghasilkan keluaran yang sepadan?	Serapan 95% tetapi keluaran hanya 60% dari target
Alternatif lebih murah	Adakah cara mencapai hasil serupa dengan biaya lebih rendah?	Material lokal yang tidak dipertimbangkan

9.4.2 Tiga Dimensi Keberlanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan menyeimbangkan tiga dimensi (bacaan pengayaan: WCED, 1987, dan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB).

Tabel 9.3 Tiga Dimensi Keberlanjutan Program Pembangunan

Dimensi	Pertanyaan evaluasi	Contoh di KTI
Lingkungan	Apakah program memperhatikan daya dukung lingkungan dan risiko bencana?	Pembangunan di kawasan rawan abrasi tanpa kajian risiko
Sosial	Apakah program diterima warga dan bermanfaat merata, termasuk kelompok rentan?	Fasilitas air bersih hanya menjangkau dusun pusat, bukan dusun terjauh
Ekonomi	Apakah ada rencana pembiayaan lanjutan setelah proyek awal selesai?	Tidak ada anggaran pemeliharaan jalan usaha tani setelah tahun pertama

Program yang efisien secara anggaran tahun berjalan belum tentu berkelanjutan jika tidak memiliki rencana pemeliharaan, penerimaan sosial, atau memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang.

9.4.3 Menyusun Rekomendasi Berbasis Bukti

Tabel 9.4 Kriteria Rekomendasi yang Baik

Kriteria	Penjelasan	Contoh
Spesifik	Menyebut tindakan dan penanggung jawab	Dinas PU menyusun standar biaya khusus wilayah kepulauan
Berbasis bukti	Merujuk temuan matriks konsistensi dan data efisiensi/keberlanjutan	Merujuk selisih biaya satuan pada Tabel 9.1
Berorientasi publik	Manfaat bagi warga menjadi pertimbangan utama, bukan kemudahan administratif semata	Melibatkan warga dalam pemeliharaan sebagai syarat pencairan tahap akhir
Layak dilaksanakan	Sesuai kewenangan dan kapasitas daerah	Rekomendasi yang tidak memerlukan regulasi baru yang rumit

Rekomendasi minimal tiga butir, dan setiap butir menyebutkan dokumen atau data yang mendasarinya agar dapat diverifikasi — sejalan dengan nilai *Integrity*.

9.4.4 Menyusun Policy Brief

Tabel 9.5 Struktur Policy Brief Evaluasi Konsistensi dan Rekomendasi (2–3 Halaman)

Bagian	Isi
Ringkasan	Satu paragraf tentang temuan utama dan rekomendasi kunci
Latar belakang	Dokumen yang dievaluasi dan konteks lokus
Temuan konsistensi	Ringkasan celah relevansi dan efektivitas dari Unit 7
Temuan efisiensi dan keberlanjutan	Ringkasan analisis biaya dan tiga dimensi keberlanjutan
Rekomendasi	Minimal tiga butir spesifik dan berbasis bukti
Rujukan	Dokumen dan data yang digunakan

Policy brief ditulis ringkas dan lugas agar mudah dibaca pengambil kebijakan yang sibuk, berbeda dari laporan akademik yang panjang.

■ 9.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: JALAN USAHA TANI KECAMATAN BUKIT DAMAI

Renja Dinas Pertanian Kecamatan Bukit Damai merealisasikan 100% anggaran jalan usaha tani sepanjang 2 km dengan biaya dua kali standar biaya daerah karena material didatangkan dari pulau lain. Setahun setelah selesai, sebagian jalan rusak karena tidak ada anggaran pemeliharaan, dan kelompok tani tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan pembangunan.

Dokumen tidak menyebut kajian risiko lingkungan, padahal sebagian ruas jalan melewati lereng yang rawan longsor pada musim hujan.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Analisis efisiensi program ini berdasarkan biaya satuan dan realisasi.
2. Evaluasi tiga dimensi keberlanjutan program ini.
3. Susun minimal tiga rekomendasi berbasis bukti dan tuliskan dalam format ringkasan policy brief.

■ 9.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 13 — EFISIENSI, KEBERLANJUTAN, DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Mempelajari panduan evaluasi efisiensi dan keberlanjutan serta contoh rekomendasi berbasis bukti dari kasus daerah KTI; berkonsultasi di forum daring untuk menyempurnakan draf sebelum presentasi.
Luring (tatap muka)	Melanjutkan sesi Unit 7 dengan menambahkan dimensi efisiensi dan keberlanjutan pada matriks; kelompok mulai menyusun draf policy brief; diskusi kelas tentang standar biaya dan risiko lingkungan di KTI.
Penugasan dan luaran	Draf policy brief evaluasi konsistensi antardokumen (2–3 halaman) yang mencakup temuan efisiensi, keberlanjutan, dan rekomendasi awal. Draf ini dinilai bersama Unit 7 sebagai komponen Proyek untuk Sub-CPMK8.
Proyek kelompok	Tahap 6 (bagian 2): draf policy brief rekomendasi lokus proyek.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 9.7 Rangkuman

- Efisiensi menilai hubungan sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh, bukan sekadar penyerapan anggaran.
- Keberlanjutan memiliki tiga dimensi: lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- Rekomendasi yang baik bersifat spesifik, berbasis bukti, berorientasi publik, dan layak dilaksanakan.
- Policy brief ditulis ringkas (2–3 halaman) agar mudah dipahami pengambil kebijakan.
- Nilai Integrity menuntut setiap klaim dalam rekomendasi dapat ditelusuri ke dokumen atau data.

■ 9.8 Latihan**LATIHAN UNIT 8**

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

- Program dengan anggaran besar tetapi keluaran kecil menunjukkan masalah
 - relevansi
 - efisiensi
 - legalitas
 - partisipasi
 - transparansi
- Tiga dimensi keberlanjutan program pembangunan adalah
 - politik, hukum, budaya
 - lingkungan, sosial, ekonomi
 - input, proses, output
 - pusat, provinsi, daerah

- e. jangka pendek, menengah, panjang
- 3. Tidak adanya anggaran pemeliharaan setelah proyek selesai adalah masalah dimensi keberlanjutan
 - a. lingkungan
 - b. sosial
 - c. ekonomi
 - d. politik
 - e. hukum
- 4. Rekomendasi yang baik seharusnya
 - a. bersifat umum agar fleksibel
 - b. menyebut tindakan, penanggung jawab, dan bukti pendukung
 - c. menghindari menyebut dokumen sumber
 - d. ditulis sepanjang mungkin
 - e. menghindari kritik terhadap dinas
- 5. Dokumen ringkas berisi temuan dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan disebut
 - a. policy brief
 - b. RPJMD
 - c. Renja
 - d. RKP Desa
 - e. KUA-PPAS

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

- 6. Jelaskan perbedaan efisiensi dan efektivitas (Unit 7) dalam evaluasi program pembangunan, beserta satu contoh masing-masing.
- 7. Berdasarkan kasus Kecamatan Bukit Damai, evaluasilah efisiensi dan tiga dimensi keberlanjutan, lalu susun ringkasan policy brief dengan minimal tiga rekomendasi.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 9.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 9.6 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	Efisiensi menilai hubungan sumber daya dan hasil.
2	b	Keberlanjutan mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi.
3	c	Ketiadaan pembiayaan lanjutan termasuk dimensi ekonomi.
4	b	Rekomendasi yang spesifik dan berbasis bukti lebih dapat ditindaklanjuti.

No	Kunci	Pembahasan
5	a	Policy brief adalah ringkasan kebijakan yang lugas.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: efisiensi menilai hubungan sumber daya dan hasil, efektivitas menilai ketercapaian sasaran; contoh yang membedakan keduanya secara jelas.

Tabel 9.7 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Pembedaan konsep	12
Kualitas contoh	13
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: evaluasi efisiensi biaya satuan; tiga dimensi keberlanjutan dinilai; rekomendasi spesifik dan berbasis bukti dalam format ringkas.

Tabel 9.8 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Evaluasi efisiensi dan keberlanjutan	13
Kualitas dan format rekomendasi	12
Jumlah	25

■ 9.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Baca ulang subbab 9.4.1 dan 9.4.2, lalu evaluasi ulang satu program dengan tiga dimensi keberlanjutan.
- Kerjakan ulang studi kasus Bukit Damai dalam format policy brief.
- Periksa apakah setiap rekomendasi kelompok Anda menyebut dokumen atau data pendukungnya.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Baca ringkasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan kaitkan dengan program lokus proyek Anda.
- Bandingkan biaya satuan program di lokus Anda dengan standar biaya daerah, bila tersedia secara publik.

■ 9.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Rekomendasi mana dari kelompok Anda yang paling sulit dilaksanakan, dan mengapa?
2. Bagaimana Anda memastikan rekomendasi benar-benar berorientasi pada kepentingan warga?
3. Apa pelajaran terpenting dari menyusun policy brief?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Menyusun rekomendasi yang seluruhnya dapat ditelusuri ke bukti.

Service — Mengutamakan kepentingan publik dalam setiap rekomendasi.

Nationalism — Peduli terhadap keberlanjutan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

■ 9.12 Referensi Unit

Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*. Kemendagri.

Bappenas. (2019). *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Kementerian PPN/Bappenas. (Perlu diverifikasi.)

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press. (bacaan pengayaan)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (bacaan pengayaan)

BAB X · UNIT 9 · MINGGU 14

09

PRESENTASI RANCANGAN DOKUMEN PERENCANAAN

Menyampaikan hasil kerja satu semester secara sistematis dan komunikatif

Sub-CPMK9

CPL-07

Bobot 7%

10.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK9

Mempresentasikan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan komunikatif di hadapan pemangku kepentingan simulasi, dengan menggunakan media presentasi yang terstruktur.

Indikator: mahasiswa mampu

- Mempertahankan rancangan dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun sepanjang semester dengan argumentasi yang koheren dan berbasis bukti di hadapan pemangku kepentingan simulasi
- Menyusun media presentasi yang terstruktur dan komunikatif untuk menyampaikan seluruh komponen dokumen perencanaan
- Menyampaikan advokasi program dan rekomendasi secara persuasif kepada pemangku kepentingan simulasi
- Menampilkan kolaborasi tim yang efektif dalam pembagian peran penyampaian materi

Tabel 10.1 Kedudukan Sub-CPMK9 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK5 — mempresentasikan dan mempertahankan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, komunikatif, dan bertanggung jawab di hadapan pemangku kepentingan simulasi, dengan menginternalisasi nilai integritas dan keberpihakan pada kepentingan publik.
CPL yang didukung	CPL-07 (7%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	7% dari nilai akhir — Proyek 7% (presentasi advokasi dan policy brief final kelompok)
Estimasi waktu belajar	1 minggu × 510 menit (8,5 jam): PB 150 menit, PT 180 menit, KM 180 menit

10.2 Pemantik

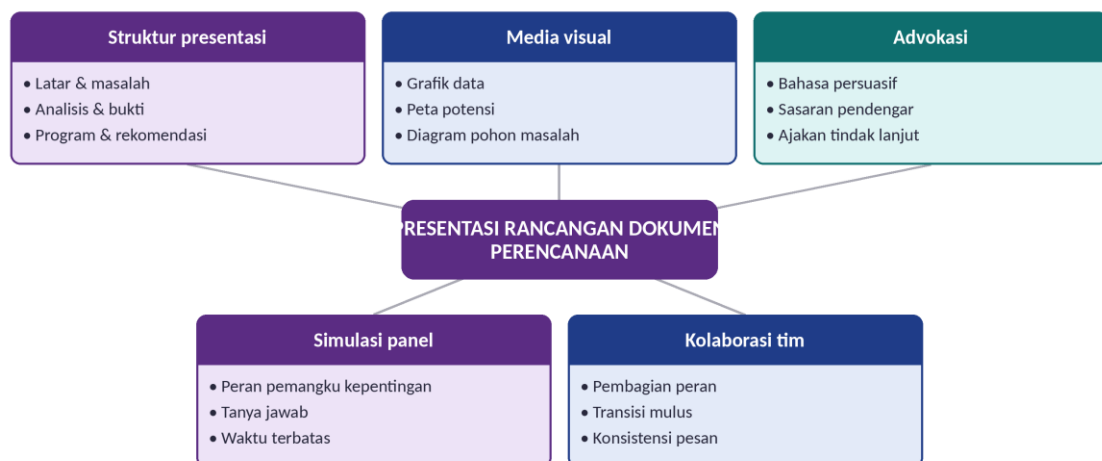
PEMANTIK

Sebuah kelompok menyajikan 20 slide penuh teks kecil berisi seluruh isi dokumen mereka. Panelis kesulitan mengikuti dan akhirnya hanya bertanya tentang anggaran. Kelompok lain menyajikan slide dengan satu gagasan utama per halaman, grafik yang jelas, dan diakhiri satu ajakan konkret. Panelis langsung memahami inti usulan dan mengajukan pertanyaan yang lebih tajam.

1. Mengapa jumlah informasi yang sama dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda pada pendengar?
2. Apa yang membuat sebuah presentasi terasa “komunikatif”, bukan sekadar lengkap?

10.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menunjukkan struktur presentasi, penggunaan media visual, teknik advokasi, dinamika simulasi panel, dan kolaborasi tim.



Gambar 10.1 Peta Konsep Unit 9

10.4 Uraian Materi

10.4.1 Menyusun Struktur Presentasi

Presentasi rancangan dokumen perencanaan berbeda dari menyajikan seluruh isi dokumen kata demi kata. Presentasi memilih inti pesan yang paling penting bagi pendengar, yaitu pemangku kepentingan simulasi yang ingin tahu **masalah apa yang dijawab dan mengapa usulan ini layak didukung**.

Tabel 10.2 Struktur Presentasi Advokasi (Maksimal 20 Slide, 15 Menit)

Bagian	Isi	Perkiraan waktu
Pembuka	Profil desa/kelurahan dan satu data kunci yang menarik perhatian	1–2 menit

Bagian	Isi	Perkiraan waktu
Masalah dan bukti	Isu strategis, data BPS/Podes, dan temuan Musrenbang	3–4 menit
Analisis	Ringkasan SWOT dan pohon masalah	2–3 menit
Program dan indikator	Program prioritas dengan indikator SMART	3–4 menit
Anggaran dan keterkaitan RPJMD	Ringkasan anggaran indikatif dan sasaran daerah yang didukung	1–2 menit
Penutup dan ajakan	Dampak yang diharapkan dan permintaan dukungan konkret	1–2 menit

10.4.2 Media Visual yang Komunikatif

- Satu gagasan utama per slide; hindari memenuhi slide dengan paragraf panjang.
- Gunakan grafik untuk data (misalnya perbandingan sebelum dan sesudah target), bukan tabel penuh angka.
- Tampilkan peta potensi lokal dan diagram pohon masalah dalam bentuk visual, bukan teks.
- Gunakan ukuran huruf yang terbaca dari jarak jauh dan kontras warna yang jelas.
- Sertakan foto dokumentasi Musrenbang secukupnya untuk memperkuat keaslian proses partisipatif.

10.4.3 Teknik Advokasi

Advokasi berarti menyampaikan usulan secara meyakinkan agar didukung, tanpa mengubah fakta. Perhatikan siapa pendengarnya: panel simulasi mungkin berperan sebagai kepala daerah, DPRD, atau Bappeda, yang masing-masing memiliki perhatian berbeda (anggaran, keterwakilan warga, atau kesesuaian dengan RPJMD).

Tabel 10.3 Menyesuaikan Pesan dengan Peran Pendengar

Peran pendengar	Perhatian utama	Pesan yang ditekankan
Kepala daerah/DPRD simulasi	Manfaat politik dan keadilan wilayah	Dampak bagi warga dan pemerataan pembangunan
Bappeda simulasi	Kesesuaian dengan RPJMD dan kelayakan teknis	Keterkaitan sasaran dan indikator yang jelas
Dinas teknis simulasi	Kelayakan pelaksanaan dan anggaran	Kejelasan komponen anggaran dan tahapan

Bahasa persuasif tetap harus jujur: jangan melebih-lebihkan dampak atau menyembunyikan keterbatasan data, karena hal ini akan diuji pada sesi pertahanan di Unit 10.

10.4.4 Dinamika Simulasi Panel dan Kolaborasi Tim

Panel simulasi biasanya terdiri atas dosen dan perwakilan mahasiswa yang berperan sebagai pemangku kepentingan. Setiap anggota kelompok idealnya menyampaikan satu bagian presentasi sesuai keahlian atau kontribusinya selama proyek, dengan transisi yang mulus antaranggota agar terlihat sebagai satu kesatuan pesan, bukan potongan-potongan terpisah.

1. Latihan bersama minimal satu kali sebelum sesi, termasuk mengatur waktu setiap bagian.
2. Tentukan siapa yang menjawab jenis pertanyaan tertentu (data, anggaran, atau proses partisipatif) agar tidak semua bergantung pada satu orang.
3. Siapkan slide cadangan untuk data pendukung yang mungkin ditanyakan panel.
4. Sepakati sinyal nonverbal sederhana antaranggota jika ada yang perlu membantu menjawab.

■ 10.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: PRESENTASI KELOMPOK RENCANA DESA BAHARI INDAH

Kelompok yang mengkaji Desa Bahari Indah menyiapkan 25 slide berisi seluruh isi dokumen, termasuk tabel data mentah IKM dan matriks SWOT lengkap. Saat presentasi, satu orang berbicara selama 12 menit tanpa jeda sementara anggota lain hanya berdiri di belakang. Panel simulasi tampak bingung menangkap inti usulan dan hanya sempat bertanya tentang anggaran.

Setelah menerima masukan, kelompok merevisi menjadi 15 slide dengan satu gagasan utama per halaman, grafik perbandingan target, dan peta potensi desa. Setiap anggota menyampaikan satu bagian sesuai kontribusinya, dan presentasi diakhiri dengan ajakan konkret kepada panel untuk mendukung program prioritas.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Identifikasi kelemahan presentasi pertama dari aspek struktur, media visual, dan kolaborasi tim.
2. Jelaskan mengapa versi revisi lebih komunikatif meskipun informasinya lebih ringkas.
3. Rancang satu kalimat penutup yang persuasif namun jujur untuk mengajak panel mendukung program prioritas desa.

■ 10.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 14 — MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN PRESENTASI ADVOKASI

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Mempelajari panduan presentasi dan rubrik penilaian; menyempurnakan slide berdasarkan komentar dosen pada draf dokumen; berlatih pembagian peran secara mandiri.
Luring (tatap muka)	Setiap kelompok mempresentasikan rancangan dokumen (7–10 menit) di hadapan panel simulasi (dosen dan mahasiswa lain sebagai penilai); tanya-jawab kritis tentang basis bukti dan kelayakan rekomendasi; umpan balik terstruktur dari dosen.
Penugasan dan luaran	Slide presentasi advokasi (maksimal 20 halaman) dan policy brief final yang telah menggabungkan temuan Unit 7 dan 8; keduanya diunggah ke LMS pada hari presentasi. Luran ini dinilai sebagai komponen Proyek untuk Sub-CPMK9.
Proyek kelompok	Tahap 7: policy brief final dan presentasi advokasi lokus proyek.
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

■ 10.7 Rangkuman

- Presentasi advokasi memilih inti pesan, bukan menyalin seluruh isi dokumen.
- Struktur presentasi bergerak dari masalah dan bukti, analisis, program dan indikator, hingga ajakan konkret.
- Media visual yang baik memuat satu gagasan per slide, grafik yang jelas, dan peta atau diagram yang komunikatif.
- Advokasi menyesuaikan penekanan pesan dengan perhatian pendengar tanpa mengubah fakta.
- Kolaborasi tim yang baik membagi peran sesuai kontribusi dan berlatih bersama sebelum presentasi.

■ 10.8 Latihan

LATIHAN UNIT 9

A. Pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (skor 10 per soal).

- Prinsip utama slide yang komunikatif adalah
 - memuat sebanyak mungkin data
 - satu gagasan utama per slide
 - menggunakan huruf sekecil mungkin agar muat banyak teks
 - menghindari grafik
 - menyalin seluruh isi dokumen
- Bagian presentasi yang menampilkan data BPS dan temuan Musrenbang termasuk bagian
 - pembuka

- b. masalah dan bukti
 - c. penutup
 - d. anggaran
 - e. ajakan
3. Menyesuaikan penekanan pesan dengan perhatian utama pendengar disebut
- a. manipulasi data
 - b. advokasi
 - c. plagiarisme
 - d. fabrikasi
 - e. generalisasi
4. Pembagian peran presentasi sebaiknya didasarkan pada
- a. undian
 - b. kontribusi dan keahlian selama proyek
 - c. urutan absen
 - d. siapa yang paling percaya diri saja
 - e. nilai UTS
5. Jika presentasi terlalu padat teks dan hanya satu orang berbicara, dampaknya adalah
- a. presentasi menjadi lebih meyakinkan
 - b. pendengar sulit menangkap inti pesan
 - c. waktu presentasi menjadi lebih singkat
 - d. panel akan lebih percaya
 - e. tidak ada dampak

B. Uraian. Jawablah secara runtut dan berbasis konsep (skor 25 per soal).

- 6. Jelaskan struktur presentasi advokasi yang efektif untuk dokumen perencanaan desa, beserta alokasi waktu yang wajar.
- 7. Berdasarkan kasus Desa Bahari Indah, rancang tiga perbaikan konkret untuk media visual dan satu strategi pembagian peran tim.

Skor maksimum: $5 \times 10 + 2 \times 25 = 100$.

■ 10.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 10.4 Kunci Jawaban Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	b	Satu gagasan per slide memudahkan pendengar mengikuti.
2	b	Data dan temuan mendukung bagian masalah dan bukti.

No	Kunci	Pembahasan
3	b	Advokasi menyesuaikan penekanan pesan tanpa mengubah fakta.
4	b	Pembagian berbasis kontribusi mencerminkan penguasaan materi yang nyata.
5	b	Kepadatan informasi tanpa struktur yang jelas menyulitkan pemahaman.

Soal 6. Pokok jawaban yang diharapkan: enam bagian dari pembuka hingga ajakan; alokasi waktu proporsional dalam 15 menit.

Tabel 10.5 Pedoman Penskoran Soal 6

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Ketepatan struktur	15
Alokasi waktu yang wajar	10
Jumlah	25

Soal 7. Pokok jawaban yang diharapkan: perbaikan visual seperti pengurangan teks, grafik, dan peta; strategi pembagian peran berbasis kontribusi dan latihan bersama.

Tabel 10.6 Pedoman Penskoran Soal 7

Aspek yang dinilai	Skor maks.
Tiga perbaikan media visual	15
Strategi pembagian peran	10
Jumlah	25

■ 10.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 100) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Sederhanakan ulang tiga slide kelompok Anda menjadi satu gagasan per slide.
- Lakukan gladi presentasi dengan pengatur waktu bersama kelompok.
- Diskusikan kasus Desa Bahari Indah di forum LMS.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Tonton satu presentasi kebijakan publik yang efektif (misalnya paparan hasil kajian Bappenas) dan identifikasi struktur pesannya.
- Pelajari prinsip desain slide minimalis dari sumber tepercaya dan terapkan pada slide kelompok Anda.

■ 10.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

REFLEKSI

1. Bagian mana dari presentasi kelompok Anda yang paling kuat, dan mana yang perlu diperbaiki?
2. Bagaimana peran Anda dalam pembagian tugas presentasi?
3. Pertanyaan apa dari panel yang membuat Anda perlu berpikir lebih dalam?

NILAI ICHSA-N DALAM UNIT INI

Creativity — Merancang media presentasi yang menarik dan mudah dipahami.

Harmony — Berkolaborasi dengan mulus antaranggota saat presentasi.

Integrity — Menyampaikan advokasi yang persuasif tanpa melebih-lebihkan data.

■ 10.12 Referensi Unit

- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bappenas. (2019). *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Kementerian PPN/Bappenas. (Perlu diverifikasi.)
- Reynolds, G. (2011). *Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery* (2nd ed.). New Riders. (bacaan pengayaan)

BAB XI · UNIT 10 · MINGGU 15

10

PERTAHANAN DAN REFLEKSI
INTEGRITAS PERENCANAAN*Mempertahankan dokumen dengan jujur dan merefleksikan proses satu semester*

Sub-CPMK10

CPL-07

Bobot 7%

■ 11.1 Capaian Pembelajaran Unit

SUB-CPMK10

Mempertahankan dan merefleksikan rancangan dokumen perencanaan pembangunan secara bertanggung jawab dengan menginternalisasi nilai integritas perencanaan dan keberpihakan pada kepentingan publik masyarakat KTI.

Indikator: mahasiswa mampu

- Mempertahankan rancangan dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun sepanjang semester dengan argumentasi yang koheren dan berbasis bukti di hadapan pemangku kepentingan simulasi
- Merefleksikan secara kritis proses penyusunan dokumen perencanaan yang telah dilalui dengan mengidentifikasi keputusan metodologis dan pilihan data yang diambil
- Menampilkan nilai integritas perencanaan dengan memastikan transparansi sumber data, keterbukaan atas keterbatasan analisis, dan akuntabilitas atas seluruh konten dokumen yang dipresentasikan
- Menginternalisasi keberpihakan pada kepentingan publik masyarakat KTI dalam memilih prioritas program dan merumuskan indikator kinerja pada dokumen yang disajikan
- Merevisi dokumen perencanaan berdasarkan masukan substantif dari sesi presentasi dan penilaian sejawat secara terbuka dan konstruktif

Tabel 11.1 Kedudukan Sub-CPMK10 dalam Rantai Capaian Pembelajaran

Unsur	Keterangan
CPMK induk	CPMK5 — mempresentasikan dan mempertahankan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, komunikatif, dan bertanggung jawab di hadapan pemangku kepentingan simulasi, dengan menginternalisasi nilai integritas dan keberpihakan pada kepentingan publik.
CPL yang didukung	CPL-07 (7%)
Bobot penilaian Sub-CPMK	7% dari nilai akhir — Proyek 7% (panel pertahanan, dokumen revisi, dan refleksi individu)
Estimasi waktu belajar	1 minggu × 510 menit (8,5 jam): PB 150 menit, PT 180 menit, KM 180 menit

■ 11.2 Pemantik

PEMANTIK

Seorang panelis bertanya, “Data kemiskinan yang Anda pakai berasal dari tahun berapa, dan mengapa targetnya bisa naik drastis dalam satu tahun?” Ketua kelompok menjawab, “Kami hanya memperkirakan saja, Pak, biar terlihat optimis.”

1. Apa yang salah dengan jawaban tersebut dari sudut integritas perencanaan?
2. Bagaimana seharusnya kelompok menjawab jika target memang belum didukung data yang kuat?

■ 11.3 Peta Konsep

Peta konsep berikut menunjukkan cara mempertahankan argumen, menjawab pertanyaan kritis, melakukan refleksi metodologis, menjaga integritas perencanaan, dan keberpihakan pada kepentingan publik.



Gambar 11.1 Peta Konsep Unit 10

■ 11.4 Uraian Materi

11.4.1 Mempertahankan Dokumen di Sesi Panel

Sesi pertahanan (*defense*) berbeda dari presentasi advokasi pada Unit 9. Tujuannya bukan meyakinkan sebanyak mungkin, melainkan **menguji ketahanan argumen** dokumen terhadap pertanyaan kritis. Kelompok yang siap adalah kelompok yang mengetahui persis dari mana setiap angka dan klaim dalam dokumennya berasal.

Tabel 11.2 Prinsip Menjawab Pertanyaan Panel

Prinsip	Penjelasan	Contoh
Dengarkan penuh	Jangan memotong sebelum pertanyaan selesai	Menunggu hingga panelis selesai bertanya

Prinsip	Penjelasan	Contoh
Jawab langsung	Jawab inti pertanyaan sebelum menjelaskan konteks	“Data bersumber dari Podes 2021” sebelum menjelaskan detail lain
Rujuk dokumen	Tunjukkan bagian dokumen atau data yang mendasari jawaban	Menyebut tabel atau halaman tertentu
Akui keterbatasan	Jangan mengarang jawaban jika data tidak tersedia	“Kami belum memiliki data terbaru untuk indikator ini, sehingga menjadi keterbatasan analisis”

11.4.2 Refleksi Metodologis

Refleksi bukan sekadar kesan “senang” atau “belajar banyak”, melainkan analisis atas keputusan yang diambil selama proyek.

Tabel 11.3 Pertanyaan Panduan Refleksi Metodologis

Aspek	Pertanyaan panduan
Keputusan data	Data apa yang dipilih dan mengapa? Data apa yang tidak tersedia dan bagaimana kelompok menyiasatinya?
Keputusan metode	Mengapa memilih program tertentu dari sekian usulan? Bagaimana proses prioritas dilakukan?
Keterbatasan	Bagian mana dari dokumen yang paling lemah, dan mengapa?
Pelajaran	Apa yang akan dilakukan berbeda jika mengulang proyek ini?

11.4.3 Integritas Perencanaan

- **Transparansi sumber data:** setiap angka dapat ditelusuri ke dokumen atau survei yang jelas.
- **Keterbukaan atas keterbatasan:** mengakui data yang lemah atau asumsi yang digunakan, bukan menutupinya.
- **Akuntabilitas konten:** setiap anggota memahami dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh isi dokumen, bukan hanya bagian yang ia tulis sendiri.
- **Tidak menggelembungkan target:** target dan proyeksi dampak harus masuk akal berdasarkan bukti, sebagaimana ditekankan sejak Unit 6.

Integritas perencanaan penting karena dokumen semacam ini, jika digunakan sungguh-sungguh oleh pemerintah desa, akan memengaruhi alokasi sumber daya yang nyata bagi warga.

11.4.4 Keberpihakan pada Kepentingan Publik dan Revisi

Sepanjang proyek, mahasiswa diminta menjaga agar prioritas program benar-benar mencerminkan kebutuhan warga, termasuk kelompok yang jarang bersuara, bukan kepentingan kelompok tertentu atau kemudahan penyusunan dokumen semata. Refleksi individu menjadi ruang untuk menuliskan secara personal bagaimana nilai ini dihayati.

Tabel 11.4 Struktur Lembar Refleksi Individu (300–500 Kata)

Bagian	Isi
Keputusan penting	Satu atau dua keputusan penting yang saya ambil atau ikut ambil selama proyek
Keterbatasan dokumen	Bagian yang menurut saya paling lemah dan mengapa
Penghayatan nilai	Bagaimana saya menghayati integritas dan keberpihakan publik selama proyek
Pelajaran	Apa yang saya pelajari untuk diterapkan di masa depan

Setelah sesi panel, kelompok merevisi dokumen berdasarkan masukan substantif secara terbuka, bukan sekadar memperbaiki kesalahan ketik, lalu menyerahkan dokumen revisi sebagai luaran akhir proyek.

■ 11.5 Studi Kasus

STUDI KASUS ILUSTRASI: SESI PERTAHANAN KELOMPOK DESA CAHAYA TIMUR

Dalam sesi pertahanan, seorang panelis menanyakan dasar target penurunan angka putus sekolah dari 15% menjadi 2% dalam satu tahun. Ketua kelompok menjawab bahwa angka itu “hanya perkiraan optimis” tanpa dasar data. Panelis lain menanyakan mengapa dusun terjauh tidak disebutkan dalam program air bersih, padahal data Podes menunjukkan dusun itu paling minim akses air.

Setelah sesi, kelompok menyadari bahwa target pendidikan memang tidak didukung data yang memadai, dan dusun terjauh terlewat karena keterbatasan waktu survei, bukan karena dianggap tidak penting.

Catatan: kasus ini bersifat ilustratif, disusun untuk keperluan pembelajaran, dan tidak merujuk pada daerah, lembaga, atau tokoh tertentu.

Pertanyaan analisis

1. Nilailah jawaban ketua kelompok tentang target pendidikan dari sudut integritas perencanaan.
2. Bagaimana seharusnya kelompok menjawab pertanyaan tentang dusun terjauh yang terlewat?
3. Susun tiga poin refleksi metodologis yang relevan untuk kelompok ini.

■ 11.6 Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas berikut mengikuti rencana mingguan pada RPS. Selesaikan kegiatan daring sebelum sesi luring agar diskusi di kelas dapat berjalan efektif.

MINGGU 15 — SESI PANEL PERTAHANAN, REVISI, DAN REFLEKSI

Kegiatan	Uraian
Daring (LMS UNISAN)	Mempelajari panduan refleksi kritis dan rubrik penilaian presentasi final; menyelesaikan revisi dokumen berdasarkan masukan minggu 14; menyusun slide presentasi final; mengisi daftar periksa swa-nilai (subbab 10.8).
Luring (tatap muka)	Presentasi final dokumen perencanaan (10–12 menit per kelompok) dengan panel simulasi (dosen dan dua mahasiswa terpilih); setiap kelompok mempertahankan dokumen, menjawab pertanyaan kritis, dan menyampaikan refleksi singkat; mahasiswa lain mengisi lembar penilaian sejawat; dosen menutup dengan umpan balik menyeluruh dan sintesis capaian pembelajaran semester.
Penugasan dan luaran	Dokumen perencanaan revisi final, lembar refleksi individu (300–500 kata per anggota), dan log kerja mingguan yang telah diverifikasi; seluruh berkas diunggah ke LMS. Luaran ini dinilai sebagai komponen Proyek untuk Sub-CPMK10.
Proyek kelompok	Tahap 8: panel pertahanan, dokumen revisi, dan refleksi individu .
Estimasi waktu	PB 3 × 50 menit · PT 3 × 60 menit · KM 3 × 60 menit

11.7 Rangkuman

- Sesi pertahanan menguji ketahanan argumen dokumen, bukan sekadar meyakinkan pendengar.
- Menjawab pertanyaan panel dengan mendengar penuh, menjawab langsung, merujuk dokumen, dan mengakui keterbatasan.
- Refleksi metodologis menganalisis keputusan data, metode, keterbatasan, dan pelajaran, bukan sekadar kesan umum.
- Integritas perencanaan mencakup transparansi sumber, keterbukaan keterbatasan, akuntabilitas konten, dan target yang tidak digelembungkan.
- Dokumen direvisi secara terbuka berdasarkan masukan substantif sebagai luaran akhir proyek.

11.8 Latihan**LATIHAN SWA-NILAI UNIT 10**

Unit ini berluaran panel pertahanan, dokumen revisi, dan refleksi individu. Gunakan daftar periksa berikut sebelum sesi panel dan sebelum mengumpulkan dokumen revisi.

Beri skor **0** = belum ada, **1** = ada tetapi belum memadai, **2** = ada dan memadai. Lingkari skor yang sesuai.

No	Butir periksa	0	1	2
1	Setiap anggota mengetahui sumber setiap data utama dalam dokumen			
2	Kelompok telah berlatih menjawab pertanyaan kritis yang mungkin muncul			
3	Target dan proyeksi dampak didukung data, tidak digelembungkan			

4	Keterbatasan data dan analisis dinyatakan secara terbuka dalam dokumen			
5	Prioritas program mencerminkan kebutuhan kelompok rentan, bukan hanya kelompok yang vokal			
6	Log kerja mingguan telah diisi dan ditandatangani seluruh anggota			
7	Lembar refleksi individu memuat keputusan, keterbatasan, dan pelajaran secara spesifik			
8	Dokumen revisi mengakomodasi masukan substantif dari sesi presentasi, bukan hanya perbaikan ketik			
9	Seluruh anggota siap menjelaskan bagian dokumen yang bukan tanggung jawab utamanya			
10	Berkas lengkap (dokumen revisi, refleksi, dan log) siap diunggah sesuai tenggat			

Skor maksimum: $10 \times 2 = 20$.

■ 11.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Daftar periksa bersifat formatif. Nilai Proyek untuk Sub-CPMK9 dan Sub-CPMK10 ditetapkan dosen dengan rubrik final project Rencana Tugas RPS berikut, ditambah lembar refleksi individu.

Tabel 11.5 Rubrik Final Project (Rencana Tugas RPS)

Aspek	Bobot	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
a. Analisis kondisi wilayah dan pemetaan potensi	15%	Data akurat dan mendalam, isu strategis tajam	Memadai	Sebagian lemah	Tidak memadai
b. Analisis SWOT dan rumusan strategi	15%	Faktor logis dan berbasis data, strategi terhubung isu	Memadai	Sebagian opini	Tidak logis
c. Pelaksanaan dan dokumentasi simulasi Musrenbang	10%	FGD lengkap, keterwakilan kelompok rentan, notulen autentik	Memadai	Sebagian lemah	Tidak memadai
d. Kualitas dokumen perencanaan partisipatif	25%	Komponen lengkap, indikator SMART, koheren, berpihak pada warga	Memadai	Kurang lengkap	Tidak memadai

Aspek	Bobot	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
e. Evaluasi konsistensi dan policy brief rekomendasi	15%	Evaluasi tajam, rekomendasi spesifik dan berbasis bukti	Memadai	Dangkal	Tidak ada
f. Presentasi dan pertahanan di panel simulasi	15%	Sistematis, media jelas, argumen kuat, konsisten dengan dokumen	Baik	Sebagian anggota	Tidak mampu
g. Refleksi individu: integritas dan keberpihakan publik	5%	Reflektif, personal, dan spesifik	Memadai	Umum	Tidak reflektif

Aspek dan bobot dari Rencana Tugas RPS. Nilai individu dapat disesuaikan $\pm 10\%$ berdasarkan penilaian antarsejawat sesuai ketentuan Rencana Tugas.

Tafsiran swa-nilai: skor 18–20 menunjukkan kesiapan sangat baik; 14–17 perlu perbaikan pada butir bernilai 0 atau 1; di bawah 14 berarti kelompok wajib berkonsultasi sebelum sesi panel.

■ 11.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jumlahkan skor Anda, lalu hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada subbab 1.8: **(skor yang diperoleh ÷ 20) × 100%**. Tentukan tindak lanjut sesuai hasilnya.

Penguasaan < 70% (remedial).

- Gunakan Tabel 11.1 untuk berlatih menjawab pertanyaan kritis bersama kelompok.
- Tulis ulang lembar refleksi individu Anda dengan mengikuti struktur pada Tabel 11.3.
- Periksa ulang apakah dokumen revisi benar-benar mengakomodasi masukan, bukan sekadar memperbaiki ketikan.

Penguasaan 70%–89%. Lanjutkan ke unit berikutnya setelah meninjau kembali soal yang jawabannya belum tepat.

Penguasaan ≥ 90% (pengayaan).

- Bandingkan proyek Anda dengan satu RPJMDes nyata yang dipublikasikan dan identifikasi perbedaan kedalamannya.
- Tulis ringkasan satu halaman tentang bagaimana proyek ini dapat ditindaklanjuti jika benar-benar diserahkan kepada pemerintah desa.

■ 11.11 Refleksi dan Nilai ICBSA-N

REFLEKSI

1. Bagaimana Anda menjawab pertanyaan panel yang paling sulit, dan apa yang akan Anda lakukan berbeda?
2. Nilai ICBSA-N mana yang paling Anda hayati sepanjang proyek ini?
3. Bandingkan jawaban refleksi awal Anda (subbab 1.8) dengan pemahaman Anda sekarang setelah satu semester.

NILAI ICBSA-N DALAM UNIT INI

Integrity — Mengakui keterbatasan dokumen secara terbuka di hadapan panel.

Service — Menjaga agar prioritas program tetap berpihak pada warga, termasuk kelompok rentan.

Adaptability — Merevisi dokumen secara terbuka berdasarkan kritik yang membangun.

Nationalism — Merefleksikan kontribusi proyek bagi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

■ 11.12 Referensi Unit

Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley & Sons.

Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*. Kemendagri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kemendes PDTT. (Substansi rinci perlu diverifikasi.)

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

PERSIAPAN UAS (MINGGU 16)

UAS berbobot 20% dari nilai akhir dan mencakup seluruh materi semester dengan penekanan pada minggu 9–15, sesuai RPS. Pemetaan bobot: Sub-CPMK1 (3%), Sub-CPMK2 (2%), Sub-CPMK3 (1%), Sub-CPMK5 (3%), Sub-CPMK6 (3%), Sub-CPMK7 (4%), Sub-CPMK8 (4%). Skor naskah proporsional (15 : 10 : 5 : 15 : 15 : 20 : 20).

- **Bentuk (RPS):** soal uraian berbasis kasus atau esai analitik yang menuntut kemampuan analisis dan sintesis, terutama materi minggu 9–15.
- **Aturan:** dikerjakan mandiri dan jujur sesuai tata tertib UNISAN; GenAI dilarang kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.

- **Strategi:** tinjau rangkuman Unit 5–10, latih menyusun indikator SMART dan matriks konsistensi pada kasus baru, dan gunakan pengalaman proyek kelompok sebagai bahan analisis.

XII

BAB XII · EVALUASI SUMATIF

ASESMEN SUMATIF

Rekonsiliasi penilaian, perhitungan capaian, dan instrumen ujian

Sub-CPMK1–Sub-CPMK10

CPL-03 · CPL-04 · CPL-05 · CPL-07

Total bobot 100%

■ 12.1 Prinsip Asesmen

Asesmen dirancang berdasarkan keselarasan konstruktif OBE: setiap instrumen mengukur Sub-CPMK tertentu, dan setiap Sub-CPMK diukur oleh sedikitnya satu instrumen sumatif.

1. **Sahih (valid).** Instrumen mengukur kemampuan pada indikator Sub-CPMK.
2. **Andal (reliabel).** Penilaian menggunakan rubrik tertulis yang dibagikan sejak awal.
3. **Adil dan transparan.** Kriteria, bobot, tenggat, dan sanksi keterlambatan diumumkan melalui modul dan LMS.
4. **Autentik.** Proyek menuntut mahasiswa menyusun dokumen perencanaan nyata untuk desa/kelurahan riil di KTI.
5. **Edukatif.** Kuis mingguan, latihan unit, portofolio, dan partisipasi bersifat formatif dan memberi umpan balik.
6. **Berintegritas.** Fabrikasi data, pemalsuan notulen, plagiarisme, atau penggunaan GenAI tanpa izin pada ujian mengakibatkan pembatalan nilai instrumen tersebut.

■ 12.2 Rekonsiliasi Komponen Penilaian dan Sub-CPMK

Tabel berikut adalah acuan resmi pemetaan nilai. Baris menunjukkan bobot Sub-CPMK sesuai tabel utama RPS dan matriks CPL, sedangkan kolom menunjukkan bobot komponen penilaian.

Tabel 12.1 Rekonsiliasi Komponen Penilaian × Sub-CPMK

Sub-CPMK	Kuis Regulasi	Tugas Wilayah	UTS	Proyek	UAS	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	4	–	6	–	3	13
Sub-CPMK2	6	–	5	–	2	13
Sub-CPMK3	–	6	6	–	1	13
Sub-CPMK4	–	4	3	–	–	7
Sub-CPMK5	–	–	–	10	3	13
Sub-CPMK6	–	–	–	10	3	13
Sub-CPMK7	–	–	–	3	4	7
Sub-CPMK8	–	–	–	3	4	7
Sub-CPMK9	–	–	–	7	–	7

Sub-CPMK	Kuis Regulasi	Tugas Wilayah	UTS	Proyek	UAS	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK10	–	–	–	7	–	7
Bobot komponen (%)	10	10	20	40	20	100

Versi bobot: tabel utama RPS (13/13/13/7/13/13/7/7/7/7). Tabel rekonsiliasi RPS tidak digunakan karena tidak sesuai dengan tabel utama dan matriks CPL, serta menempatkan UTS pada Sub-CPMK5, 6, 9, dan 10 yang baru dipelajari setelah UTS.

Instrumen yang mengisi setiap sel ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 12.2 Instrumen Pengisi Setiap Sel Rekonsiliasi

Komponen	Sub-CPMK	Instrumen
Kuis Regulasi Perencanaan	Sub-CPMK1 (4)	Kuis identifikasi paradigma (mg 1–2)
	Sub-CPMK2 (6)	Latihan pemetaan regulasi (mg 3) dan analisis dokumen singkat (mg 4)
Tugas Analisis Wilayah	Sub-CPMK3 (6)	Laporan Profil Wilayah dan peta potensi kelompok (mg 6) — aspek a Rencana Tugas
	Sub-CPMK4 (4)	Matriks SWOT dan narasi strategi kelompok (mg 7) — aspek b Rencana Tugas
UTS	Sub-CPMK1–4 (6/5/6/3)	Ujian tertulis (mg 8)
Proyek	Sub-CPMK5 (10)	Panduan FGD, notulen, matriks kebutuhan, dan pohon masalah (mg 9–10) — aspek c Rencana Tugas
	Sub-CPMK6 (10)	Dokumen perencanaan partisipatif final (mg 11–12) — aspek d Rencana Tugas
	Sub-CPMK7 (3)	Matriks konsistensi vertikal dan horizontal (mg 13) — bagian aspek e Rencana Tugas
	Sub-CPMK8 (3)	Policy brief efisiensi, keberlanjutan, dan rekomendasi (mg 13–14) — bagian aspek e Rencana Tugas
	Sub-CPMK9 (7)	Slide presentasi advokasi (mg 14) — aspek f Rencana Tugas
UAS	Sub-CPMK10 (7)	Panel pertahanan, dokumen revisi, dan refleksi individu (mg 15) — aspek f dan g Rencana Tugas
	Sub-CPMK1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (3/2/1/3/3/4/4)	Ujian integratif dengan penekanan mg 9–15 (mg 16)

■ 12.3 Perhitungan Nilai dan Ketercapaian untuk SI-OBE

Setiap instrumen dinilai pada skala 0–100, lalu diolah dalam empat langkah berikut sesuai struktur data SI-OBE UNISAN.

1. **Nilai Sub-CPMK.** $N_{Subj} = \sum (wkj \times skj) \div \sum wkj$, dengan wkj bobot sel pada Tabel 12.1 dan skj skor instrumen.
2. **Nilai akhir.** $NA = \sum (bj \times N_{Subj}) \div 100$; dikonversi ke huruf mutu menurut Tabel 1.11.
3. **Nilai CPMK.** Rata-rata tertimbang N_{Sub} dari Sub-CPMK anggotanya dengan bobot Sub-CPMK sebagai penimbang.
4. **Nilai CPL.** $NCPLc = \sum (mcj \times N_{Subj}) \div \sum mcj$, dengan mcj bobot kontribusi pada Tabel 1.6.

Mahasiswa dinyatakan **mencapai** suatu Sub-CPMK, CPMK, atau CPL jika nilainya ≥ 70 . Pada tingkat kelas, ketercapaian dilaporkan sebagai persentase mahasiswa yang mencapai ambang tersebut.

12.3.1 Contoh Perhitungan Satu Mahasiswa

Contoh berikut menggunakan data ilustrasi yang dihitung dengan kode program (Python).

Tabel 12.3 Contoh Skor Instrumen, Nilai Sub-CPMK, dan Kontribusi ke Nilai Akhir

Sub-CPMK	Kuis	Tugas	UTS	Proyek	UAS	NSub	Kontribusi ke NA
Sub-CPMK1	80	–	74	–	70	74,92	9,74
Sub-CPMK2	72	–	66	–	68	69,08	8,98
Sub-CPMK3	–	78	72	–	66	74,31	9,66
Sub-CPMK4	–	70	64	–	–	67,43	4,72
Sub-CPMK5	–	–	–	76	60	72,31	9,40
Sub-CPMK6	–	–	–	70	58	67,23	8,74
Sub-CPMK7	–	–	–	64	72	68,57	4,80
Sub-CPMK8	–	–	–	62	70	66,57	4,66
Sub-CPMK9	–	–	–	82	–	82,00	5,74
Sub-CPMK10	–	–	–	80	–	80,00	5,60
Nilai akhir							72,04

Sebagai ilustrasi langkah 1, $N_{Sub1} = (4 \times 80 + 6 \times 74 + 3 \times 70) \div 13 = 74,92$. Nilai akhir 72,04 menghasilkan huruf mutu **C**. Mahasiswa ini belum mencapai Sub-CPMK2 (69,08), Sub-CPMK4 (67,43), Sub-CPMK6 (67,23), Sub-CPMK7 (68,57), Sub-CPMK8 (66,57), sehingga CPMK3 (69,77) dan CPMK4 (67,57) juga belum tercapai, walaupun keempat CPL tetap di atas ambang karena bobot Sub-CPMK9 dan 10 yang tinggi mengangkat rata-rata CPL-07.

Tabel 12.4 Contoh Nilai CPMK dan CPL Seorang Mahasiswa

Capaian	Nilai	Status (≥ 70)
CPMK1	72,00	Tercapai
CPMK2	71,90	Tercapai
CPMK3	69,77	Belum tercapai
CPMK4	67,57	Belum tercapai
CPMK5	81,00	Tercapai

Capaian	Nilai	Status (≥ 70)
CPL-03	72,00	Tercapai
CPL-04	71,90	Tercapai
CPL-05	69,77	Belum tercapai
CPL-07	74,29	Tercapai

12.3.2 Contoh Ketercapaian CPL pada Tingkat Kelas

Tabel berikut memperlihatkan data ilustrasi sepuluh mahasiswa yang dibangkitkan dengan kode program dan tidak mewakili nilai mahasiswa sebenarnya.

Tabel 12.5 Contoh Ketercapaian CPL Kelas (Data Ilustrasi)

Mahasiswa	CPL-03	CPL-04	CPL-05	CPL-07	Nilai akhir
M01	70,42	65,05	65,31	70,93	68,16
M02	77,23	80,60	80,46	79,04	79,25
M03	84,96	82,25	85,81	77,96	82,68
M04	72,69	79,55	72,08	73,79	74,21
M05	62,54	66,65	72,85	65,93	66,99
M06	76,62	81,95	78,62	78,21	78,65
M07	82,96	84,65	86,65	79,39	83,26
M08	82,58	77,85	76,62	79,07	79,10
M09	80,62	81,35	75,96	84,93	80,76
M10	79,81	75,65	73,35	78,82	77,02
Rata-rata	77,04	77,55	76,77	76,81	
% ≥ 70	90,0%	80,0%	90,0%	90,0%	

Pada contoh ini, persentase mahasiswa yang mencapai ambang berkisar 80%–90% pada keempat CPL. Jika target program studi misalnya 75%, hasil ini menunjukkan CPL yang perlu diperkuat pada evaluasi mata kuliah (subbab 12.7), terutama CPL dengan persentase terendah.

■ 12.4 Kisi-kisi, Contoh Naskah, dan Pedoman Penskoran UTS

UTS mencakup materi minggu 1–7 sesuai RPS: pertanyaan konseptual, analisis data (interpretasi tabel BPS), dan penerapan SWOT pada skenario wilayah KTI. Skor naskah 100 dibagi proporsional dengan bobot Sub-CPMK dalam UTS (6 : 5 : 6 : 3 dari 20).

Tabel 12.6 Kisi-kisi UTS

Sub-CPMK	Bobot NA	Skor total	Bagian A (konseptual)	Bagian B (data BPS)	Bagian C (SWOT)
Sub-CPMK1	6%	30	30	—	—

Sub-CPMK	Bobot NA	Skor total	Bagian A (konseptual)	Bagian B (data BPS)	Bagian C (SWOT)
Sub-CPMK2	5%	25	25	–	–
Sub-CPMK3	6%	30	–	30	–
Sub-CPMK4	3%	15	–	–	15
Jumlah	20%	100	55	30	15

CONTOH BUTIR DAN NASKAH UTS

Contoh butir konseptual (Sub-CPMK1–2, Bagian A). RPJMD ditetapkan dengan bentuk hukum ... (a) undang-undang, (b) peraturan presiden, (c) peraturan daerah, (d) peraturan kepala daerah. Kunci: c.

Data untuk Bagian B. Kabupaten Cahaya Timur (fiktif): pangsa sektor perikanan 24% dari PDRB kabupaten, sedangkan pangsa sektor yang sama di provinsi 12%. IPM kabupaten 66,50, sedangkan rata-rata provinsi 70,20.

B. Hitung location quotient sektor perikanan dan tafsirkan; bandingkan IPM kabupaten dengan provinsi dan simpulkan kesenjangannya. (skor 30)

Skenario untuk Bagian C. Desa pesisir dengan sektor perikanan basis, air minum layak rendah, program nasional kawasan perikanan terpadu, dan ancaman abrasi.

C. Susun matriks SWOT (minimal dua faktor per kuadran) dan satu strategi SO berdasarkan skenario tersebut. (skor 15)

Tabel 12.7 Pedoman Jawaban UTS

Bagian	Pokok jawaban yang diharapkan
B	$LQ = 24\% \div 12\% = 2,00$ (basis); kesenjangan IPM $70,20 - 66,50 = 3,70$ poin, kabupaten di bawah rata-rata provinsi.
C	Kekuatan: sektor perikanan basis; kelemahan: air minum layak rendah; peluang: program kawasan perikanan; ancaman: abrasi; strategi SO: mengembangkan kawasan perikanan terpadu memanfaatkan program nasional.

Rubrik UTS pada RPS (pemahaman konsep, ketepatan argumen, kelengkapan, struktur dan logika, bahasa) digunakan dengan bobot operasional 30%, 30%, 15%, 15%, dan 10%.

■ 12.5 Kisi-kisi, Contoh Naskah, dan Pedoman Penskoran UAS

UAS mencakup seluruh materi semester dengan penekanan minggu 9–15 sesuai RPS. Skor naskah 100 dibagi proporsional dengan bobot Sub-CPMK dalam UAS (3 : 2 : 1 : 3 : 3 : 4 : 4 dari 20).

Tabel 12.8 Kisi-kisi UAS

Sub-CPMK	Bobot NA	Skor soal	Indikator yang diukur	No. soal
Sub-CPMK1–2	5%	25	Paradigma dan regulasi perencanaan (ringkas)	1
Sub-CPMK3	1%	5	Interpretasi data wilayah (ringkas)	1
Sub-CPMK5	3%	15	Perencanaan partisipatif dan pohon masalah	2
Sub-CPMK6	3%	15	Program, indikator SMART, dan anggaran	3
Sub-CPMK7	4%	20	Konsistensi vertikal dan horizontal	4
Sub-CPMK8	4%	20	Efisiensi, keberlanjutan, dan rekomendasi	5
Jumlah	20%	100		

CONTOH NASKAH UAS

Kasus. Desa Bahari Sejahtera (fiktif) menyusun RPJM Desa setelah Musrenbang yang hanya dihadiri tokoh laki-laki. Program utama: pembangunan jalan usaha tani, dengan indikator “jalan diperbaiki” tanpa target panjang atau kualitas. Anggaran ditulis “sesuai kebutuhan”. RPJMD kabupaten menyebut sasaran peningkatan produktivitas pertanian, tetapi Renstra dinas pertanian hanya memuat indikator jumlah pelatihan.

1. Jelaskan paradigma perencanaan yang tercermin dari proses Musrenbang tersebut dan satu regulasi yang relevan. (skor 25)
2. Identifikasi kelemahan proses partisipatif dan susun kerangka pohon masalah untuk satu isu yang terlewat. (skor 15)
3. Perbaiki indikator dan anggaran program jalan usaha tani agar memenuhi kriteria SMART dan integritas anggaran. (skor 15)
4. Evaluasi konsistensi vertikal antara RPJMD dan Renstra dinas pertanian menggunakan kriteria relevansi. (skor 20)
5. Evaluasi efisiensi dan keberlanjutan program jalan usaha tani, lalu susun dua rekomendasi berbasis bukti. (skor 20)

Jawaban dinilai dengan kriteria UAS pada RPS (ketepatan konsep, kedalaman analisis, koherensi argumen); karena RPS tidak menetapkan bobot per kriteria, modul menggunakan bobot 35%, 40%, dan 25%.

■ 12.6 Rubrik Tugas Lain

Rubrik Tugas Analisis Wilayah pada lampiran RPS menilai keaktifan diskusi, sedangkan rubrik Kuis Regulasi Perencanaan masih kosong dan rubrik Proyek memakai kriteria umum. Karena itu, modul menggunakan rubrik operasional berikut. Rubrik final project Rencana Tugas disajikan pada Tabel 11.2.

Tabel 12.9 Rubrik Kuis Regulasi Perencanaan

Aspek	Bobot	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Ketepatan klasifikasi/identifikasi	40%	Tepat dan menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
Kejelasan dan kedalaman alasan	40%	Argumen kuat dan relevan	Argumen memadai	Alasan dangkal	Tanpa alasan
Ketepatan konsep regulasi	20%	Sesuai regulasi dan hierarki	Sedikit kekurangan	Banyak kekurangan	Tidak sesuai

Tabel 12.10 Rubrik Tugas Analisis Wilayah (Sub-CPMK3–4)

Aspek	Bobot	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Ketepatan dan kelengkapan data	35%	Data lengkap, sumber dan tahun jelas	Memadai	Sebagian tidak lengkap	Tidak memadai
Analisis dan interpretasi	35%	Kritis, menghubungkan data dengan isu	Logis	Deskriptif	Tidak ada analisis
Kualitas SWOT dan strategi	20%	Faktor berbasis bukti, strategi relevan	Memadai	Sebagian opini	Tidak logis
Sistematika dan integritas sumber	10%	Runtut, sumber jelas, catatan GenAI	Sedikit kekurangan	Kurang runtut	Tidak baku

■ 12.7 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Hasil asesmen digunakan untuk memperbaiki pembelajaran mengikuti siklus PPEPP dalam SPMI UNISAN.

Tabel 12.11 Siklus Evaluasi dan Perbaikan Mata Kuliah

Tahap	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
Pengumpulan data	Rekam nilai per sel rekonsiliasi ke SI-OBE; kumpulkan kuesioner umpan balik modul (Lampiran C)	Dosen pengampu	Minggu 16
Analisis	Hitung ketercapaian Sub-CPMK, CPMK, dan CPL tingkat kelas	Dosen dan koordinator RMK	Setelah nilai final
Refleksi	Kaji penyebab: materi, instrumen, jadwal proyek, atau akses ke dokumen daerah	Tim RMK	Rapat evaluasi semester
Tindak lanjut	Revisi unit dan instrumen; selaraskan RPS (tabel rekonsiliasi, jumlah minggu pada matriks CPL, minggu Sub-CPMK9, diagram Sub-CPMK1–3, rujukan Bappenas dan Kemendes PDTT, rubrik lampiran)	Dosen dan program studi	Sebelum semester berikutnya

Tahap	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
Pelaporan	Laporkan ketercapaian CPL ke program studi	Koordinator RMK	Akhir tahun akademik

MODUL AJAR · PERENCANAAN PEMBANGUNAN

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Anggaran indikatif	Perkiraan biaya program berdasarkan komponen belanja, disusun sebelum penganggaran resmi.
APB Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Baseline	Kondisi awal sebelum program dilaksanakan sebagai dasar pengukuran capaian.
Bottom-up	Paradigma perencanaan yang inisiatifnya berasal dari usulan masyarakat dan unit bawah.
Efektivitas	Ketercapaian target kinerja yang berkontribusi nyata pada sasaran yang lebih tinggi.
Efisiensi	Hubungan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh.
Indikator SMART	Indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.
Isu strategis	Kondisi penting, mendesak, dan berdampak luas yang perlu ditangani dalam periode perencanaan.
Keberlanjutan	Kemampuan program bertahan dan bermanfaat dalam dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Konsistensi horizontal	Keselaran antar-Renstra perangkat daerah yang sasarannya beririsan.
Konsistensi vertikal	Keselaran dokumen turunan terhadap dokumen induknya, misalnya Renstra terhadap RPJMD.
Location quotient (LQ)	Ukuran konsentrasi relatif suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan wilayah acuan.
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan, forum partisipatif berjenjang dari desa hingga nasional.
New Public Service	Lihat modul terkait; dalam konteks ini merujuk pada paradigma pelayanan berorientasi warga.
Paradigma partisipatif	Perencanaan yang dirumuskan bersama pemerintah dan masyarakat melalui deliberasi.
Pohon masalah (problem tree)	Alat memetakan sebab, masalah inti, dan akibat secara bertingkat.
Policy brief	Dokumen ringkas berisi temuan dan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan.
Podes	Potensi Desa, data BPS tentang sarana dan potensi setiap desa/kelurahan.
Relevansi	Ketepatan indikator atau program turunan dalam menjabarkan sasaran dokumen induk.
Renja	Rencana Kerja Perangkat Daerah, dokumen tahunan penjabaran Renstra.

Istilah	Pengertian
Renstra	Rencana Strategis Perangkat Daerah, dokumen lima tahunan penjabaran RPJMD.
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan tahunan daerah.
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen lima tahunan daerah.
RPJM Desa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk perencanaan dan penganggaran daerah.
SWOT	Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Top-down	Paradigma perencanaan yang inisiatifnya berasal dari pemerintah pusat atau pimpinan.

MODUL AJAR · PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAFTAR PUSTAKA**A. Pustaka Utama**

- Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley & Sons.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bappenas. (2019). *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Kementerian PPN/Bappenas. (Perlu diverifikasi; substansi utama mengacu Permendagri 86/2017.)
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kemendes PDTT. (Substansi rinci perlu diverifikasi.)

B. Rujukan Rencana Tugas RPS

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Pedoman Penyusunan RPJMD*. BAPPENAS.
- Badan Pusat Statistik. Data Potensi Desa (PODES) dan data sosial-ekonomi wilayah KTI. BPS RI.

C. Bacaan Pengayaan

- Andaleki, A., & Soeprapto, R. (2021). Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 115–130. (Tercantum dalam RPS; belum dapat diverifikasi dan tidak dirujuk dalam uraian modul.)
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.
- Reynolds, G. (2011). *Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery* (2nd ed.). New Riders.
- Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix: A Tool for Situational Analysis. *Long Range Planning*, 15(2), 54–66.
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

MODUL AJAR · PERENCANAAN PEMBANGUNAN

LAMPIRAN

■ Lampiran A. Templat Kerja

A.1 Proposal Proyek (Tahap 1, Minggu 2)

Unsur	Isian
Nama kelompok dan anggota (nama/NIM)	
Desa/kelurahan dan kabupaten/kota lokus	
Alasan pemilihan lokus	
Pembagian peran anggota	
Dokumen resmi yang telah diperoleh (RPJMD, Renstra, Renja, profil desa, PODES)	

A.2 Panduan Wawancara/FGD Terstruktur

No	Pertanyaan terbuka
1	
2	
3	
4	
5	
6	

A.3 Matriks Kebutuhan dan Pohon Masalah

Kebutuhan dinyatakan	Jenis (normatif/dirasakan/dinyatakan)	Prioritas	Sebab	Masalah inti	Akibat

A.4 Tabel Program, Indikator SMART, dan Anggaran

Program	Indikator	Baseline	Target	Komponen belanja	Perkiraan biaya (Rp)

A.5 Matriks Evaluasi Konsistensi dan Efisiensi-Keberlanjutan

Sasaran/indikator RPJMD	Sasaran/indikator Renstra	Target/realisasi Renja	Relevansi	Efektivitas	Efisiensi	Keberlanjutan

A.6 Log Kerja Mingguan dan Lembar Refleksi Individu

Minggu	Nama / NIM	Kegiatan dan kontribusi	Paraf ketua

Bagian refleksi	Isian (300–500 kata total)
Keputusan penting	
Keterbatasan dokumen	
Penghayatan nilai integritas dan keberpihakan publik	
Pelajaran	

A.7 Lembar Penilaian Sejawat Presentasi

Kriteria	Skor (1–4)	Komentar substantif
Kejelasan masalah dan bukti		
Kualitas program dan indikator SMART		
Ketajaman evaluasi konsistensi dan rekomendasi		
Kualitas presentasi dan kolaborasi tim		

Kriteria	Skor (1–4)	Komentar substantif
Kemampuan menjawab pertanyaan panel		

■ Lampiran B. Lembar Pernyataan Penggunaan GenAI dan Orisinalitas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Unsur	Isian
Nama / NIM (atau nama kelompok)	
Judul tugas	
Mata kuliah	Perencanaan Pembangunan (3KKIP317)

menyatakan bahwa tugas ini merupakan karya saya/kami sendiri. Seluruh data sekunder dan primer bersumber dari dokumen dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa fabrikasi. Penggunaan GenAI dalam tugas ini adalah sebagai berikut:

Nama alat GenAI	Tujuan penggunaan	Bagian tugas yang dibantu	Cara verifikasi

- ☐ Saya/kami tidak menggunakan GenAI dalam tugas ini.
- ☐ Seluruh keluaran GenAI telah saya/kami periksa dan verifikasi terhadap sumber primer.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran integritas akademik, termasuk fabrikasi data atau pemalsuan notulen, saya/kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Universitas Ichsan Gorontalo.

Gorontalo, ...

(.....)

■ Lampiran C. Kuesioner Umpan Balik Modul

Berilah tanda centang pada skor yang sesuai: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Capaian pembelajaran setiap unit dinyatakan dengan jelas.					
2	Uraian regulasi dan konsep perencanaan mudah dipahami.					
3	Panduan analisis data BPS dan SWOT membantu saya bekerja.					
4	Simulasi Musrenbang membantu saya memahami perencanaan partisipatif.					
5	Latihan dan kunci jawaban membantu saya mengukur penguasaan.					
6	Proyek meningkatkan kemampuan menyusun dokumen perencanaan nyata.					
7	Pembagian tugas individu dan kelompok adil.					
8	Rubrik dan sistem penilaian transparan.					
9	Tampilan dan tata letak modul memudahkan belajar.					
10	Secara keseluruhan modul ini bermanfaat.					

Pertanyaan terbuka

1. Bagian modul yang paling membantu:

.....

2. Bagian modul yang perlu diperbaiki:

.....

3. Saran untuk edisi berikutnya:

.....